

**IMPLEMENTASI HAK *EX OFFICIO* HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA KRUI SEBAGAI BENTUK
RASA KEADILAN BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI
DALAM PERKARA CERAI TALAK *VERSTEK*
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016-2017)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh
MEILINA YULIEN
NPM : 1674130010

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI ILMU SYARIAH**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Syariat Islam membenarkan terjadinya perceraian apabila menjadi solusi terakhir yang bertujuan untuk kemaslahatan. Salah satu bentuk perceraian adalah cerai talak, kewajiban suami terkait hak mantan istri yang ditalaknya dan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya telah diatur jelas dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan 241 serta surat At-talaq ayat 6 dan juga dalam Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki hakim karena jabatannya yang salah bentuknya adalah memutuskan atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan, kata "dapat" ditafsirkan "boleh secara *ex officio*" memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *hadhanah*, sebagai bentuk menyelamatkan dan perlindungan hak mantan istri dan anak akibat dari perceraian. Dengan hak *ex officio* majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kewajiban-kewajibannya walaupun tidak dituntut oleh mantan istri.

Namun dalam kenyataannya banyak putusan cerai talak di PA Krui belum maksimal diterapkan dengan memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri dan anak secara *ex officio*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan *ex officio* di PA Krui, apa saja pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* serta apa yang menjadi dasar seorang hakim menggunakan atau tidak menggunakan hak *ex officio* dalam memutus perkara cerai talak khususnya yang diputus *verstek* karena ketidakhadiran istri selama persidangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah kumpulan putusan-putusan PA Krui, buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimanakah tingkat pelaksanaan, apa yang menjadi pertimbangan hukum serta apa yang menjadi alasan seorang hakim menggunakan atau tidak menggunakan hak *ex officio* dalam memeriksa dan memutus perkara cerai talak *verstek* dalam hal pemberian pembebanan kepada mantan suami.

Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hak *ex officio* hakim di PA Krui dalam pemeriksaan perkara cerai talak *verstek* masih sangat minim, hanya ada 33 putusan atau 19,76 % yang memberikan hak anak dan mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio*. Hal ini disebabkan karena terdapat 2 kelompok hakim yang memandang berbeda terhadap penerapan hak *ex officio* hakim. Mayoritas majelis hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dalam menghukum pembebanan kepada suami, mereka hanya mengesahkan perceraian saja dengan pertimbangan bahwa istri yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut berarti telah menggugurkan hak-haknya. Mereka juga berpendapat bahwa hakim hanya bersifat pasif dalam memeriksa perkara perdata, memutus melebihi dari apa yang dituntut oleh pemohon termasuk pelanggaran (*ultra petita*) yang dapat menyebabkan cacat hukum. Kelompok hakim minoritas menggunakan hak *ex officio* hakim dalam pemeriksaan perkara cerai talak *verstek* dengan menyertakan pembebanan kepada suami dalam putusannya walaupun tidak dituntut/diminta oleh pihak istri dan selama dalam persidangan istri tidak pernah hadir, pertimbangannya bahwa kewajiban terkait nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *hadhanah* merupakan satu paket kewajiban sebagai akibat dari cerai talak dan sebagai bentuk perwujudan dari konsep kemaslahatan untuk melindungi kaum lemah yakni anak dan mantan istri. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) dan KHI Pasal 149, 152 dan 156. Penentuan beban ini didasarkan pertimbangan melihat kemampuan ekonomi dan itikad suami, lama usia perkawinan, nusyuz tidaknya istri serta faktor usia dan jumlah

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Meilina Yulien

No. Pokok Mahasiswa : 1674130010

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul IMPLEMENTASI HAK *EX OFFICIO* HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KRUI SEBAGAI BENTUK RASA KEADILAN BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK *VERSTEK* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016 - 2017) adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Februari 2019

Yang Menyatakan

Meilina Yulien

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI HAK *EX OFFICIO* HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA KRUI SEBAGAI BENTUK
RASA KEADILAN BAGI ANAK DAN MANTAN
ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK
VERSTEK (Analisis Putusan Pengadilan Agama Krui
Tahun 2016 - 2017)**

Nama Mahasiswa : MEILINA YULIEN

NPM : 1674130010

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang terbuka pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag
NIP. 19741106 200003 1 002

Dr. Hj. Zuhraini, M.H.
NIP. 196505271992032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag

NIP.19741106 200003 1 002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI HAK *EX OFFICIO* HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KRUI SEBAGAI BENTUK RASA Keadilan BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK *VERSTEK* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016 - 2017)**, ditulis oleh : Meilina Yulien, NPM : 1674130010 telah diujikan dalam ujian **Terbuka** pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag
Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos, M.H
Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag
NIP. 19601020 198803 1 005

Tanggal lulus ujian terbuka pada hari

PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI HAK *EX OFFICIO* HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KRUI SEBAGAI BENTUK RASA Keadilan BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK *VERSTEK* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016 - 2017)**, ditulis oleh : Meilina Yulien, NPM: 1674130010 telah diujikan dalam ujian **Tertutup** dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos, M.H

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H

Tanggal lulus ujian terbuka pada hari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif	A/a	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	dh	De dan ha
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sh	Es dan ha
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	Ge dan ha
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
 - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *arba'ah*
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *Tirmizi*
 - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Yunus*
3. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
4. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
5. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (حَدُّ = *haddu*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
7. *Tā' Marbut'ah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf ‘h’, sedangkan *tā' marbut'ah* yang hidup dilambangkan dengan huruf ‘t’, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلِ = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
8. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَاهَا = *fuqāha*).¹

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kasih-Nya dan kemudahan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK *EX OFFICIO* HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KRUI SEBAGAI BENTUK RASA Keadilan BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRIDALAM PERKARA CeraI TALAK*VERSTEK*, (Analisis Putusan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016-2017)”**. Tesis ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar magister dalam ilmu hukum keluarga pada Universitas IslamNegeri Raden Intan - Lampung.

Dalam penyusunan hingga terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan - Lampung beserta staf yang telah memberikan ijin, kesempatan serta dorongan yang tidak ternilai kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan - Lampung yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menulis tesis ini dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Bapak Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan - Lampung & Bapak Eko Hidayat, S.Sos., MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Universitas IslamNegeri Raden Intan - Lampung yang telah memberikan berbagai motifasi dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini yang telah memberikan masukan dan arahan dalam pembimbingan kepada penulis hingga tesis ini dapat terwujudkan.
5. Ibu Dr. Hj.Zuhraeni, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan hingga lebih sempurnanya tesis ini.

6. Seluruh dosen Pascasarjanajurusan hukum keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan - Lampung yang telah menyampaikan ilmu dengan sabar dan ikhlas dalam proses belajar di perkuliahan.
7. Bapak Drs. H.Omay Mansyur, M.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Krui, Kabupaten Lampung Barat beserta jajarannya yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Krui, Kabupaten Lampung Barat.
8. Seluruh hakim pada Pengadilan Agama Krui, Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu melengkapi penelitian tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis tercinta yang telah memberi motivasi, arahan serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis
10. Serta semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penyusunan dimasa-masa mendatang.Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Bandar Lampung, Februari 2019

Penulis,

MEILINA YULIEN

NIM : 1674130010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Kerangka Pemikiran	17
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	26

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perceraian.....	28
1. Pengertian Perceraian	28
2. Jenis-jenis Perceraian	30
3. Syarat-syarat dan Alasan Mengajukan Perceraian.....	35
4. Tata Cara Mengajukan Perceraian	38
B. Hak Anak dan Mantan Istri	42
1. Hak Anak.....	43
2. Hak Mantan Istri	48
C. Tinjauan Umum Tentang Hakim, Putusan Verstek dan Pertimbangan Hukum.....	52
1. Hakim.....	52

2. Putusan Verstek	58
3. Pertimbangan Hukum	62
D. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	76
1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	76
2. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	77

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Krui	80
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Krui.....	80
2. Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi PA Krui	82
B. Statistik Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Krui.....	89
C. Data Hasil Penelitian Di Pengadilan Agama Krui	91
1. Perkara Cerai Talak Nomor 278/Pdt.G/2016/PA.Kr	92
2. Perkara Cerai Talak Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Kr	99
3. Perkara Cerai Talak Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Kr	107

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Implementasi Hak <i>Ex Officio</i> Hakim di Pengadilan Agama Krui.....	114
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Beban Kewajiban Kepada Suami Dengan <i>Ex Officio</i> Sebagai Bentuk Rasa Keadilan	129
C. Analisis Terhadap Landasan Argumentatif Hakim Menggunakan Atau Tidak Menggunakan Hak <i>Ex Officio</i> Dalam Memutus Perkara Cerai Talak <i>Verstek</i>	139

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	153
B. Rekomendasi	153

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel1 Perkara Perceraian Yang Diterima dan Diputus Di PA Krui	8
Tabel 2Rekapitulasi Jenis Perkara Yang Diterima Di PA Krui	87
Tabel 3Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di PA Krui.....	88
Tabel 4Kriteria Putusan Cerai Talak Tahun 2016 – 2017	89
Tabel 5Rekapitulasi Jenis Pembebanan Dari Majelis Hakim	117
Tabel6Penanganan Perkara Cerai TalakBerdasarkan Majelis Hakim	128
Tabel 7 Hasil Questioner.....	129





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu instrument dalam rangka menegakkan hukum di tengah masyarakat adalah Lembaga Peradilan, selain Kepolisian dan Kejaksaan. Lembaga Peradilan merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²

Salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang diberi kuasa sebagai pelaku atau pelaksana kekuasaan kehakiman oleh negara selain Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang juga merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah atau pengaruh lain.

Mahkamah Agung menaungi empat badan peradilan di bawahnya, yang diatur lebih khusus dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi.

² Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Keempat lembaga peradilan di atas, masing-masing memiliki cakupan dan batasan kekuasaan (kewenangan) masing-masing yang terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak atau absolut (*absolute competentie*). Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan atau kewenangan untuk mengatur pembagian kekuasaan mengadili pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat/termohon. Sedangkan kewenangan absolut (kekuasaan mutlak) berkaitan dengan wewenang suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain atau menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.³

Masing-masing lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda satu sama lain, sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Contohnya : Peradilan Umum berwenang memeriksa perkara perdata dan pidana, Peradilan Agama berwenang memeriksa perkara perdata yang berdasarkan hukum Islam kecuali yang diatur secara khusus, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa perkara administrasi ketatanegaraan, dan Peradilan Militer berwenang memeriksa perkara pidana yang terkait dengan seorang anggota TNI. Setiap lembaga peradilan terletak di ibukota kabupaten atau kota, kecuali Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang kedudukannya terletak di ibukota propinsi.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Tugas dan wewenang Pengadilan Agama secara rinci dijelaskan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h.11

⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet ke-2, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h. 36

1. Perkawinan
2. Warisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Sadaqoh
9. Ekonomi Syari'ah.⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) dalam pasal 38 menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.⁶ Berdasarkan hal tersebut warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mencari keadilan untuk menyelesaikan masalah perceraian di Pengadilan Agama, karena masalah perceraian merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang memiliki sebab atau alasan terjadinya. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Menurut syariat Islam perceraian hanya dibenarkan dengan syarat hanya untuk kemashlahatan bersama serta tidak ada lagi solusi lain untuk mempertahankan keutuhan keluarga, atau jika kedua pasangan suami istri telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasehat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat

⁵ Yudha Pandu, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Indonesia Legal Publishing, 2006), h. 21

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut untuk bercerai. Hal ini dilihat dengan adanya sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*Halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*⁷

Undang-undang Perkawinan tidak memberikan batasan jelas mengenai istilah perceraian. Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Putusnya suatu perkawinan karena kehendak cerai yang datang dari pihak suami (pihak suami yang mengajukan permohonan cerai) disebut cerai talak, sedangkan bila gugatan cerai itu datangnya dari pihak istri, maka perceraian ini disebut cerai gugat (pihak istri yang mengajukan gugatan cerai).⁸ Dengan kata lain di Indonesia, perceraian yang terjadi dan yang diakui negara hanya ada 2 (dua) macam yaitu yang diakibatkan atas kehendak suami dengan cara menjatuhkan cerai talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal cerai gugat/khuluk, (cerai talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, pasal 66 dan cerai gugat diatur dalam Paragraf 3, pasal 73, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).⁹

Ada perbedaan yang sangat mendasar diantara 2 (dua) jenis perceraian yang dijelaskan di atas. Apabila yang terjadi adalah cerai gugat, maka setelah terjadi perceraian tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi istri kepada mantan suaminya. Berbeda halnya dengan cerai talak yang diajukan suami. Seorang suami yang menceraikan istrinya mempunyai beberapa kewajiban yang harus

⁷ Faidh al-Qadir juz 1 hlm. 107-108, al-manhal al-lathif hlm. 71)

⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, cet ke-2, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2002), h. 276

⁹ Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), h. 66 dan 60

ia penuhi, tidak hanya kepada anak hasil pernikahannya saja namun juga pemenuhan kewajiban terhadap mantan istrinya.

Kewajiban suami kepada anak-anaknya disebutkan dalam al-Quran yang berbunyi :

﴿... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ (٢٣٣)

... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut... (QS. al- Baqarah (2) : 233)

Kewajiban yang harus ia penuhi terhadap hak-hak mantan istri yang diceraikan hak-hak itu diantaranya berupa nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*. Allah SWT telah berfirman yang berbunyi :

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لَهُنَّ أُخْرَى﴾ (٦)

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (QS. at- Talaq (65) : 6)¹⁰

Selain kewajiban nafkah *iddah* dan *madhiyah*, kewajiban suami kepada istri yang diceraikannya adalah memberikan *mut'ah*. Allah SWT telah berfirman yang berbunyi :

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٤١)

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. al- Baqarah (2) : 241)¹¹

Ayat di atas memaparkan dengan sangat jelas bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya hendaklah ia memenuhi kewajiban-

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma, 2014), h.558

¹¹ *Ibid*, h. 39

kewajibannya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Perintah untuk memberikan nafkah dalam al-Quran bisa dimaknai sebagai suatu bentuk kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. Hal ini juga didukung dan diatur dalam sistem hukum di Indonesia yaitu dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjadi acuan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara yang terdapat dalam pasal 149, 152 dan 156 yang menjelaskan bahwa apabila sebuah perkawinan putus karena perceraian maka mantan suami mempunyai beberapa kewajiban diantaranya memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, maskan dan kiswah kepada mantan istri (kecuali istri tidak pernah dicampuri/*qobla al dukhul* atau istri nusyuz), melunasi mahar yang terhutang dan mantan suami wajib memberi *hadhanah* terhadap anak-anaknya sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri.

Menurut Undang-undang Perkawinan kewajiban suami kepada mantan istri dipaparkan dalam pasal 41 yang mengatur bahwa setelah terjadinya perceraian pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya dan bapak wajib bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sang anak.

Para ulama fiqih sepakat bahwa memberikan nafkah untuk istri adalah wajib jika dilihat dari sisi hukum, yang merupakan dampak dari akad nikah yang sah, dan juga merupakan salah satu hak istri dari hak-hak lain yang dimiliki oleh istri dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh syariat.¹² Jadi dengan adanya ijab kabul (akad nikah) secara otomatis mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya, tidak berhenti ketika adanya ikatan perkawinan saja akan tetapi jika perkawinan tersebut terputus maka mantan suami masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur untuk itu.

Selain itu Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya bagi kalangan hakim Pengadilan Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang

¹² Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri : Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam (terjemahan)*, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2007), h. 47

Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Hal ini termaktub dalam Bab C Rumusan Kamar Agama angka 11 yang berbunyi “*nafkah anak merupakan kewajiban orang tua*”.

Pembebanan kewajiban nafkah anak kepada bapak, lebih spesifik diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, dimana pada Bab C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 5 menyatakan bahwa “*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut dalam asuhan ibunya*”.

Sebagai wujud upaya penegakan dan perlindungan hukum yang berkeadilan khususnya bagi kaum hawa, Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (perempuan berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak). Pasal 2 PERMA tersebut menyatakan bahwa hakim mengadili perkara perempuan yang berurusan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan dihadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bagi seorang istri yang menjadi korban atau yang berhadapan dengan hukum hendaknya hakim dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya dan memberikan persamaan hak dihadapan hukum sesuai dengan harapan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang bertujuan untuk melindungi kaum wanita agar tidak ditindas dan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika putusya pernikahan yang disebabkan karena perceraian maka tidak serta merta mantan suami terbebas dari kewajibannya terhadap anak dan mantan istrinya. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada anak, bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat materil, sedangkan tanggung jawab suami kepada mantan istri yakni kewajiban memberikan biaya penghidupan berupa

nafkahmadhiyah, *nafkah iddah* dan *mut'ah*.

Pengamatan awal hasil pra penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Krui, diperoleh data awal bahwa sepanjang tahun 2016-2017 perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Krui dalam tabel berikut :

Tabel 1

Perkara Perceraian Yang Diterima dan Diputus¹³

Uraian	Perkara Perceraian Tahun 2016		Perkara Perceraian Tahun 2017	
	Versterk Murni	Verstek Pembebanan	Versterk Murni	Verstek Pembebanan
Cerai Talak	53	9	45	24
Jumlah	62		69	

Sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bersumber dari data laporan perkara tahunan 2016 dan 2017 diketahui Pengadilan Agama Krui telah menerima perkara perceraian cerai talak (objek penelitian) sebanyak 167 perkara cerai talak dari jumlah tersebut 131 perkara diputus majelis hakim dengan *verstek* karena ketidakhadiran istri selama persidangan pemeriksaan perkara tersebut.

Data pada tabel 1 di atas menggambarkan bahwa dari sebagian besar perkara cerai talak di Pengadilan Agama Krui diputus dengan *verstek* karena istri/Termohon sebagian besar tidak pernah menghadiri persidangan. Dari 131 perkara perceraian yang diputus *verstek* tersebut yang diikuti pembebanan menggunakan hak *ex officio* hanya sebanyak 33 perkara saja sedangkan sisanya diputus dengan *verstek* murni tanpa ada pembebanan yang berjumlah sangat besar yakni 98 perkara. Jumlah angka yang cukup signifikan jika kita bandingkan antara keduanya, lebih dari setengah jumlah perkara cerai talak yang diterima 2 tahun terakhir diputus tanpa ada pembebanan sama sekali.

Berdasarkan data perbandingan diatas, timbul pertanyaan mengapa masih sedikit putusan yang memberikan pembebanan suami terhadap anak dan

¹³ Dokumentasi Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016 dan 2017

mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* khususnya dalam perkara cerai talak yang diputus tanpa hadirnya istri (*verstek*). Apa kendala yang menyebabkan minimnya hakim menggunakan hak *ex officio* untuk mewujudkan hak keadilan bagi anak dan mantan istri. Serta bagaimana pula pertimbangan hakim dalam memeriksa serta memutus perkara tersebut, walaupun pihak istri tidak hadir dan tidak bisa membuktikan atau memberikan jawaban atas gugatan dari pihak suami. Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa penulis bermaksud untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dalam bentuk tesis dengan judul **IMPLEMENTASI HAK *EX OFFICIO* HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KRUI SEBAGAI BENTUK RASA KEADILAN BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK *VERSTEK* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016 - 2017).**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat implementasi hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Krui bagi mantan istri dan anak dalam perkara perceraian khususnya cerai talak *verstek*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan beban kewajiban kepada suami dengan hak *ex officio* bagi mantan istri dan anak sebagai bentuk rasa keadilan?
3. Apa landasan argumentatif (alasan) seorang hakim menggunakan atau tidak menggunakan hak *ex officio* dalam memutus cerai talak *verstek* ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya cerai talak yang diputus *verstek*.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Krui dalam menetapkan dan memutus perkara cerai talak yang diputus *verstek*.
3. Untuk mengetahui alasan kenapa seorang hakim menggunakan atau tidak menggunakan hak *ex officio* dalam memberikan beban kewajiban kepada mantan suami dalam perkara cerai talak yang diputus *verstek*.

D. Kegunaan Penelitian

Selain dari tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini dapat mencapai kegunaan, diantaranya :

1. Dapat memberikan kontribusi bagi kelengkapan dan perkembangan ilmu hukum khususnya bagi penulis, dan kalangan akademisi serta praktisi hukum lainnya khususnya bagi kalangan hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa agar dapat memberikan keadilan kepada kedua belah pihak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh masyarakat khususnya dalam mengetahui dan memahami ada hak-hak yang diperoleh mantan istri dan harus dipenuhi mantan suami setelah terjadi perceraian.

E. Kajian Pustaka

Beberapa kajian terkait penelitian yang sudah dilakukan dengan pembahasan tentang hak *ex officio* hakim, diantaranya adalah :

1. Tesis dengan judul “Penerapan Hak *Ex officio* Dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri Dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama se-D.I Yogyakarta” yang disusun oleh Muhammad Nawawi Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Tesis ini merumuskan ada 2 permasalahan yakni :
 - a. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama se-D.I Yogyakarta.
 - b. Apa dasar hukum yang digunakan.

Teori yang digunakan adalah teori hukum progresif. Hasil penelitiannya bahwa hak *ex officio* digunakan hakim ketika istri tidak mengetahui hak-hak yang didapatnya, untuk biaya nafkah anak hak *ex officio* digunakan hakim ketika tidak terjadi kesepakatan antara kedua orang tua. Pertimbangan yang digunakan adalah segi kepatutan hukum, kelayakan hukum, tuntutan subsider dan keberanian hakim.

Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI. Putusan yang dianalisis hanya putusan yang diambil dari tahun 2013-2015, dimana belum ada pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar pada Mahkamah Agung RI.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam hal ini penulis mengambil sudut pandang lain berangkat dari banyaknya perkara cerai talak yang diputus *verstek* yang hanya mengesahkan perceraian sajatanpa ada pembebanan apapun. Putusan yang penulis teliti adalah putusan tahun 2016-2017 setelah keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar pada Mahkamah Agung RI yang salah satu isinya memperbolehkan hakim memberikan beban nafkah anak secara *ex officio* apabila terbukti bahwa anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.¹⁴

2. Tesis dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” yang disusun oleh Ana Sofiatul Fitri Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014. Tesis ini merumuskan ada 2 permasalahan yakni :
 - a. Bagaimana pandangan serta langkah hukum hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian.

¹⁴ Muhammad Nawawi, *Penerapan Hak Ex officio Dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri Dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama se-D.I Yogyakarta*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

- b. Apa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian.

Substansi penelitian dari tesis tersebut terkait tentang penentuan nafkah akibat perceraian dapat diajukan melalui jalur gugatan dan *ex officio*, dengan penelitian bersifat lapangan di 2 lembaga peradilan di daerah Malang, yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sebagian hakim berpendapat bahwa jalur *ex officio* dianggap termasuk asas *ultra petita*. Sedangkan penentuan nafkah didasarkan pada aspek yuridis, kepatutan dan kemampuan dan aspek non yuridis, terkait penggunaan rujukan dalam pertimbangan hukum.

Perbedaan penelitian dengan tesis yang akan dilakukan penulis adalah, pertama bahwa objek nafkah terfokus pada nafkah mantan istri, sedangkan penelitian penulis pada nafkah untuk mantan istri dan anak. Perbedaan berikutnya adalah pola pengajuan nafkah, tesis diatas diajukan melalui gugatan istri, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada hak *ex officio* melalui permohonan perceraian yang diajukan oleh suami tanpa permintaan/tuntutan dari pihak istri.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Hak *Ex Officio* Hakim

Hakim adalah jabatan yang diberikan negara untuk menciptakan hukum, dengan menggunakan penalaran dan ijtihadnya mencari berbagai dalil hukum dalam menyelesaikan perkara yang diterima. Seorang hakim juga diberikan hak independensi dan bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjatuhkan sebuah putusan.

Tugas utama seorang hakim sebagai orang yang arif dan bijaksana adalah untuk memutuskan dan menetapkan perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan berdasarkan logika dan analisis yang jernih. Seorang hakim berkewajiban

¹⁵Ana Sofiatul Fitri, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan serta memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa tak terkecuali dalam perkara cerai talak yang diputus *verstek* (salah satu pihak tidak hadir), khususnya keadilan bagi anak dan mantan istri yang dicerai.

Hakim diberi hak khusus oleh undang-undang dalam rangka memberikan rasa keadilan, dan dalam konteks perceraian hak khusus tersebut adalah hak *ex officio*. *Ex officio* dapat digunakan sebagai suatu bentuk amanah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri yang dicerai. Mengenai ini dalam al-Quran dijelaskan :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS An-Nisaa (6) ayat 58)

Ayat di atas Allah SWT memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat-amanat itu harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanat yang dimaksud termasuk hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain.. Maka Allah SWT. memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya.

Hak *ex officio* selalu melekat pada hakim karena jabatannya dan dapat diimplementasikan dalam rangka pencarian hukum demi suatu kepastian dan keadilan hukum di muka bumi ini. Hak *ex officio* dapat diibaratkan sebagai senjata bagi hakim untuk memberantas ketidakadilan dan mengangkat sebuah hak yang terbengkalai jika telah diyakini kebenarannya melalui fakta-fakta hukum yang ditemukan dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Ex officio juga dapat menjadi upaya ijtihad hakim Tuntutan upaya penggunaan ijtihad bagi hakim ketika mengadili perkara diisyaratkan oleh hadis Nabi SAW, dari Abdullah bin Amr bin Ash. Ia berkata: seorang hakim

apabila menghukum dengan ijtihadnya, kemudian mendapatkan kebenarannya, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila menghukum dengan ijtihadnya, kemudian mendapatkan kesalahan, maka ia mendapatkan satu pahala.

Hadits tersebut mengisyaratkan sebuah perintah penting agar seorang hakim manakala mengadilisesuatu perkara hendaknya melakukan ijtihad terhadap materi perkara yang diadili dan dalam melakukannya pun harus dengan maksimal. Penggunaan ijtihad di zaman modern ini terasa sangat penting mengingat perkembangan zaman, kebudayaan dan peradaban manusia makin progresif dan kompleks.

Dengan Hak *ex officio* tersebut diharapkan hal-hal buruk yang sekiranya dapat ditimbulkan dari suatu peristiwa hendaknya dapat dihindari dan dicegah. Keputusan hakim juga dapat menentukan kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Pada dasarnya dalam Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan terhadap umatnya dan bahaya itu harus dielakkan sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah disebutkan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Tidak berbahaya dan tidak pula membahayakan.*¹⁶

Putusan yang dibuat seorang hakim ketika mengetuk palu hendaklah dapat mewujudkan kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari kemudharatan, baik mudharat bagi kedua pihak suami istri, anak-anak, keluarga, masyarakat luas maupun bagi hakim itu sendiri. Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafshadat harus lebih diutamakan daripada meraih maslahat.

Berdasarkan kaidah ini dapat diketahui bahwa adanya kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain bahwa usaha untuk menghindari agar tidak terjadi suatu kemudharatan

¹⁶ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), h.54

dengan segala upaya yang mungkin untuk diusahakan harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan.¹⁷

Kemaslahatan yang dimaksud disini adalah apabila seorang hakim tidak menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya sebagai amanah dari jabatannya sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dimana sekarang ini banyak pemahaman di tengah masyarakat bahwa hak cerai itu sepenuhnya ada di tangan suami yang terkadang pelaksanaannya dilakukan dengan semaunya dan semena-mena. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan bagi pihak istri, biasanya suami setelah menceraikan istrinya dapat segera menikah lagi karena tidak ada masa *iddah*, setelah menikah lagi dia akan sibuk dengan kehidupannya yang baru, ia sama sekali tidak peduli lagi dengan kehidupan mantan istri dan anak-anaknya sehingga istri yang diceraikan akan menderita karena selain harus menanggung beban hidupnya sendiri juga menanggung pembiayaan kelangsungan hidup anak-anak hasil perkawinan.

Kondisi demikian akan memberikan dampak terhadap tumbuh dan kembang seorang anak. Kebutuhan anak yang tidak terpenuhi baik keseharian atau kesehatan dan pendidikannya akan menjadikan seorang anak tidak sehat secara fisik, tidak normal secara psikis, dan bahkan membuat anak frustrasi, kurang gizi, bahkan putus sekolah.

2. Putusan Yang Berkeadilan

Putusan adalah kalimat akhir dari sebuah proses persidangan bagi para hakim. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁸

¹⁷ Asjmundi Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Buntang, 1976), h.84

¹⁸ Pasal 1 ayat 11 KUHP Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakimitu adalah : “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana/perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana/perdata pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum berbentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”¹⁹

Berdasarkan segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahapan-tahapan pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- 1) Putusan gugur
- 2) Putusan *verstek*
- 3) Putusan tidak menerima
- 4) Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Dalam perkara cerai talak dimana pihak istri hadir di persidangan, maka istri dapat memberikan tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh suami, sekaligus mengajukan tuntutan balik kepada pihak suami agar hak-haknya sebagai istri serta hak-hak anak dapat dipenuhi oleh suami apabila

¹⁹Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, (Jakarta : Mandar Maju, 2007), h 127

terjadi perceraian. Apa yang disampaikan oleh istri dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan yang adil, dimana tuntutan cerai dapat dikabulkan dan hak istri serta hak anak tidak diabaikan.

Akan tetapi ketika pihak istri tidak hadir di persidangan, secara otomatis istri tidak dapat menyampaikan tanggapan atau bahkan mengajukan tuntutan balik terhadap suami atas hak-hak yang dimilikinya, sehingga putusan yang dijatuhkan bersifat *verstek* (tanpa hadirnya pihak termohon/istri). Kondisi yang demikian ada aspek keadilan yang dapat diberikan seorang hakim terhadap mantan istri dan anak sebagai akibat perceraian, yaitu dengan jalan menggunakan hak *ex officio*. Melalui jalan ini seorang hakim dapat memberikan putusan yang adil bagi semua pihak, bagi suami (yang mengajukan gugatan cerai), bagi istri (yang digugat cerai) serta bagi anak-anak hasil pernikahan.

Putusan dari seorang hakim yang tidak dapat memberikan keadilan secara tidak langsung akan memberikan dampak langsung terhadap psikologis dan sosiologis bagi masyarakat terkhusus bagi mantan istri. Dimana akan berkembang anggapan di tengah masyarakat pendapat bahwa Pengadilan Agama dianggap sebagai lembaga pengesah perceraian saja tanpa ada keadilan yang diperoleh. Perasaan kecewa ini menyebabkan masyarakat antipati terhadap lembaga Pengadilan Agama. Mereka berpendapat buat apa repot-repot ke pengadilan hasilnya sudah jelas penyelesaiannya hanya akan berakhir pada perceraian dan hanya akan mendapatkan akta cerai saja tanpa adanya penetapan hukuman bagi mantan suami sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain yang seharusnya ia dapatkan. Disinilah posisi hakim sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan menjadi sangat penting demi terwujudnya keadilan yang benar-benar adil.

Selain itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan menggunakan hak *ex officio* tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi salah satu pihak, namun memberikan keadilan bagi kedua belah pihak suami istri. Dimana suami diijinkan untuk menjatuhkan talak di depan persidangan akan tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi anak dan mantan istri yang menjadi

korban akibat perceraian yang terjadi dengan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Serta meminimalisir timbulnya sengketa atau tuntutan lanjutan atas gugatan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak dan mantan istri setelah adanya putusan dari pengadilan.

G. Kerangka Pemikiran

Perceraian di era modern dapat terjadi pada usia perkawinan berapapun baik usia perkawinan muda, menengah maupun perkawinan yang sudah berjalan lama. Salah satu jenis perceraian yang diakui oleh hukum di Indonesia adalah cerai talak yaitu perceraian yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Setelah proses persidangan, putusan dapat dijatuhkan dengan dan atau tanpa kehadiran istri (*verstek*). Putusan *verstek* terhadap perkara cerai talak yang diberikan oleh majelis hakim ada yang memberikan pembebanan terhadap suami yang dapat berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak (*hadhanah*), dan ada juga yang tidak memberikan pembebanan apa-apa terhadap suami.

Hasil dari proses penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa mayoritas putusan hakim dalam perkara cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama Krui banyak yang tidak memberikan pembebanan apapun kepada suami. Hanya sebagian kecil majelis hakim saja yang memberikan pembebanan dengan menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk melindungi hak-hak mantan istri dan anak dari kesewenang-wenangan suami.

Konsep teori yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teori hukum Islam yang bersumber pada al-Quran dan menekankan bahwa kemaslahatan kepada kedua pihak yang dituangkan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Krui untuk menghukum suami memenuhi dan membayarkan apa-apa yang menjadi hak mantan istri dan anaknya ketika ia akan menceraikan istrinya.

Hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia bahkan seluruh alam, tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar demi kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia, dengan demikian tujuan syar'i dalam menurunkan syariat tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Prinsip dasar teori maslahat

adalah lebih mengutamakan menghindari mafsadat yang lebih besar yang nantinya akan ditimbulkan dari sebuah keputusan atau tindakan daripada meraih kebaikan. Seorang hakim berkewajiban menghindari akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain bahwa hakim harus berusaha menghindari agar jangan terjadi suatu kemudharatan dimasa yang akan datang dengan segala upaya yang mungkin diusahakan.

Putusan hakim yang mengabulkan perceraian dan membebani suami untuk membayarkan nafkah *iddah*, dan *mut'ah* merupakan salah satu bentuk maslahat yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Krui. Dengan adanya beban kewajiban berupa *mut'ah* akan menjadi penghibur hati bagi istri yang diceraikan oleh suaminya serta nafkah *iddah* dapat menjadi jaminan untuk biaya hidup istri selama ia menjalani masa *iddah* sebagai akibat dan konsekuensi pasca dikabulkannya perceraian.

Putusan hakim yang mengabulkan cerai talak dan membebani suami untuk memenuhi biaya hidup anak-anaknya (*hadhanah*) setiap bulan juga merupakan bentuk maslahat, karena biaya hidup seorang anak merupakan kewajiban seorang ayah yang harus ia penuhi sampai dengan anak tersebut mandiri, kewajiban ini tidak serta merta putus begitu saja walaupun terjadi perceraian. Biaya hidup tersebut akan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup seorang anak dan menghindarkannya dari hidup yang kekurangan dan terlantar.

Mengabulkan perceraian saja tanpa memberikan pembebanan kewajiban kepada suami sangat bertentangan dengan konsep teori maslahat. Hal ini sangat memberikan dampak yang negatif pada anak dan mantan istri. Istri yang diceraikan akan terluka hatinya, ia dapat saja mengalami stres dan depresi akibat dari efek sosial yang akan ia hadapi pasca bercerai. Belum lagi ia harus mulai memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi biaya hidupnya sendiri serta menanggung biaya hidup anak-anak yang ada dalam asuhannya.

Teori kedua yang digunakan dalam tesis ini adalah teori hukum progresif oleh Satjipto Raharjo. Sebagaimana yang dinyatakan Satjipto Raharjo bahwa suatu hukum dapat dijadikan sandaran negara untuk dapat mewujudkan kebijaksanaan, dan negara sebagai aktor (*legal maker*) yang bertugas

merumuskan hukum secara tertib menurut prosedur yang telah ditentukan yaitu tentang apa yang menjadi kehendak masyarakat.²⁰

Hukum progresif merumuskan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Mutu sebuah hukum ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan pada kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang pro-rakyat, para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif dan inovatif terhadap peraturan yang ada dengan menyesuaikan dengan kondisi dan zaman yang berlaku di masyarakat saat ini, bukan hanya menunggu adanya perubahan peraturan dan perundang-undangan.

Jimly Assiddiqie menyatakan bahwa hukum merupakan tata aturan sebagai suatu bentuk aturan-aturan tentang perilaku manusia, sehingga hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memilikisatu kesatuan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²¹

Menurut Nonet dan Selznik, hukum tidak selamanya sebagai hukum yang formal dan prosedural. Hukum yang terabstraksi dalam aturan-aturan adalah untuk kepentingan manusia itu. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat. Hukum progresif juga selalu melekat pada etika dan moralitas kemanusiaan, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya

²⁰Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cet III, (Bandung : Angkasa, 1999), h.113

²¹ Jimly Assiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I (Jakarta : Sekretariat jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Press, 2006), h.13

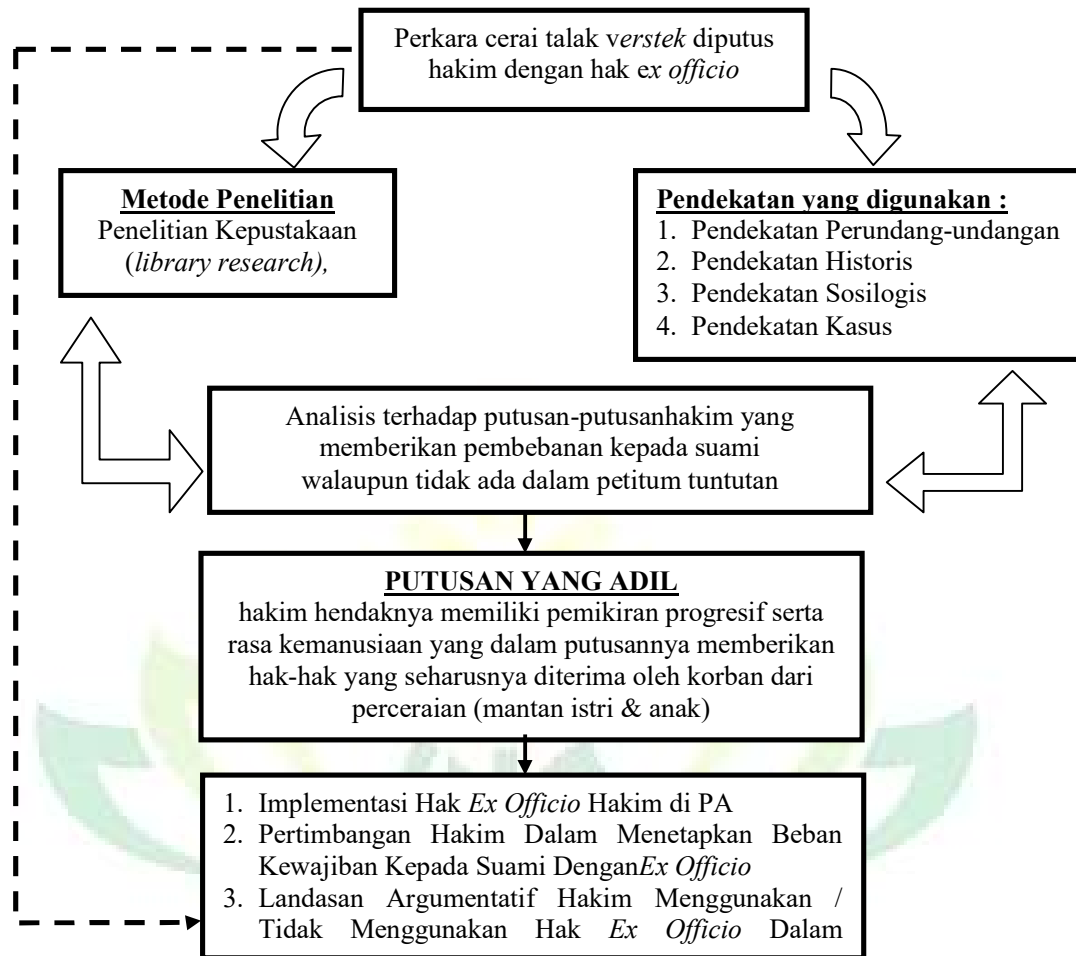
Disinilah peran seorang hakim sebagai pembuat hukum wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dengan tidak hanya memahami satu aturan saja. Sampai saat ini masih banyak hakim berpegang teguh pada asas *ultra petitum partium*, bahwa seorang hakim tidak boleh memberikan putusan diluar dari apa yang tertera dalam petitum tuntutan. Pemahaman seperti ini harus dihilangkan karena termasuk pemikiran hakim yang konservatif. Dengan berdasarkan pada prinsip tersebut akan banyak orang-orang yang terdzalimi karena hak-haknya tidak terpenuhi.

Hakim yang bijak akan menggunakan hak *ex officio*nya jika hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, memberikan kepada para pihak yang memang pantas untuk memperoleh hak-haknya, sehingga rasa keadilan terpenuhi baginya, hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan asas *ultra petitum* melihat manfaat yang diperoleh setelahnya.

Seorang hakim diharapkan berani untuk keluar dari kekakuan undang-undang yang sifatnya formalistik kepada pemikiran yang bebas, lebih maju dan lebih berhati nurani dan lebih manusiawi dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir untuk menciptakan keadilan yang seadil-adilnya dan kesejahteraan bagi semua pihak.



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika dituangkan dalam bagan dapat digambarkan sebagai berikut :



H. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Tahap yang cukup penting dalam penelitian ilmiah adalah penentuan metode penelitian yang akan dipakai agar dapat selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dengan efektif. Metode penelitian ini akan sangat berpengaruh dalam penelitian data, teknik analisis data dan yang paling utama hasil penelitian nantinya.

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan tesis ini, dipilih lokasi penelitian di Kota Liwa dengan objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Krui. Pengadilan Agama Krui dipilih penulis mengingat di Pengadilan Agama Krui terdapat banyak perkara cerai talak yang diputus *verstek* namun disertai dengan pembebanan kepada pemohon walaupun istri tidak pernah menghadiri persidangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dari perpustakaan.²² Jadi dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur, baik itu buku-buku, karya-karya lain dan produk dari sebuah lembaga pengadilan yaitu putusan hakim. Dokumen putusan-putusan perdata yang diteliti meliputi putusan Pengadilan Agama Krui yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam kurun waktu antara tahun 2016-2017. Putusan yang diteliti adalah putusan-putusan yang berkaitan dengan masalah sengketa bidang perkawinan (perceraian), dan lebih spesifik terhadap masalah cerai talak yang diputus *verstek*, dasar hukum serta pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan.

²² Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta : Andi Offset, 2001), h. 32

3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu atau tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.²³ Peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini terdapat data utama (primer), data pendukung (sekunder) dan data penunjang (tersier).

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi atau obyek penelitian.²⁴ Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari orang lain baik dalam bentuk turunan, salinan yaitu berupa produk badan peradilan (putusan pengadilan), buku-buku yang terkait dengan hukum beracara, tesis, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti penelitian terdahulu, jurnal atau catatan serta yang menunjang penelitian yaitu yang membahas tentang *ex officio* hakim.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁵ Data sekunder dapat berupa data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan hakim-hakim di lapangan terkait dengan bagaimana penerapan dan apa saja yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan beban kepada suami dalam perkara cerai talak *verstek* dengan *ex officio*. Diantara pertimbangan penulis dalam memilih informan, penulis memilih hakim dengan kriteria :
 - 1) Hakim yang telah lama menjabat sebagai seorang hakim.
 - 2) Hakim yang menjadi ketua majelis dalam persidangan di Pengadilan Agama Krui yang menanggapi dan memutus perkara cerai talak dengan *verstek*.

²³ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, (Malang : Kalimasahada Press, 1996), h. 6

²⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kumulatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 122

²⁵ Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), h. 39

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah pengumpulan data, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁶ Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu hasil dan kesimpulan yang akan didapat pun akan menjadi rancu apabila pengumpulan data dilakukan tidak dengan benar.

Pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Tujuan dari langkah pengumpulan data adalah demi mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian pun tidak akan diragukan kebenarannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/*interview*

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban).²⁷ Metode ini penulis gunakan dengan tujuan agar mendapatkan data atau informasi mengenai bagaimana penerapan dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan beban kewajiban kepada suami melalui *hakex officio*

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang hakim ketua/ketua majelis dan 1 orang panitera yaitu :

- 1) Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si
- 2) Muhammad Idris, S.Ag
- 3) Supriyanto, S.Ag., M.Si
- 4) Drs. Riduansyah

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis

²⁶ Sugiono, *Metode penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h.401

²⁷ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

besar tentang hal-hal yang ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti.²⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, laporan dan sebagainya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan merupakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dokumentasi yang dimaksud berupa surat-surat, gambar, atau catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Pada penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan penulis yaitu dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu arsip data, data laporan tahunan, putusan-putusan perkara cerai talak tahun 2016-2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Krui.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui tahap-tahap identifikasi sumber data, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan untuk mempermudah pemahaman, maka data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya.²⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan editing terhadap catatan-catatan hasil dari wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Krui.

b. Pengelompokan data (*Classifying*)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Krui dan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1994), h. 230-231

²⁹ Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.70

data yang diperoleh melalui dokumentasi, maupun yang lainnya. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁰ Dalam penelitian ini setelah penulis mendapatkan informasi dari hakim Pengadilan Agama Krui maka penulis melakukan pengecekan ulang hasil wawancara dengan *voice recorder* yang penulis gunakan ketika melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan tahapan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih berupa fakta-fakta verbal atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.³¹ Setelah data diperoleh lalu dikumpulkan dan diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga memudahkan interpretasi data. Hasil analisis dan pembahasan tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan umum tentang penerapan hak *ex officio* oleh hakim Pengadilan Agama Krui dari semua putusan-putusan pengadilan terkait perkara cerai talak yang diputus *verstek*. Metode penelitian ini kualitatif dalam pembahasan ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis.

Pada penelitian ini penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dilapangan dari putusan-putusan yang dianalisis atau dari wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Krui. Kemudian penulis berusaha memecahkan persoalan-persoalan yang masih ada hubungannya dengan rumusan masalah dan menganalisa data-data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan teori yang sesuai dengan topik penelitian. Setelah menemukan penemuan maka akan menjawab rumusan masalah dan dari hasil penemuan tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan.

³⁰ Lexy J. Maleong, *Op. Cit*, ..., h. 3

³¹ E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), h. 34

I. Sitematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab yang dibagi dan diuraikan dalam sub-sub bab pembahasan yang saling terkait dalam satu kesatuan logika pemikiran dengan perincian yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan, yang memaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadi pokok bahasan masalah yang mana pokok masalah ini menjadi titik awal dalam pelaksanaan penulisan tesis ini. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II menguraikan tentang tinjauan umum perceraian, hak anak dan mantan istri setelah perceraian, tinjauan umum tentang hakim, putusan verstek dan pertimbangan hakim serta terakhir pembahasan mengenai hak *ex officio* hakim yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya.

BAB III, membahas tentang hasil dari penelitian yang meliputi profil Pengadilan Agama Krui, statistik perkara yang diterima di Pengadilan Agama Krui, data hasil penelitian serta penyajian contoh kasus serta data hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Krui.

BAB IV, mengulas tentang analisis terhadap beberapa sampel putusan hakim di Pengadilan Agama Krui, bagaimana tingkat pelaksanaan dan penerapan hak *ex officio* dikalangan hakim-hakim Pengadilan Agama Krui sebagai wujud putusan yang berkeadilan bagi anak dan mantan istri yang diceraikan, apa saja alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum seorang hakim dalam memutuskan memberikan pembebanan kepada suami dalam perkara cerai talak yang diputus tanpa kehadiran termohon dari awal hingga pembacaan putusan dengan menggunakan hak *ex officio*nya serta yang terakhir analisis terhadap alasan seorang hakim menggunakan atau tidak menggunakan hak *ex officio*nya dalam memberikan putusan.

BAB V, berisikan penutup yang memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis sehingga dapat menyajikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat masukan-masukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perpisahan, kata “bercerai” itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”.³²

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak, yang akar kata dari *thalak* adalah *al ithlaq* yang berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. Menurut Zainuddin al-Malibari secara bahasa talak atau perceraian dalam hukum Islam berasal dari kata *hallul qaid* yakni “melepaskan ikatan” sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut kemudian.³³

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami. Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Beberapa rumusan mengenai definisi talak menurut fuqaha diantaranya :

- a. Imam Syafi’i mengartikan: Talak pada syara’ adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan seumpamanya.
- b. Imam Hanafi mengartikan : Talak pada syara’ adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak *ba’in*) atau dalam satu waktu (dengan talak *raj’i*) dengan menggunakan lafaz tertentu.
- c. Imam Maliki mengartikan: Talak pada syara’ adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.
- d. Imam Hambali mengartikan: Talak pada syara’ adalah melepaskan ikatan pernikahan.

³² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), h. 200

³³ Zainudin al-Malibari, *Fathul Mu’in*, Alih Bahasa, Moch Muhtar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 1346

Perceraian menurut KUHAP pasal 207 dapat diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Dalam Undang-undang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai pengertian perceraian secara khusus. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Secara yuridis perceraian berarti salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami istri.³⁴

Defenisi atau pengertian dari perceraian menurut beberapa orang sarjana diantaranya :

- a. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³⁵
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah pemisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.³⁶
- c. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁷

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.³⁸

³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 215

³⁵ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007), h.53

³⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Saefuddin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung : Alumni, 1986), h. 109

³⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1985), h. 23

³⁸ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007), h. 17

Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain. Sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, namun cukup dengan mempersukar/mempersulit proses suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.³⁹

2. Jenis-jenis Perceraian

a. Menurut Perspektif Hukum Positif

Jika sebuah ikatan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan yang ada adalah kecenderungan terjadinya perselisihan yang terus menerus dan sulit kemungkinan untuk berdamai (rukun dan harmonis), maka diantara suami atau istri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan yang berujung pada putusnya sebuah ikatan perkawinan.

Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia dikenal 2 (dua) jenis perceraian apabila ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama yaitu :

1) Cerai Talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.⁴⁰ Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, suami yang menikah secara Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

³⁹ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2010), h. 89

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 201

2) Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36 Jo. pasal 73 sampai dengan pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.⁴¹

b. Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam perceraian dikenal dengan talak, jenis-jenis perceraian atautalak jika ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu ucapan cerai itu diucapkan oleh suami, ada 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Talak *sunni*, yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya dengan satu kali talak dan istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa suci itu belum pernah dicampuri (melakukan hubungan intim). Talak ini adalah talak yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.⁴² Talak yang disyariatkan dalam Islam adalah satu kali, kemudian dilakukan rujuk jika suami dan istri tersebut ingin kembali. Kemudian ditalak untuk kedua kalinya lalu rujuk lagi. Setelah itu jika seorang suami ingin menceraikan istrinya setelah rujuk yang kedua kalinya maka terdapat pilihan antara bersama kembali atau berpisah dengan cara yang baik.⁴³

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah (2) ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ... ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..”

- 2) Talak *bid'i*, yaitutalak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang mana keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa

⁴¹ Ahmad, Rofiq, *Op. Cit*, ..., h. 296

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terj. Fikih Sunnah 4, (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 32

⁴³ *Ibid*

suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.⁴⁴ Atau suami yang menalak istrinya dengan tiga kali talak dalam satu ucapan atau mentalak tiga kali secara terpisah namun dalam satu tempat yang sama. Talak seperti ini adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Para ulama sepakat bahwa talak*bid'i* diharamkan, bagi yang melakukannya maka ia berdosa.⁴⁵

Jenis perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya kata-kata talak yang digunakan suami sebagai ucapan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Talak*sharih*, ialah talak yang diucapkan dengan bahasa yang jelas maknanya tentang perceraian. Misalnya : aku talak engkau, hai orang yang tertalak dan engkau tertalak.⁴⁶
- b) Talak*kinayat*, ialah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau dengan melalui sindiran.⁴⁷ Misalnya : engkau bebas, pulanglah ke orangtuamu, pergilah, dan lain-lain.

Sedangkan perceraian jika ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya atau dari segi boleh tidaknya rujuk (kembali) dibagi menjadi 2 (dua):

- 1) Talak *raj'i*, yaitu talak dimana suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa *iddah*. Talak ini dapat berupa talak satu atau talak dua yang tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Dalam masa *iddah* untuk talak *raj'i* suami istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia dan tidak boleh seorang suami menikah dengan saudara perempuan dari istri yang diceraikannya sebelum habis masa *iddahnya*.⁴⁸

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 130

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Op. Cit....*, h. 34

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushroti wa Ahkaamuhaa fii Tasyriihi al-Islam*. Terj. Fiqh Munakahat, (Jakarta : Amzah), h. 265

⁴⁷ Al Hamdani, *Op. Cit....*, h. 211

⁴⁸ Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fil Islam*. Terj. Fiqh Keluarga, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 336

- 2) Talak *ba'in*, yaitu talak yang memutuskan, atau talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan akad perkawinan baru walaupun dalam masa *iddah*, seperti talak yang belum disenggamai.⁴⁹

Talak *ba'in* juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Talak *ba'in sughra*

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad perkawinan baru. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling mewarisinya jika salah satu dari keduanya meninggal dunia baik sebelum atau setelah masa *iddah* berakhir. Dengan talak *ba'in*, *sughra* istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya. Sisa mahar yang belum diberikan suami kepada istri kapanpun selama suami belum meninggal dunia.⁵⁰

b) Talak *ba'in kubra*

Talak yang berakibat hilangnya hak mantan suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa *iddah* maupun sesudah masa *iddah*nya habis. Seorang suami yang mentalak *ba'in kubra* istrinya boleh menikahi istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

- (1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain.
- (2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
- (3) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
- (4) Telah habis masa *iddah*nya.⁵¹

Ada lagi beberapa bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam Islam selain yang disebabkan karena kematian atautalak diantara *khulu'*, *zhihar*, *ila'*, *li'an*, dan *fasakh*. Pengertian masing-masingnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 198

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, *Op. Cit.*..., h. 53

⁵¹ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*..., h. 199

- 1) *Khulu'* secara bahasa berarti mencabut, dan menurut istilah *khulu'* adalah talak perpisahan antara suami istri dengan pemberian *iwadh* (tebusan) oleh pihak istri dan dilakukan oleh lafadz talak atau *khulu'*. Contohnya: Suami berkata: aku menalakmu atau meng*khulu'*mu dengan tebusan sekian harta. Lalu istri menerima, baik lafaz talak tersebut *sharih* maupun *kinayat*.⁵²
- 2) *Zhihar* secara bahasa berarti punggung. Sedangkan menurut istilah *zhihar* berarti suatu ungkapan suami kepada istrinya, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku”, dengan maksud dia mengharamkan istrinya bagi dirinya. *Zhihar* ini merupakan talak yang berlaku di masyarakat jahiliyah terdahulu, kemudian diharamkan oleh Islam. Allah sendiri memerintahkan kepada suami yang men*zhihar* istrinya untuk membayar kafarat sehingga *zhihar* yang dilakukan itu tidak sampai terjadi talak.⁵³
- 3) *Ila'* adalah seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya secara mutlak, atau selama lebih dari empat bulan. Hal ini dimaksud untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, lebih dari itu ia juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian dan tidak memberikan hak-haknya.⁵⁴
- 4) *Li'an* secara bahasa berarti saling melaknat, sedangkan menurut istilah berarti “Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina”, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah terlebih dahulu memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya.⁵⁵
- 5) *Fasakh* yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syari'at, juga perbuatan dilarang atau diharamkan oleh agama. Secara umum *fasakh* berarti batalnya perkawinan yaitu rusak atau

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Op. Cit....*, h. 227

⁵³ Hasan Ayyub, *Fiqhu al-Ushroti al-Muslimah*, Terj. Fikih Keluarga, (Jakarta : Pustaka alKausar, 2008), h.379

⁵⁴ Ali Yusuf as-Sabki, *Op. Cit....*, h. 359

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh Op. Cit....*, h. 138-139

tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat atau salah satu rukun, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁵⁶

Seluruh ulama sepakat bahwa ikatan perkawinan dapat diputuskan dengan *fasakh*, tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasan-alasan yang bisa dipergunakan untuk minta *fasakh*. Secara garis besar ada 6 (enam) hal yang dapat dijadikan alasan oleh seorang istri untuk meminta *fasakh* yaitu:

- a) Suami sakit gila.
- b) Suami menderita penyakit menular yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya.
- c) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuannya untuk berhubungan kelamin.
- d) Suami miskin atau jatuh miskin sehingga tidak mampu untuk memenuhi memberikan kewajiban nafkah terhadap istrinya.
- e) Istri merasa tertipu baik mengenai nasab, atau keturunan suami, kekayaan atau kedudukan suami.
- f) Suami mafqud atau hilang tanpa adanya keterangan yang jelas dalam jangka waktu yang lama minimal empat tahun.⁵⁷

3. Syarat-syarat dan Alasan Mengajukan Perceraian

Dimata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, warisan, serta pembagian harta gono gini.⁵⁸

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit....*, h. 141

⁵⁷ Ahmad Azhar Baasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press), h. 86

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Op. Cit....*, h. 21

Dalam Undang-undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian tidak membolehkan dilakukan dengan mufakat antara suami dan istri saja namun harus ada alasan yang sah yang dapat diterima. Secara garis besar alasan-alasan ini dapat dikelompokkan menjadi 4(empat) macam :

- a. Zina.
- b. Ditinggalkan dengan sengaja.
- c. Penghukuman yang melebihi 5 (lima) tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara rinci menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian di Pengadilan yaitu:

1. Salah satu pihak, suami atau istri, berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.
2. Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa mendapat izin dari pihak lain. Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hampir sama dengan poin 2, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan

perceraian tersebut. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain. Poin ini menitikberatkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian. Dalam hal ini, harus benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang bisa membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tenteram, dan nyaman, apalagi, bila pertengkaran tersebut tidak dapat dielakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.⁵⁹

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulang kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 dengan rumusan yang sama namun menambahkan dua ayat lagi yang dikhususkan untuk orang Islam yaitu :

7. Suami melanggar *taklik talak*
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

⁵⁹ Penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hukum Islam tidak memperinci secara limitatif faktor-faktor untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri juga dapat memintadicerai. Hanya dalam hal *siqhat* talak dikenal adanya beberapa alasan yang dengan sendirinya talak suami jatuh, yakni:

- a. Apabila suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- b. Apabila suami tidak memberikan nafkah wajib selama 3 (tiga) bulan atau lebih.
- c. Apabila suami menggantung/membiarkan istri, suatu kata kiasan yang berarti suami tidak memperlakukan istri sebagai seorang istri, tetapi juga tidak menceraikannya selama 6 (enam) bulan.
- d. Apabila suami menyakiti jasmani seperti memukul istri sampai berbekas.

4. Tata Cara Mengajukan Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan

Hal terpenting yang harus diperhatikan sebelum mengajukan gugatan perceraian adalah terlebih dahulu melihat pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan berdasarkan kompetensi absolutnya (Peradilan Umum atau Peradilan Agama). Apabila pernikahan dilakukan menurut tata cara agama Islam maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama dan untuk yang beragama non Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah domisili para pihak yang berperkara. Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan bahwa gugatan dalam tingkat pertama harus dimasukkan (diajukan) ke Pengadilan di daerah hukum dimana pihak lawan bertempat tinggal.⁶⁰ Permohonan cerai yang diajukan oleh istri maka permohonan perceraian diajukan di Pengadilan Agama tempat domisili istri berada. Adapun permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengajukan permohonan

⁶⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan, Op. Cit*, h. 203

kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya seperti dimaksud dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu:

- a. Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- b. Apabila termohon bertempat tinggal diluar negeri maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.
- c. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri permohonan diajukan kepada Pengadilan yang meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Tata cara pengajuan permohonan/gugatan perceraian umumnya ditempuh melalui sejumlah tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian secara lisan atau tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
2. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suamiistri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian yang diajukan. Namun sebelumnya, Pengadilan harus mengupayakan jalan perdamaian.
3. Pemanggilan para pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang.
4. Proses persidangan dimulai dari pembacaan gugatan sampai dengan putusan.
5. Tahap eksekusi atau pelaksanaan dari putusan yang telah ditetapkan.

Tata cara mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan terdapat dalam pasal 39 dan 40 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan:

Pasal 39

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

- c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Kompilasi Hukum Islam pasal 129 sampai dengan pasal 131 memuat tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan jika suami dan istri akan bercerai, antara lain:

- 1) Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
- 2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- 3) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 4) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 5) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 6) Bila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin talak baginya

mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh.

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi mantan suami dan istri, rangkap pertama dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal tempat diadakannya pencatatan pernikahan, rangkap kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan rangkap keempat disimpan Pengadilan Agama.

Sebelum ke Pengadilan Agama, sebaiknya pemohon terlebih dahulu menyiapkan surat-surat atau dokumen penting yang terkait dengan kasus perceraian, seperti buku nikah asli, akta lahir anak, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga dan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan perceraian beserta akibatnya.⁶¹ Apabila buku nikah asli hilang maka dapat mempersiapkan kutipan buku nikah asli dari Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk KTP jika hilang dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pemohon.

Selain itu untuk mendukung gugatan perceraian dan untuk kebutuhan dalam proses persidangan, para pihak yang berperkara harus menyiapkan surat-surat dan saksi-saksi yang akan dijadikan alat bukti untuk menguatkan gugatan seperti :

- a. Surat bukti kepemilikan harta jika berkaitan dengan harta gono gini, misalnya BPKB, sertifikat rumah, dst.
- b. Surat visum dokter atau yang surat-surat lainnya yang diperlukan. Segala dokumen yang akan dijadikan alat bukti dalam persidangan hendaknya harus difotokopi terlebih dahulu dan kemudian diberi meterai seharga Rp. 6.000 dan dilegalisir di kantor pos setempat, setiap jenis surat, diberi satu meterai.
- c. Mempersiapkan saksi-saksi yang akan diajukan ke persidangan yang jumlahnya paling sedikit 2 orang. Saksi boleh berasal dari keluarga,

⁶¹ Budi Susilo, *Op. Cit....*, h. 27

tetangga, teman atau orang yang tinggal yang mengetahui (mendengar dan melihat) secara langsung peristiwa terkait dengan gugatan/permohonan perceraian. Saksi haruslah orang yang sudah dewasa (sudah 18 tahun atau sudah menikah) Saksi-saksi harus dihadirkan untuk diperiksa oleh majelis hakim pada sidang berikutnya yaitu saat sidang pembuktian.

B. Hak Anak dan Mantan Istri Setelah Perceraian

Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia maupun yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesama.⁶² Menurut L. J Van Apel Doom sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T Kansil mendefenisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.⁶³

Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan, ketika ada hak, maka disana ada kewajiban, begitu pula sebaliknya. Pengertiannya dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. antara hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri dalam pemenuhannya haruslah seimbang. Sama halnya dengan hak dan kewajiban orang tua kepada anak dan juga sebaliknya harus dapat terpenuhi agar tujuan dari sebuah perkawinan seperti yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan dapat terwujud.⁶⁴

⁶² Zainuddin Ali, *Filosofi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 27

⁶³ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 20

⁶⁴ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Kehidupan rumah tangga itu didasari atas sikap saling mencintai, menyayangi, kesetiaan, ketulusan dan pengertian. Hal itu tidak akan pernah terwujud kecuali jika, suami istri saling menunaikan kewajiban masing-masing dan saling bekerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Dalam syariat Islam, telah mewajibkan seorang suami agar memenuhi semua hak istrinya dan menganggap seorang suami sebagai orang yang *dhalim* jika tidak memenuhi hak istrinya dengan sempurna. Disisi lain, syariat Islam juga akan memberi jaminan kehidupan yang tenteram jika dia menunaikan hak-hak istri sesuai dengan perintah Allah SWT.

1. Hak Anak

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh anak guna mempertahankan keturunan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Kahfi (18) ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Anak adalah titipan dari Allah kepada orang tua untuk dirawat. Sebagai titipan, orang tua berkewajiban untuk merawat anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua seharusnya memelihara dan mengasuh anak dengan baik sesuai dengan amanah yang diberikan Allah. Pemeliharaan anak dan pengasuhan yang baik akan mengantarkan anak untuk tumbuh dengan memiliki sifat-sifat yang baik.

Banyak orang yang salah mengartikan pengasuhan anak dengan memperlakukan anaknya sebagai hak milik yang bisa diperlakukan sesuka hati. Padahal, anak juga merupakan manusia yang memiliki perasaan dan keinginan yang perlu diperhatikan. Begitu pula orang tua, mereka mempunyai beberapa kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada anak. Beberapa kewajiban orang tua kepada anak jika ditinjau dari 2 (dua) sisi hukum yang berbeda yakni hukum positif dan hukum Islam dapat dijelaskan dibawah ini.

a. Hak-hak Anak Dalam Hukum Positif

1) Hak anak dalam kandungan

- a) Kesejahteraan jasmani, rohani dan sosial. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik selama masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- b) Hak untuk hidup dari aborsi. Anak mempunyai hak untuk hidup dan terhindar dari upaya-upaya yang dapat membahayakan selama masih dalam kandungan misalnya bahaya dari aborsi.

2) Hak anak sejak dilahirkan

Perlindungan hukum terhadap anak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan hak yang dimiliki seorang anak semenjak ia dilahirkan adalah :

- a) Hak untuk identitas diri berupa nama, asal-usul, tempat lahir, jenis kelamin dan status kewarganegaraan yang dibuktikan dengan diperolehnya akte kelahiran.
- b) Hak untuk tumbuh dan berkembang misalnya, hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial.
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, mental maupun seksual.
- d) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- e) Hak untuk mengetahui siapa kedua orangtuanya.
- f) Hak untuk melangsungkan pernikahan.

b. Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam

Dalam Islam dikenal 5 (lima) macam hak asasi yang dikenal dengan *maqasid al-shari'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).

1) Hak anak atas pemeliharaan agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan agama bagi seorang anak sangat diperhatikan oleh Islam, hal ini ditunjukkan dari perintah Rasulullah untuk mencari calon suami atau istri yang baik yang mengutamakan agama dan ketakwaannya kepada Allah SWT dibandingkan harta dan fisik semata. Hal ini dimaksud agar dari pernikahan tersebut terlahir anak-anak yang berakhlak mulia dan rumah tangga yang bahagia.⁶⁵ Agama yang dianut seorang anak akan mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

*“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.”*⁶⁶

2) Hak anak atas pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan/jiwa anak secara otomatis melekat dan menjadi tanggung jawab penuh kedua orangtuanya agar anak dapat tumbuh secara normal. Islam dalam menjaga dan menjamin kesehatan seorang anak dilakukan semenjak berada dalam kandungan hingga anak tersebut lahir ke dunia. Bentuk perhatian Islam diwujudkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 184 yang menjelaskan bahwa seorang ibu hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan dapat mengganti puasanya dihari lain apabila ia merasa akan membahayakan kesehatan diri dan bayinya.

... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ

“Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain”.

Selain itu ketika seorang anak telah lahir maka tanggung jawab kedua orangtua yang dapat dilakukan agar anak-anaknya dapat

⁶⁵ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 182

⁶⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol 1, (Bukhor: Maktabah Ashriyyah, 1996), h. 410

tumbuh sehat antara lain *radha'ah* (penyusuan) sampai dengan usia 2 tahun yang ditentukan dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ...﴾ (٢٣٣)

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”

Disamping penyusuan upaya pemeliharaan kesehatan anak yang dianjurkan Islam adalah *khitan* (memotong kulit yang menutup kelamin). *Khitan* selain sebagai bentuk menjaga kesehatan juga menjadi media kesempurnaan agama yang menjadi pembeda antara kaum muslimin dengan pengikut agama lainnya.

3) Hak anak atas pemeliharaan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*)

Kehormatan seorang anak dapat diwujudkan dengan bentuk pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari kedua orang tua kandungnya. Islam sangat melarang hal-hal yang dapat menghilangkan asal-usul keturunannya yang ditegaskan Allah SWT dalam surat al-Ahzab (33) ayat 5 :

﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ...﴾ (٣٣)

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka....”

Berdasarkan ayat di atas ada 3 (tiga) kesimpulan yang dapat diambil yakni *pertama*, untuk menjadi hak dan martabat seorang anak, nama bapak kandung anak tersebut tidak boleh diganti atau dihilangkan walaupun anak tersebut merupakan anak angkat. *Kedua*, apabila seorang anak tidak berbapak atau tidak jelas keturunannya maka hal ini akan menimbulkan masalah baru dalam perkembangan dan pertumbuhannya kelak. *Ketiga*, untuk mengetahui silsilah keturunan agar tidak melanggar aturan-aturan dalam al-Qur'an yang telah ditetapkan dalam kaitannya dengan wanita-wanita yang haram dinikahi.

4) Hak anak atas pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*)

Pemeliharaan hak anak atas akal diberikan dalam bentuk penyelenggaraan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Hal ini penting sebagai upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia.⁶⁷ Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Mujadilah (58) ayat 11

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...

“...Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”

5) Hak anak atas pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*)

Dalam ajaran Islam jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak berada dan menjadi tanggung jawab seorang ayah. Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban ekonomi seorang anak, Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Dan sebaliknya jika ia melalaikan nafkah anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia dianjar dengan dosa yang sangat besar.

Kewajiban orang tua kepada anak tidak hanya terbatas ketika masih berada dalam satu keluarga utuh, namun kewajiban orang tua juga harus tetap dilaksanakan meskipun kedua orangtuanya telah berpisah karena terjadinya perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua kepada anak:

Pasal 45 ayat (1)

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Pasal 45 ayat (2)

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

⁶⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat : KPAI, 2006), h.

Penjelasan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan di atas dapat diartikan bahwa hak anak sebaik-baiknya serta hak tersebut masih melekat pada seorang anak walaupun orang tua mereka telah berpisah karena perceraian. Kewajiban seorang orang tua kepada anak-anaknya secara garis besar dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan
- b. Memberikan pendidikan
- c. Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya 18 tahun ke bawah dan belum pernah kawin
- d. Memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut.⁶⁸

2. Hak Mantan Istri

Pada dasarnya sebuah perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Hal inilah yang sebenarnya yang dikehendaki dalam Islam. Namun dalam keadaan tertentu sejalan dengan berjalannya hidup rumah tangga yang disebabkan bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak demi mewujudkan tujuan dari pernikahan.

Putusnya perkawinan adalah sebuah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan sebuah perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup bersama-sama sebagai suami istri. Putusnya ikatan sebuah perkawinan disebabkan 4 (empat) kemungkinan :

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui meninggalnya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan

⁶⁸ Dedi Junaidi, *Op. Cit*, h. 295

disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.⁶⁹

Seorang suami yang akan menceraikan istrinya mempunyai beberapa kewajiban tidak hanya kepada anaknya namun juga terhadap mantan istrinya. Beberapa kewajiban terhadap mantan istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah berupa:

- a. Keharusan memberikan *mut'ah* yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi dapat berupa uang ataupun benda, adapun besarnya pemberian *mut'ah* ini disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mut'ah* itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami seperti talak.⁷⁰ Dasar wajibnya pemberian *mut'ah* adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 (tiga) pasal yang membicarakan tentang *mut'ah* ini, yaitu dalam pasal 158, 159, dan pasal 160, yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istrinya wajib memberi *mut'ah* dengan syarat:

1. Belum ditetapkan maharnya bagi istri yang *qobla dukhul*.
2. Perceraian itu atas kehendak suami

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Op. Cit....*, h. 197

⁷⁰ *Ibid*, h. 301

Tetapi pemberian *mut'ah* ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya *mut'ah* juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁷¹

- b. Keharusan memberikan nafkah *iddah*, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Allah SWT berfirman dalam surat at-Talaq (65) ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَرِّضْ لَهُوَ أُخْرَى ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Di dalam Buku II Pedoman Teknis Pengadilan Agama ditentukan bahwa apabila gugatan cerai dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah*.⁷²

- c. Kewajiban melunasi mahar yang terhutang seluruhnya apabila ketika akad nikah mahar belum dibayarkan dan dia telah bergaul dengan istrinya, dan apabila istri belum digauli maka mahar yang harus dibayarkan adalah setengahnya. Mahar adalah suatu kewajiban atas

⁷¹ Abu Malik Kamal binAs-Sayid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h.342

⁷² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), h. 154

suami yang merupakan utang apabila belum dilunasi (diberikan) kecuali pihak istri telah mengikhlaskan dan merelakannya.

- d. Kewajiban memberikan biaya nafkah (*hadhanah*) untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan kesehatan anak-anaknya itu sampai dengan anak tersebut *baligh* lagi berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Amir Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Adapun hak-hak mereka itu adalah sebagai berikut:

- a. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak *raj'i*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum diceraikan, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.
- b. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak *bain*, baik *bain sughro* atau *bain kubra*, dia berhak atas tempat tinggal bila ia tidak dalam keadaan hamil. Apalagi ia dalam keadaan hamil, selain mendapatkan tempat tinggal juga mendapatkan nafkah selama masa hamilnya itu. Inilah pendapat jumhur ulama.
- c. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal yang disepakati ialah bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam masa *iddah*, karena ia harus menjalani masa *iddah* di rumah suaminya dan tidak dapat menikah selama masa itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyamakannya dengan cerai dalam bentuk talak *bain*.⁷³

⁷³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqih, Op. Cit.*..., h.144

Hukum Islam mengatur wanita yang ditalak suaminya, ia baru boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain setelah masa *iddahnya* habis. Dengan terjadinya perkawinan baru ini, hubungan mantan suami dengan istri tersebut telah betul-betul putus, sehingga dengan sendirinya istri tidak berhak lagi menerima nafkah dari mantan suaminya, demikian sebaliknya suami tidak berkewajiban lagi memberi nafkah pada mantan istrinya.⁷⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Hakim, Putusan Verstek dan Pertimbangan Hukum

1. Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim dalam bahasa arab berasal dari kata *حاكم - يحكم - حاكم* yang artinya sama dengan *qadhi* yang berasal dari kata *قاضي - يقضي - قاض* yang artinya memutus. Menurut *syar'a* hakim artinya orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.⁷⁵ Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat *qadhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.

Kata hakim dalam perspektif ushul fiqh secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah fiqh kata hakim juga berarti sebagai orang yang memutuskan hukum di Pengadilan hal ini sama dengan *qadhi*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hakim berarti orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau

⁷⁴ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*..., h. 408

⁷⁵ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), h. 29

mahkamah).⁷⁶Selain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hakim juga terdapat dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”⁷⁷

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 ayat (9) KUHP), ia tidak boleh menolak

⁷⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 346

⁷⁷ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu hakim dianggap mengetahui hukum. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau sanksi yang akan diberikan, hakim wajib mempertimbangkan pula niat dan sikap dari pihak penggugat/pemohon.

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, (pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat/pemohon dan tergugat/termohon atau terdakwa dan saksi (pasal 153 KUHP). Dalam prakteknya dipersidangan ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, hal ini diperbolehkan jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

c. Tugas Hakim

Seorang hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenang dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dijelaskan sebagai berikut :⁷⁸

1) Membantu pencari keadilan. (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009)

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum mempunyai tugas untuk membantu para pencari keadilan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan. Bentuk bantuan yang diberikan adalah berupa pelayanan prima kepada pihak-

⁷⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet ke-6, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 30

pihak yang berperkara misalnya memberi penjelasan tentang kelengkapan dokumen dan alat bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara, mengarahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan hak-haknya, membantu mendamaikan pihak yang bersengketa dan lain sebagainya.

- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan. (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009)

Hakim sebagai pejabat yang ditunjuk oleh negara wajib mengatasi segala hambatan, rintangan dan permasalahan yang ada untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan baik berupa teknis maupun yuridis. Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan dan ijtihad hakim sesuai dengan kewenangannya, sedangkan hambatan yuridis maka hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara dan kode etik hakim agar tidak menghambat obyektifitas seorang hakim dalam mewujudkan keadilan. Misalnya hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang dalam hal perkara yang ditangani diluar kompeten absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama.

- 3) Mendamaikan pihak– pihak yang bersengketa. (Pasal 30 HIR/ Pasal 154 RBg)

Mahkamah Agung mengharapkan para hakim agar serius untuk mengadakan perdamaian diantara para pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perdata, bukan hanya sekedar menawarkan dan sekedar formalitas saja. Ketentuan tersebut dituangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Seorang hakim yang menyidangkan perkara harus aktif dan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian, bagaimanapun perdamaian adalah lebih baik dari pada putusan yang dipaksakan.

- 4) Memimpin persidangan. (Pasal 11 ayat (1) UU No. 48/2009)

Kaitannya dengan persidangan tugas seorang hakim adalah menetapkan hari sidang, memerintahkan pemanggilan para pihak yang berperkara, mengatur mekanisme pelaksanaan sidang, melaksanakan persidangan

dengan sederhana dan tidak mempersulit para pihak, melakukan pembuktian dan mengakhiri sengketa melalui putusannya.

5) Memeriksa dan mengadili perkara. (Pasal 25 ayat (3) UU No. 48/2009)

Pelaksanaan tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara harus didokumentasikan dan dicatat secara lengkap sesuai dengan kronologis perjalanan perkara yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Sidang dan Putusan yang meliputi duduknya perkara, pertimbangan hukumnya dan amar yang memuat hasil akhir dari penyelesaian sebuah perkara.

6) Meminutir berkas perkara. (Pasal 184 (32), Pasal 186 (2) HIR)

Minutaring atau minutasi berkas adalah suatu tindakan yang menjadikan dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat atau petugas Pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan.⁷⁹

7) Mengawasi pelaksanaan putusan. (Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 /2009)

Hasil akhir dari sebuah perkara adalah adanya sebuah putusan. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁸⁰ Pelaksanaan hasil putusan dilakukan oleh panitera dan jurusita yang dipimpin oleh ketua Pengadilan. Hakim wajib mengawasi pelaksanaan putusan tersebut agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009)

Hakim wajib memberikan pengayoman dan rasa aman kepada para pihak yang mencari keadilan. Pengadilan Agama bukan hanya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar, tetapi juga harus bisa berperan sebagai lembaga sosial yang

⁷⁹ *Ibid*, h. 33

⁸⁰ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 126

dapat menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang berkaitan dengan kewenangannya dengan cara yang tidak menyebabkan rusaknya rohani dan sosial kepada semua pencari keadilan.

9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009)

Dalam hal ini ketika berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang sebenarnya.

10) Mengawasi penasehat hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dinyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima hukum (orang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu yang menghadapi masalah hukum). Merujuk pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010 pasal 25 jasa bantuan hukum tersebut berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis serta penyediaan advokat/penasehat hukum pendamping. Disini tugas seorang hakim adalah wajib mengawasi penasehat hukum yang berpraktek di Pengadilan Agama.⁸¹ Hal ini dimaksud sebagai bagian untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan.

⁸¹ A. Mukti Arto, *Op. Cit*, h. 35

2. Putusan *Verstek*

a. Pengertian putusan *verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat/termohon. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan dimana fungsinya sebagai jalan tengah bagi dua pihak yang bersengketa mengenai hak-hak mereka, dengan harapan tercapainya suatu solusi yang dapat menjadi penyelesaian masalah diantara mereka dengan cara yang adil dan damai. Karena tugas mendamaikan adalah salah satu tugas dari Pengadilan sesuai dengan asasnya dan Pengadilan juga mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara dengan jalan melaksanakan persidangan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang bersengketa, meskipun ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam persidangan.

Kedudukan hakim dalam perkara perdata berperan sebagai penengah diantara pihak yang berperkara sehingga pengadilan dapat memeriksa dan meneliti pihak-pihak yang berperkara, oleh karena itu dalam perkara perdata pihak-pihak pada prinsipnya diwajibkan hadir dimuka persidangan. Tentang hal inipun dikenal dalam hukum Islam dengan kaidah :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

“Barang siapa dipanggil oleh hakim (muslim) dan ia tidak menjawab (menghadiri) panggilan tersebut, maka ia orang yang dhalim, dan tidak ada hak baginya”

Maksud doktrin kaidah di atas bahwa panggilan oleh hakim dalam hal ini adalah lembaga peradilan kepada semua pihak baik sebagai pemohon maupun sebagai termohon, dan ternyata pihak yang dipanggil tersebut tidak menghadiri persidangan, maka pihak tersebut adalah dzalim dan hak hukumnya dalam persidangan, hilang.

Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun menurut hukum harus hadir. Namun sering terjadi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama seorang tergugat

atau termohon tidak hadir dimuka persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Ketentuan pasal 149 RBgayat (1) dijelaskan bahwa jika tergugat/termohon tidak hadir pada hari perkara akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun orang itu dipanggil secara patut, maka gugatan itu dapat diputus dengan tak hadir (*verstek*).

Penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa pengertian yang mendasar mengenai *verstek* apabila tergugat/termohon tidak hadir, padahal ia telah dipanggil secara sah, maka hakim dapat menjatuhkan dengan putusan *verstek*, atau menunda sidang untuk memanggil tergugat/termohon sekali lagi walaupun hal itu terjadi maka ketika putusan dijatuhkan pada hari sidang kedua tanpa hadirnya pihak tergugat/termohon, maka putusan tersebut tetap merupakan putusan *verstek*. Begitu juga jika hakim menunda untuk sidang yang ketiga dan memutusnya tanpa hadirnya tergugat/termohon maka putusan tersebut disebut putusan *verstek*.⁸²

b. Syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan *verstek*

Menurut hukum acara yang berlaku, tergugat/termohon yang telah dipanggil secara patut, tidak datang pada waktu yang ditentukan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka perkara tersebut diputus *verstek*, dan tergugat/termohon dianggap kalah. Putusan *verstek* tidak dapat diputus begitu saja hanya dengan alasan bahwa tergugat/termohon dipanggil dengan patut dan ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya. Untuk menjatuhkan putusan *verstek* harus dipenuhi beberapa syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam pasal 149 Rbg yang menentukan bahwa untuk menjatuhkan putusan *verstek* yang bersifat mengabulkan gugatan diharuskan adanya beberapa syarat sebagai berikut:

⁸² Tresna R. *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), h. 108-109

- 1) Tergugat/termohon atau para tergugat/termohon semuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- 2) Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
- 3) Ia atau mereka semuanya telah dipanggil dengan patut.
- 4) Petitum (gugatan) tidak melawan hak.
- 5) Petitum beralasan.

Syarat-syarat tersebut harus benar-benar diperiksa oleh pengadilan sebelum memutuskan perkara dengan putusan *verstek*. Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut diatas dapat mengakibatkan perkara ditolak atau tidak diterima. Namun sebelum pengadilan memutus dengan *verstek*, pengadilan dapat (tidak imperatif) memanggil sekali lagi tergugat/termohon.⁸³

c. Akibat Hukum Putusan *Verstek*

Kehadiran para pihak pada suatu persidangan merupakan hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum telah menyerahkan sepenuhnya kepada tergugat/termohon untuk mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya. Hakim dalam acara peradilan dapat menerapkan acara *verstek* jika syarat-syaratnya terpenuhi maka hakim secara langsung dapat memutus *verstek*. Tindakan tersebut dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*. Apabila hakim hendak memutus dengan *verstek* maka bentuk putusan yang dapat dijatuhkan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg dapat berupa mengabulkan gugatan penggugat/pemohon, pada prinsipnya hakim yang memutus secara *verstek* harus menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan pemohon. Namun tanggung jawab dari seorang hakim dalam penerapan acara *verstek* adalah berat, yakni tanpa melalui pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat pada sengketa. Maka dalam mengabulkan gugatan ada beberapa pendapat yaitu:

⁸³ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 105

- 1) Mengabulkan seluruh gugatan, maksudnya mengabulkan seluruh gugatan persis seperti apa yang dirinci dalam petitum gugatan.
- 2) Mengabulkan sebagian gugatan, maksudnya adalah ketika seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara dan salah satu pihak tidak hadir maka bukti yang diperoleh tidak sempurna maka apabila cukup alasan yang dapat dikabulkan hanya untuk sebagian, hakim boleh memutus dengan mengabulkan sebagian saja.

Setelah putusan tersebut dijatuhkan maka yang terjadi adalah eksekusi dari putusan tersebut, berdasarkan pasal 149 ayat (3) RBg yang mengatur kapan kekuatan eksekutorial melekat pada putusan *verstek*. beberapa batasan dalam melakukan eksekusi putusan *verstek* yaitu: ⁸⁴

1. Selama jangka waktu mengajukan upaya *verzet* belum dilampaui, dilarang menjalankan eksekusi *verstek*.
2. Jangka waktu larangan adalah 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek* kepada termohon.

Namun dalam keadaan yang sangat perlu maka putusan *verstek* dapat dijalankan meskipun tenggang waktu mengajukan perlawanan belum lewat, pengecualian ini diatur dalam pasal 149 ayat (3) RBg. Ketika tergugat/termohon mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* (*verzet*) maka :

- a) Mengakibatkan putusan ini mentah kembali, dan perkara diperiksa kembali dari keadaan semula sesuai dengan gugatan penggugat/pemohon.
- b) Dengan demikian perlawanan langsung meniadakan eksistensi putusan *verstek*, sampai dijatuhkan putusan *verzet*.
- c) Apabila putusan *verzet* menolak perlawanan maka eksistensi putusan *verstek* baru timbul kembali dengan sifat yang permanen. Tetapi sebaliknya apabila perlawanan dikabulkan, berakibat putusan *verstek* dibatalkan, sehingga eksistensinya mutlak ditiadakan. ⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*, h. 416

⁸⁵ *Ibid*, h. 416

Putusan *verstek* memang sangat merugikan kepentingan tergugat/termohon, karena tidak dapat melakukan pembelaan ketika putusan dijatuhkan. Tetapi kerugian itu diakibatkan karena sikap tergugat/termohon yang tidak mentaati tata tertib beracara pada sebuah peradilan. Jadi maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak untuk mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenang-wenangan.

3. Pertimbangan Hukum

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian, serta untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan. Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara perdata sangat terkait dengan konsep kebenaran formil yang dianut dalam hukum acara perdata.

Kebenaran formil tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, tetapi cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut undang-undang. Penyelesaian perkara perdata yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran formil, mendapat perhatian dari para ahli hukum, karena terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Apabila hakim semata-mata hanya mencari kebenaran formil, sangat mungkin terjadi pihak yang sesungguhnya benar dapat dikalahkan perkaranya, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan.

Oleh sebab itu berbicara tentang pertimbangan hukum pasti berkaitan dengan proses pemeriksaan khususnya pembuktian di persidangan dan keyakinan hakim terhadap dalil-dalil gugatan.

a. Pembuktian

Pembuktian dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Sebuah pembuktian dalam persidangan membutuhkan kemampuan untuk merekonstruksi kejadian yang terjadi dimasa lalu untuk mendapatkan fakta-fakta hukum.

Ada berbagai macam definisi tentang pembuktian, menurut M. Yahya Harahap definisi pembuktian terbagi menjadi 2 (dua) arti pembuktian secara luas dan arti pembuktian secara sempit.

- 1) Arti pembuktian secara luas adalah kemampuan pemohon atau termohon dalam memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dengan kejadian-kejadian yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.
- 2) Sedangkan arti pembuktian secara sempit adalah pembuktian digunakan sepanjang masih ada hal-hal yang dibantah atau hal-hal yang masih disengketakan ataupun sepanjang masih adanya hal-hal yang diperselisihkan antara pihak-pihak yang berperkara.⁸⁶

Pengertian pembuktian menurut pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KUH Perdata yang berbunyi :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”⁸⁷

Dari Abdullah ibn Abbas, Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لويعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة على
المدعى واليمين على من أنكر

“Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu

⁸⁶ Ibid, h. 496

⁸⁷ KUH Perdata, Buku ke Empat Tentang Pembuktian dan Daluwarsa, Bab ke Satu, h 419

peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya". HR. Bukhari dan Muslim dengan sanad shahih.

Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin. Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan dipengadilan. Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian pada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi persengketaan.

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan pengadilan sesuai dengan pasal 163 HIR/pasal 283 RBg /pasal 1685 KUHAP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan sebab pembuktian tersebut menjadi cara dalam menyelesaikan persengketaan.
- 2) Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terikat dengan ruang dan waktu.
- 3) Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang di sengketakan, karena pembuktian itu tidak mengenai hak yang di sengketakan.
- 4) Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Dalam artian peristiwa atau kejadian tersebut menjadi salah satu rangkaian peristiwa atau kejadian.
- 5) Peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.

Sedangkan peristiwa yang tidak perlu dibuktikan dimuka pengadilan adalah sebagai berikut :

- 1) Peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, misalnya :
 - a) Dalam putusan *verstek*, adalah putusan yang diambil oleh hakim dikarenakan ketidak hadirannya pihak tergugat/termohon setelah dipanggil secara patut, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh pemohon harus dianggap benar.
 - b) Dalam hal mengakui gugatan penggugat/pemohon, dalam hal ini hakim tidak perlu mendapat pembuktian jika tergugat/termohon mengakui dan membenarkan gugatan dari penggugat/pemohon.
 - c) Telah dilaksanakan sumpah *decisoir*, sumpah *decisoir* adalah sumpah yang menentukan dan telah dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara, maka pembuktian selanjutnya tidak diperlukan lagi.
 - d) Dalam hal tergugat/termohon *reperte*, dalam hal ini pihak tergugat/termohon tidak mengakui dan tidak pula membenarkan gugatan pemohon, maka segala gugatan penggugat/pemohon secara sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian hal seperti ini tidak perlu diadakan pembuktian lagi.
- 2) Hakim secara *ex officio* dianggap telah mengetahui atau mengenal peristiwanya. Misalnya :
 - a) Peristiwa *otoir feiten*. Peristiwa ini bisa juga disebut dan dianggap sebagai pengetahuan umum. Maka apa-apa yang telah diketahui oleh masyarakat maupun hakim secara umum, tidak perlu di buktikan lagi.
 - b) Pengetahuan hakim sendiri. Dalam hal ini pengetahuan hakim digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Namun ketentuan ini bisa dianggap sebagai peristiwa *notoir feiten*, yang mana pengetahuan hakim berdasarkan hukum alam. Akan tetapi ketentuan ini tidak selamanya demikian, karena pada hal ini hakim bersandar pada hipotesis ilmu pengetahuan atau adat yang berlaku pada daerah setempat.

Dalam ilmu hukum acara perdata, untuk membuktikan suatu dalil tentang hak dan kewajiban dalam sengketa di pengadilan sudah diatur dalam pasal 164 HIR/ 284 RBg/ 1866 KUHAP, yaitu :⁸⁸

1) Alat bukti Surat/tertulis.

Dasar hukum yang digunakan untuk melandasi alat bukti yang berupa tulisan atau surat ini adalah pasal 164 HIR/284, 293, 294 ayat (2) dan 164 ayat (78) RBg/1867-1880, 1869, dan pasal 1874 KUHAP. Surat sebagai alat bukti tertulis terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Akta Autentik.

Pasal 165 HIR/285 RBg/1868 KUHAP menjelaskan, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat, yang berkuasa untuk membuat surat itu. Akta autentik dapat diartikan sebagai akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya.⁸⁹

Akta autentik harus memenuhi unsur-unsur :

- (1) Surat itu harus ditandatangani
- (2) Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau
- (3) Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.⁹⁰

b. Akta di Bawah Tangan.

Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan bukti bebas karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formil baru akan terjadi bila pihak-pihak yang bersangkutan

⁸⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), h. 133

⁸⁹ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h.465

⁹⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), h. 100

mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Apabila akta dibawah tangan dinyatakan palsu maka yang menggunakan akta dibawah tangan tersebut harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak palsu. Dalam undang-undang dan peraturan tersebut menjelaskan bahwa :

(1) Dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang surat ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum.

(2) Tanda tangan di surat di bawah tangan disamakan suatu cap jari yang dibuat di bawah surat itu dan disahkan oleh keterangan yang bertanggal dari seorang notaris atau pejabat umum lainnya, yang akan ditunjukkan dengan ordonansi. Keterangan itu harus menyatakan bahwa ia kenal orang yang membuat (cap jempol itu, atau, bahwa orang itu telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu telah dibacakan dengan terang kepada orang yang membuat cap jari itu, dan bahwa setelah itu cap jari itu dibuat di hadapan notaris atau pejabat umum dimaksud.

(3) Surat itu dibukukan oleh notaris atau pejabat umum itu.

(4) Keterangan dan hal membukukan itu buat menurut peraturan tentang itu, yang sudah atau akan ditetapkan dengan ordonansi.

Kekuatan yang dimiliki oleh alat bukti akta di bawah tangan yakni :

(a) Apabila tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut diakui kebenarannya oleh masing-masing pihak, maka akta tersebut disebut “akta dibawah tangan yang diakui”, yang memiliki kekuatan lahir, dan kekuatan material dan formal.

(b) Akta dibawah tangan yang diakui sama halnya dengan akta otentik dalam segi kekuatannya sebagai alat bukti tertulis.

Namun akta dibawah tangan ini tidak memiliki kekuatan bukti ke luar, sebagaimana yang dimiliki oleh akta otentik.

2) Alat bukti saksi-saksi.

Dasar yang digunakan untuk penggunaan alat bukti saksi dalam proses pembuktian di Pengadilan adalah pasal 169-172 HIR/306-309 RBg/1895, 1902-1912 KUHAP. Pengertian alat bukti saksi yang diuraikan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo bahwa keterangan saksi atau suatu kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Sehubungan dengan undang-undang yang telah disebutkan di atas, serta uraian dari pakar hukum, maka saksi yang di panggil dalam persidangan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (a) Kewajiban hadir dalam persidangan karena telah dipanggil secara patut menurut hukum sesuai dengan pasal 139, 140, 141 HIR,
- (b) Kewajiban untuk bersedia disumpah menurut agama yang dianutnya.
- (c) Kewajiban memberikan keterangan yang benar.

Pemeriksaan saksi yang tidak dapat hadir dalam persidangan karena sakit atau cacat badan, maka ketua majelis hakim mengirimkan anggota majelis hakim untuk hadir ke rumah saksi tersebut dengan disertai oleh panitera untuk mendengarkan keterangan saksi tanpa disumpah yang kemudian dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan yang selanjutnya dilaporkan kepada ketua majelis hakim.

Pemeriksaan saksi dalam persidangan dilakukan majelishakim sesuai dengan pasal 144 HIR/171 RBg dengan jalan

para saksi dipanggil ke dalam ruang sidang satu per satu, ditanyakan identitas, ditanyakan pula apa hubungan saksi dengan para pihak. Dan sebelum memberikan keterangan dipersidangan para saksi disumpah sesuai dengan agamanya, untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

3) Alat bukti persangkaan.

Pasal 173 HIR/310 RBg menerangkan petunjuk bagi hakim tentang tata cara mempergunakan alat bukti persangkaan, yaitu persangkaan-persangkaan hanya boleh dipertimbangkan oleh hakim ketika hakim hendak menjatuhkan putusannya jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan bersesuaian antara satu dengan lainnya.

4) Alat bukti pengakuan.

Dasar hukum yang melandasi alat bukti pengakuan dalam proses pembuktian di pengadilan diatur dalam pasal 174 HIR/311 RBg/1923-1928 KUHP. Kemudian dalam proses pengakuan terdapat klasifikasi tentang pengakuan-pengakuan yang diajukan oleh masing masing pihak yang berperkara yaitu :

- (a) Pengakuan murni pasal 176 HIR/ 313 RBg/ 1924 KUHP, yaitu pengakuan yang sepenuhnya membenarkan dalil yang diajukan pemohon. Dalam hal pengakuan ini bersifat mutlak dengan tidak ada ketentuan atau syarat apapun.
- (b) Pengakuan dengan kualifikasi, yaitu suatu pengakuan yang bersifat sesuai sebagaimana dalil yang diajukan oleh pemohon. Jadi pengakuan tersebut disertai dengan suatu sangkalan terhadap sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh pihak pemohon.
- (c) Pengakuan dengan klasula, yaitu pengakuan yang isinya sama dengan pernyataan pemohon. Akan tetapi ditambahi dengan suatu keterangan. Sehingga pengakuan tersebut bersifat

menentang dalil lawan atau melumpuhkan dalil lawan untuk menuntut.

5) Alat bukti sumpah.

Menurut Sudikno Mertokusumo sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmad yang diberikan atau diucapkan pada saat memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan yang tidak benar maka akan mendapatkan hukuman dari-Nya. Dasar hukum dari alat bukti sumpah ini adalah pada pasal 155-158, 177 HIR/182-185 RBg/1929-1945 KUHAP. Kemudian macam-macam alat bukti sumpah terbagi menjadi :

- a) Sumpah *Supletoir* sesuai pasal 155 HIR/183 RBg/1940 KUHAP, yaitu : Jika kebenaran gugatan atau jawaban tidak cukup terang, tetapi ada juga sedikit keterangan, dan sama sekali tidak ada jalan untuk dapat menguatkannya dengan alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan dapat menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim, dimana untuk mencapai putusan dalam perkara itu bergantung kepada sumpah itu.
- b) Sumpah *Decissoir* sesuai dengan pasal 156 HIR/183RBg/ 1930 KUHAP, yaitu : Walaupun tidak ada suatu keterangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban atas gugatan itu, maka salah satu pihak dapat meminta, supaya pihak yang lain bersumpah. Kalau perbuatan itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak yang tidak mau disuruh mengangkat sumpah dapat menolak sumpah itu kepada lawannya. Barang siapa disuruh bersumpah, tetapi tidak mau bersumpah sendiri atau menolak sumpah itu kepada lawannya, ataupun barang siapa menyuruh bersumpah tetapi sumpah itu dipulangkan kepadanya, dan tidak mau bersumpah maka ia harus dikalahkan. Sumpah itu tidak dapat diminta ditolak atau diterima oleh orang lain, hanya

oleh pihak itu sendiri atau oleh seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

- c) Sumpah *Taxatoir*, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat/pemohon untuk menentukan ganti rugi yang harus ditanggung oleh tergugat/termohon. Sumpah ini disebut juga sumpah penaksir, *aestimatoir*, atau *schattingseed* yang diatur dalam pasal 155 HIR/182 RBg/1940 KUHAP. Karena sumpah ini hanya di bebaskan kepada pihak penggugat/pemohon, maka penggugat/pemohon harus sudah bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa dirinya telah menanggung kerugian akibat perbuatan perbuatan tergugat/termohon.

Selain yang telah disebutkan diatas, ada pula alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan serta disebutkan undang-undang, yaitu

- (a) Pemeriksaan di tempat (pasal 153 HIR/180 RBg)
- (b) Keterangan ahli (pasal 154 HIR/181 RBg).

b. Keyakinan Hakim

Dalam membicarakan kebenaran formil, kajian selanjutnya adalah masalah apakah dalam pembuktian perkara perdata, selain adanya bukti-bukti yang ada, masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim atau tidak, atau dengan perkataan lain dalam memutuskan perkara perdata, apakah hakim diwajibkan untuk mencapai kebenaran materil atau kebenaran formil. Dalam pembuktian perkara perdata, yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil, yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau yang disengketakan.⁹¹ Sedangkan pencarian kebenaran materil terutama dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana dan administratif.

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta :Liberty, 1984), h.87

Menurut Mertokusumo,⁹² yang hendak dicari hakim dalam pembuktian perkara perdata adalah kebenaran formil yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau yang disengketakan.⁹³

Wahyuni mengemukakan bahwa keyakinan hakim dalam perkara perdata dapat saja ditarik atau dimasukkan dalam alat bukti persangkaan hakim. Persangkaan hakim ini dapat muncul dengan adanya bukti-bukti lain yang sudah terbukti lebih dulu, seperti keterangan dari para saksi dan bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan. Persangkaan seperti itu dapat saja diperoleh hakim dari keyakinannya dengan melihat bukti-bukti atau dengan menghubungkan fakta satu dengan fakta lain dalam persidangan.

Sementara itu, Gusti Made Lingga berpendapat bahwa keyakinan hakim dalam perkara perdata cukup dalam hati nuraninya saja, tidak perlu disebutkan secara lahir dalam putusan. Oleh karena itu sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus meyakini kebenaran putusan yang akan diambilnya. Bagaimana mungkin seorang hakim memutuskan suatu perkara tetapi tidak didasarkan pada keyakinan.

Untuk mencapai kebenaran ini, hakim tidak boleh bersikap *lijdelijke* (menunggu dan menyerah), melainkan leluasa penuh untuk meminta keterangan-keterangan pada pihak yang berperkara tentang apa saja yang dianggap perlu untuk menjatuhkan putusan yang tepat. Dalam perkembangan hukum sekarang ini, meskipun kebenaran formil masih dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara perdata, akan tetapi secara teoritis sudah ada pandangan bahwa dalam menerapkan kebenaran formil tidak perlu bersifat terlalu kaku. Bahkan ada pendapat yang menghendaki dalam hukum acara perdata tidak saja untuk mencari kebenaran formil tetapi juga mencari kebenaran materil, sebagaimana

⁹² *Ibid*

⁹³ Wahyuni dan Bambang Sutiyoso, *Relevansi Kebenaran Formil Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*, (Fenomena: Vol I No.2, September 2003), h 157

yang dijelaskan oleh H.R.Purwata bahwa mengutamakan kebenaran formil tidaklah berarti Hukum Acara Perdata sekarang ini mengenyampingkan kebenaran materil, sebab menurut pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 3136 K/Pdt/1983 tertanggal 6 Maret 1985, kini sudah tidak pada tempatnya lagi untuk berpendapat demikian. Hukum Acara Perdata kini harus mencari kebenaran materil seperti prinsip Hukum Acara Pidana.⁹⁴

Pendapat di atas diperkuat lagi oleh M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pada dasarnya peradilan perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.⁹⁵

Menurut Maryana sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sutyoso menyatakan bahwa meskipun yang dicari hakim dalam perkara perdata adalah kebenaran formil, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.⁹⁶

Dalam praktek peradilan hakim perlu melihat kasusnya terlebih dahulu apakah kedudukan para pihak-pihak yang berperkara seimbang (sebanding) atau tidak. Pengertian seimbang dilihat dari beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, ekonomi dan status sosialnya. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang kedudukan para pihaknya seimbang, memang kebenaran formil yang dicari hakim dan sistem pembuktian positiflah yang diterapkan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu dimana kedudukan pihak-pihak yang berperkara tidak seimbang atau ada kesenjangan yang cukup signifikan, maka hakim akan berupaya mengorek lebih dalam dan mengkaji peristiwanya secara lebih seksama. Dengan demikian diharapkan putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan.

⁹⁴ Roihan A.Rasyid, *Op Cit*,, h. 9

⁹⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, *Op Cit*,,h. 498

⁹⁶ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 1997), h. 154

Pendapat lain dikemukakan oleh Elfi Marzuni, apabila bukti-bukti formil sudah cukup membuktikan kebenaran suatu peristiwa, maka hakim cukup mendasarkan putusan pada kebenaran formil tersebut. Tetapi apabila kedua belah pihak, baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon mengajukan bukti-bukti formil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama-sama kuatnya, maka dalam hal ini hakim tidak saja mencari kebenaran formil, tetapi juga harus menemukan kebenaran materilnya. Misalnya dalam perkara perdata kepemilikan tanah, apabila penggugat/pemohon mengajukan alat bukti akta otentik yang berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah, sedangkan tergugat/termohon mempunyai dua orang saksi yang mengemukakan keterangan yang berbeda dengan isi akta otentik milik penggugat/pemohon.

Dalam hal ini hakim perlu menelusuri lebih jauh dengan memanggil Kepala Desa yang bersangkutan untuk menjelaskan hal ihwal mengenai kepemilikan tanah tersebut. Kalau ternyata dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa akta otentik tersebut dibuat tidak melalui prosedur yang benar, maka berarti akta otentik tersebut bukanlah alas hak yang sah secara hukum. Oleh karena itu hakim akan menyatakan akta otentik milik pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Peran aktif hakim dalam masalah ini sangat penting untuk menemukan kebenaran, tidak hanya sekedar menyeleksi bukti-bukti yang diajukan para pihak tanpa mempunyai inisiatif sedikitpun. Hal ini sejalan dengan tugas hakim sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

Adanya sistem pembuktian positif ini menentukan kebenaran yang hendak dicari hakim dalam perkara perdata, yaitu kebenaran formil. Dengan demikian eksistensi kebenaran formil dalam perkara perdata dapat diketahui lebih jelas dalam putusan-putusan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata. Putusan-putusan perkara perdata tersebut dianalisis untuk melihat beberapa hal, yaitu :

- 1) Alat-alat bukti apa yang digunakan oleh para pihak.
- 2) Isi konsideran atau pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam putusan tersebut.
- 3) Putusan mengarah pada kebenaran formil atau kebenaran materil.

Titik tekan analisis terhadap putusan-putusan tersebut adalah pada ketiga hal diatas, karena dari alat-alat bukti yang diajukan dan pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim akan diketahui kenapa hakim sampai pada pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum yang dikemukakan diatas ternyata mereka belum mempunyai persepsi yang sama dalam menyikapi masalah ini. Di satu sisi ada yang membenarkan terhadap adanya keyakinan hakim dalam perkara perdata, tetapi di sisi lain ada pula yang menolaknya. Namun perbedaan pendapat tersebut lebih kepada bagaimana teknis merealisasikannya di depan pengadilan.

D. Hak *Ex officio* Hakim

1. Pengertian Hak *Ex officio* Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *ex officio* artinya karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.⁹⁷ Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya.⁹⁸

Pengertian hak *ex officio* menurut beberapa pakar hukum diantaranya :

⁹⁷Tim Penyusun, *Op. Cit ...*, h. 238

⁹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Idris, (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui tanggal 26 Januari 2018

- a. Menurut Sudarsono dalam kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatan.⁹⁹ Dimana hakim boleh memutus suatu perkara meskipun tidak diminta selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat dari para pihak yang bersengketa yakni penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon.
- b. Menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum, *ex officio* berarti karena jabatan, hal ini dapat dilihat dari contoh : dalam hal adanya eksepsi yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang”.¹⁰⁰
- c. Menurut Subekti pengertian hak *ex officio* berasal dari bahasa latin, *ambtshalve* bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.¹⁰¹

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, salah satunya ialah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, yakni memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri dan anak.

2. Dasar Hukum *Ex Officio*

Dasar hukum yang digunakan seorang hakim dalam menggunakan hak *ex officio* adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 (c) Tentang Perkawinan
 - 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
 - 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam

⁹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), h. 121

¹⁰⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka, 1977), h. 366

¹⁰¹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet ke-4 (Jakarta : Pradnya Paramita: 1979), h. 43

- kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 27 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Pengadilan Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
 - c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad dukhul*;
 - 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama *masaiddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bainatau* nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla ad dukhul*;
 - 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
 - d. Kompilasi Hukum Islam pasal 152 mantan istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari mantan suaminya, kecuali bila ia nusyuz.
 - e. Kompilasi Hukum Islam pasal 156 semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan bapak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Proses hukum cerai talak di Pengadilan Agama yang diuraikan secara teknis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Edisi Revisi 2020) pada butir 7 (tujuh) menyebutkan : Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat

menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban *mut'ah* (Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam).¹⁰² Dalam Buku II Pedoman Teknis Pengadilan Agama ditentukan bahwa apabila gugatan cerai dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah*.

Selain dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang dijadikan petunjuk teknis bagi hakim yang salah satunya memberikan kebolehan kepada hakim khususnya hakim Pengadilan Agama untuk dapat menetapkan nafkah anak secara *ex officio* kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (f) (akibat perceraian).

Tidak hanya sekedar menerbitkan Surat Keputusan dan Surat Edaran, Mahkamah Agung juga telah mempraktekkan penerapan hak *ex officio* dalam beberapa putusannya. Perkara kasasi nomor 276 K/Ag/2010 Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan cerai istri kepada suami yang dikumulasikan dengan tuntutan, *mut'ah*, dan nafkah anak yaitu dengan membebaskan *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,-. Pertimbangan Mahkamah Agung, karena perceraian tersebut diajukan oleh istri disebabkan suami kawin lagi dengan perempuan lain. Padahal kesetiaan istri lebih dari cukup. Sikap suami yang menikah lagi adalah sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi seorang istri yang setia.

Dari putusan yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa memutuskan tuntutan yang tidak dituntut selama tidak keluar dari pokok perkara serta dengan pertimbangan hakim harus mampu memberikan keadilan serta dapat menyelesaikan perkara maka boleh-boleh saja dilakukan oleh seorang hakim.

¹⁰²Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, ..., h. 254

Pasal 189 RBg ayat (3) menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*) kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁰³ Pasal ini menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan untuk memutus lebih dari yang dituntut misalnya mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya yang disebut dengan *hak ex officio*.



¹⁰³A. Mukti Arto, *Op. Cit*,, h. 11

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Krui

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Krui

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia pembentukan Peradilan Agama didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Krui didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1968 tanggal 28 Agustus 1968. Pada awal mulanya Pengadilan Agama Krui berkedudukan di Krui (eks Kewidanaan Krui) yang terletak di ujung barat provinsi Lampung, pada koordinat 5°26' Lintang Selatan dan 105°17' Bujur Timur beralamat di jalan Jayawijaya, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Lampung Utara.

Ketua pertama Pengadilan Agama Krui ialah Bapak H. Sjafi'i. D. A. menjabat dari tahun 1968, pada waktu itu jabatan resminya sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Tengah, Lampung Utara. Setelah pada tahun 1970 Bapak H. Djunaidi Duata, B. A. kembali bergabung ke Pengadilan Agama (sebelumnya menjadi pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat, lalu mengundurkan diri), beliau langsung diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama Krui yang kedua terhitung sejak 1 Agustus 1970 menggantikan kedudukan bapak H. Syafi'i. D. A. dan kantor Pengadilan Agama Krui dipindahkan ke jalan Jayawijaya Nomor 84, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Lampung Utara dengan mengontrak gedung permanen milik Ibu Hj. Aminah.

Pada tahun anggaran 1979/1980 sebelum terbentuknya Kabupaten Lampung Barat dibangunlah Balai Sidang Pengadilan Agama Krui di Liwa. Balai sidang tersebut dipergunakan untuk menerima perkara yang berasal dari wilayah Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Belalau dan Kecamatan Sumberjaya, untuk melayani para pencari keadilan dari tiga wilayah

kecamatan tersebut. Sejak tahun 1980 ketua Pengadilan Agama Krui menugaskan beberapa pegawai untuk bertugas di balai sidang tersebut secara bergiliran maupun tetap. Apabila jumlah perkara yang masuk di Balai Sidang di Liwa cukup banyak jumlahnya dan memungkinkan untuk disidangkan di Liwa maka diadakan persidangan di Liwa, akan tetapi apabila jumlah perkara masuk dalam jangka satu bulan sedikit (tidak memungkinkan untuk disidangkan di Liwa) maka perkara dari balai sidang di Liwa disidangkan di Krui.

Setelah kabupaten Lampung Barat diresmikan pada tanggal 24 September 1991 untuk memudahkan kerja sama antar instansi maka pada tanggal 16 Februari 1992 Pengadilan Agama Krui dipindahkan ke balai sidang Pengadilan Agama Krui di Liwa. Setelah terjadi gempa bumi besar pada tahun 1994 di Liwa, Kabupaten Lampung Barat yang menyebabkan banyak infrastruktur bangunan hancur termasuk gedung kantor Pengadilan Agama Krui maka Pengadilan Agama Krui kembali pindah ke Krui dengan menyewa rumah penduduk beralamat di jalan Jayawijaya Nomor 91, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Lampung Barat dari bulan Maret 1994 sampai dengan April 1996. Kemudiandari bulan April 1996 sampai dengan saat ini kantor Pengadilan Agama Krui tetap beralamat di jalan Mawar Nomor 10, Kelurahan Way Mengaku, Kota Liwa dengan menempati satu unit gedung kantor permanen.¹⁰⁴

2. Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

¹⁰⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Krui, Laporan Tahunan Tahun 2017

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukum apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 yang menyangkut organisasi administrasi dan finansial pada Peradilan Agama yang di dalamnya termasuk Pengadilan Agama Krui dipindahkan ke Mahkamah Agung, jadi semenjak itu Pengadilan Agama tidak lagi berada di bawah Departemen Agama. Pelaksanaan pemindahan tersebut yang khusus untuk Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004.

1. Fungsi Pengadilan Agama Krui

Tugas-tugas pokok Badan Peradilan Agama yang juga termasuk Pengadilan Agama Krui berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak pencari keadilan.

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Krui

Pengadilan Agama Krui mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok pengadilan-pengadilan agama yang lain. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan, yang meliputi :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang (poligami)
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya

- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shadaqah dan

i. Ekonomi Syari'ah, yang meliputi :

- 1) Bank Syari'ah
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
- 3) Asuransi Syari'ah
- 4) Reasuransi Syari'ah
- 5) Reksa Dana Syari'ah
- 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah
- 7) Sekuritas Syari'ah
- 8) Pembiayaan Syari'ah
- 9) Pegadaian Syari'ah
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan
- 11) Bisnis Syari'ah

3. Kekuasaan Pengadilan Agama Krui

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi pengadilan agama menyangkut 2 hal, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut :

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama.¹⁰⁵ Kompetensi relatif sebagai kewenangan atau kekuasaan pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum.

Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting berkaitan dengan ke Pengadilan Agama mana seseorang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat, belum tentu Pengadilan yang menerima gugatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.¹⁰⁶

Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi :

- 1) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
- 2) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- 3) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- 4) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.

¹⁰⁵Retnowulan Soetantio, *Op. Cit....*, h.11

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan, Op. Cit*, h. 202

- 5) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.¹⁰⁷ Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.¹⁰⁸

Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain selain Islam adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.

¹⁰⁷Roihan A Rasyid, *Op. Cit.*..., h. 27

¹⁰⁸Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas, Op. Cit.*..., h. 67

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Krui sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

Ketua	: Drs. H. Omay Mansur, M.Ag
Wakil Ketua	: Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si
Hakim	: Muhammad Idris, S.Ag Supriyanto, S.Ag., MSi Akhmad Najin, S.Ag H. Ahmad Jajuli, SHI Nihayatul Istiqomah, SHI., MH Alamsyah, SHI.,SH., MH Romi Maulana, SHI
Panitera	: Drs. Riduansyah
Sekretaris	: Agustiansyah Salim, SH
Panitera Muda Gugatan	: Dra. Arwani.,SH
Panitera Muda Permohonan	: -
Panitera Muda Hukum	: H. Sumarjo
Kasubbag Kepegawaian & Ortala	: Mukhlis.,SHI
Kasubbag Perencanaan, IT & Pelaporan	: Herman.,S.Kom., MM
Kasubbag Umum & Keuangan	: Meilina Yulien, S.Kom., S.Sy
Panitera Pengganti	: Rahmawati, SH., MHI Defi Tri Andari, SH Ahmad Syuyukhi, SH
Jurusita	: Ahmad Juanda
Jurusita Pengganti	: Muhammad Nizar Fitri Nurhayati Samharudin Siti Waryani
Staff	: Hazri, S.Ag Bayu Baskoro, S.Sy

Sumber : Data bagian umum Pengadilan Agama Krui Tahun 2018

B. Statistik Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Krui

Sebelum membahas mengenai proses beracara dalam putusan *verstek* terhadap perkara perceraian, maka berikut ini penulis terlebih dahulu akan memaparkan banyaknya perkara yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Krui dari tahun 2016 - 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Rekapitulasi Jenis Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Krui

NO	JENIS PERKARA	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Dispensasi Kawin	14	15
2	Cerai Talak	81	86
3	Cerai Gugat	294	301
4	Penunjukan Wali	1	-
5	Itsbat Nikah	37	41
6	Izin Poligami	2	-
7	Pembatalan Perkawinan	-	-
8	Harta Bersama	1	-
9	Wali Adhal	3	-
10	Gugat Waris	2	2
11	Hibah	-	-
12	Penguasaan Anak/Pengangkatan Anak	1	-
13	Asal/Usul Anak/Pengangkatan Anak	-	-
14	Lain-lain	2	1
	Jumlah	438	446

Sumber : Dokumentasi Laporan Perkara Pengadilan Agama Krui

Data di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2016-2017 perkara perceraian merupakan perkara terbanyak yang masuk di Pengadilan Agama dibandingkan dengan perkara-perkara lainnya. Jika diperhatikan perkara perceraian dikalangan masyarakat selalu meningkat dari tahun ketahunnya. Hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Krui diterangkan bahwa meningkatnya angka perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Krui dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Kondisi fisik dan psikologissuami istri dalam membina rumah tangga yang memang kurang dipersiapkan serta dibina dengan baik.
2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap proses cerai yang resmi.
3. Banyaknya kemudahan yang diprogramkan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu serta adanya program sidang keliling di dua lokasi di kabupaten Lampung Barat dan kabupaten Pesisir Barat yang memudahkan masyarakat berdomisili jauh dari kantor Pengadilan untuk berperkara.
4. Adanya transparansi selama proses berperkara terkait biaya dan perjalanan perkara yang saat ini didukung dengan aplikasi khusus SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan proses penyelesaian perkara mereka.¹⁰⁹

Dari gambaran singkat mengenai perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Krui, penulis mengkhususkan pada penerimaan perkara cerai talak yang menjadi objek pada penelitian kali ini. Banyaknya pengajuan cerai karena talak yang diajukan oleh pihak suami sejak tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Krui

Jenis Perkara Cerai Talak	Diterima	Perkara Diputus Tahun 2016 -2017		
		Hadir	<i>Verstek</i>	Lain-lain (Cabut, Coret dan gugur)
Tahun 2016	81	11	62	8
Tahun 2017	86	11	69	6
Jumlah	167	22	131	14
Persentase		13,18 %	78,44 %	8,38 %

Sumber : Dokumentasi Laporan Perkara Pengadilan Agama Krui

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Riduansyah (Panitera) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 31 Januari 2018

Dari keseluruhan jumlah perkara cerai talak yang diterima pada 2 tahun terakhir yakni 2016-2017 yang berjumlah 167 perkara, penulis menjabarkan lagi berdasarkan kriteria putusan cerai talak yang diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Krui dari segi aspek penerapan *ex officio* dalam amar putusannya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Kriteria Putusan Cerai Talak Tahun 2016 – 2017

Kriteria Putusan	Jumlah	Persentase
1. Kabul, Tidak ada pembebanan dari hakim	8	4,79 %
2. Kabul, Ada pembebanan dari hakim karena adanya rekonsiliasi (gugatan balik)	14	8,38 %
3. <i>Verstek</i> , Tidak ada pembebanan dari hakim	98	58,69 %
4. <i>Verstek</i> , Ada pembebanan dari hakim menggunakan hak <i>ex officio</i>	33	19,76 %
5. Cabut, Gugur, Coret	14	8,38 %
Total	167	100 %

Sumber : Dokumentasi Laporan Perkara Pengadilan Agama Krui

Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Krui khususnya untuk perkara cerai talak yang menjadi objek penelitian lebih banyak diselesaikan dengan putusan *verstek* oleh majelis hakim karena pihak termohon/istri banyak yang tidak menghadiri persidangan yakni sekitar 78,45 %. Penerapan hak *ex officio* sendiri oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Krui masih sangat minim sekali yakni sekitar 19,76 % saja.

C. Data Hasil Penelitian di Pengadilan Agama Krui

Melengkapi penelitian serta proses analisa dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa sampel putusan Pengadilan Agama Krui pada tahun 2016 dan 2017 sebagai bagian dari penelitian ini untuk selanjutnya dianalisa. Peneliti mengajukan tiga kasus perceraian yang berbeda, dilihat dari lamanya usia perkawinan, pekerjaan pemohon dan faktor penyebab dan pemicu terjadinya

perceraian. Pengambilan sampel tiga kasus ini mewakili kondisi perkawinan yang banyak terjadi di masyarakat saat ini ada yang baru menikah lalu bercerai bahkan ada juga pernikahan yang sudah berjalan puluhan tahun.

1. Perkara Cerai Talak Nomor : 278/Pdt.G/2016/PA.Kr¹¹⁰

Pengadilan Agama Krui menerima perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Yoni Afrizal bin Mulyadi sebagai pemohon, dan Maisaroh binti Masni Taufik sebagai termohon. Selanjutnya untuk memeriksa perkara tersebut ditetapkan majelis hakim yang diketuai oleh Supriyanto, S.Ag., M.Si, dan kedua pihak diperintahkan untuk dipanggil menghadap di persidangan. Adapun dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012, telah dilaksanakan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 433/21/XI/2012, tertanggal 29 Oktober 2012;
- b. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pemohon dan termohon pindah mengontrak rumah di Krui selama 8 bulan, setelah itu berpisah;
- c. Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Fahri bin Yoni Afrizal, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut Termohon;
- d. Bahwa keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah sejak bulan Februari 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan pemohon, kemudian

¹¹⁰ Salinan putusan Pengadilan Agama Krui Nomor : 278/Pdt.G/2016/PA.Kr putus tanggal 28 November 2016

termohon sering didatangi laki-laki lain ketika pemohon sedang tidak berada di rumah;

- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juli 2015 dengan sebab pemohon menegur termohon, menanyakan siapa laki-laki yang sering datang ke rumah, apakah benar termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki tersebut, akibat kejadian tersebut antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, termohon tanpa izin dengan pemohon pulang ke rumah orang tua termohon di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan pemohon tinggal di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;
- f. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan keluarga pemohon dan termohon dalam rangka menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;
- g. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- h. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primair:

- a) Mengabulkan permohonan pemohon;
- b) Memberi izin kepada pemohon (Yoni Afrizal bin Mulyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Maisaroh binti Masni Taufik) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak 2 kali. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak pernah hadir di persidangan.

Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon. Memperkuat dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa buku nikah dan bukti domisili berupa kartu tanda penduduk dan alat bukti saksi. Saksi yang diajukan pemohon adalah Junaidi bin Jauhari (tetangga pemohon) dan Sayoto bin Umar (paman pemohon). Bahwa kedua orang saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- a) Bahwa kedua saksi kenal dengan pemohon dan termohon, dimana pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.
- b) Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak akhir bulan Juli 2015 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.
- c) Bahwa setahu kedua saksi tersebut sebab perselisihan antara pemohon dan termohon adalah adanya sms di HP milik termohon dari laki-laki lain yang berisi kata-kata sayang dan cinta.
- d) Bahwa kedua saksi tersebut menerangkan termohon pulang ke rumah orangtuanya di Pesawaran tanpa izin dari pemohon dengan membawa anaknya.
- e) Bahwa kedua saksi menerangkan sulit untuk diharapkan pemohon dan termohon rukun kembali.

Selama dalam persidangan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dimaksud serta tidak mengajukan

bantahan. Majelishakim menyimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Dan dalil syar'i yang dipergunakan majelis adalah kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II halaman 55

فإنتعزبتعززاوتواراوغيبة جازاثباتهبالينة

“Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti”.

Berdasarkan keterangan pemohon dan dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, majelis berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak telah (*marriage breakdown*) dan tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai. Firman Allah yang dipergunakan majelis hakim adalah al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

... وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ... ﴿٢٣١﴾

“dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

Serta kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil oleh majelishakim sebagai berikut :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolakkemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikemaslahatan.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelishakim berkesimpulan bahwa :

- a) Permohonan yang diajukan pemohon terbukti telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

- b) Permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* karena termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg.
- c) Permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon dapat dikabulkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- d) Dalam proses persidangan terbukti bahwa termohon telah nusyuz, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan, maupun kiswah selama masa *iddah* dari pemohon.
- e) Walaupun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonpensi, hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kewajiban *mut'ah* dan nafkah anak kepada bekas suami untuk bekas istrinya didasarkan pada ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003 dan yang juga diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- f) Majelis berpendapat pemberian *mut'ah* dari bekas suami terhadap bekas istri yang ditalaknya adalah suatu kewajiban, bentuk dan besarnya suatu *mut'ah* harus *ma'ruf*, oleh karena itu maka hal itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998.
- g) *Mut'ah* harus *ma'ruf*, pemberian *mut'ah* juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang ditalak oleh suaminya sebagaimana pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 :

ولتطيب خاطر المرأت وتخفيف ألم الفرقو لإيجاد بآعثل عود إلى الزوجة إن لم تكن البينونة كبر

رى

“Pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, jika bukan talak bain kubro”.

- h) Menimbang pernyataan pemohon di depan sidang bahwa setiap bulan mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta masa kebersamaan dalam perkawinan hanya selama 4 (empat) tahun, maka majelis berpendapat sudah layak dan pantas bagi pemohon untuk dibebani membayar *mut’ah* kepada termohon berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada termohon.
- i) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan (b) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.pasal 77 ayat (3), pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c), pasal 81 dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, ditentukan yang pada pokoknya bahwa bapak dan ibu memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, bahkan meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut telah putus.
- j) Menimbang, pasal 2 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga ditentukan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

 - 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- k) Menimbang, pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, ditentukan bahwa bekas

suami (bapak) yang (wajib) bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan (*hadhanah*) yang diperlukan anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

- l) Menimbang, pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 112 yang berbunyi :

فان تعدد المنفق من الوالدين كن له ابوان فعلى الاب نفقته دون الام

"Bagi siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkah (perbelanjaan)nya adalah menjadi tanggung jawab ayah bukan ibunya".

- m) Menimbang, pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

"wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

- n) Menimbang, pernyataan pemohon di depan sidang bahwa setiap bulan mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), majelis hakim memandang wajar dan pantas untuk membebankan kepada pemohon agar membayar nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui orang tua yang mengasuh anak pemohon dan termohon yakni dalam hal ini ialah ibu kandung anak tersebut yaitu termohon.
- o) Menimbang, bahwa mengingat nilai rupiah yang setiap tahun pasti mengalami inflasi, maka majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang harus diberikan oleh pemohon harus naik setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan diatas maka majelis hakim memutuskan :

- a) Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
- b) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

- c) Memberi izin kepada Pemohon (Yoni Afrizal bin Mulyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maisaroh binti Masni Taufik) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
- d) Menghukum Pemohon (Yoni Afrizal bin Mulyadi) untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - (1).Mut'ah yang berupa uang tunasi sebesar Rp. 1.000.000,-
 - (2) Nafkah seorang anak yang bernama Fahri bin Yoni Afrizal setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) hingga anak tersebut mandiri /umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun / telah menikah
- e) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Krui untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- f) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

2. Perkara Cerai Talak Nomor : 259/Pdt.G/2017/PA.Kr.¹¹¹

Pengadilan Agama Krui menerima perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Agus Somantri bin Marnan sebagai pemohon, dan Intan Mayasari binti Halim Permana sebagai termohon. Selanjutnya untuk memeriksa perkara tersebut ditetapkan majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Idris, S.Ag. dan kedua pihak diperintahkan untuk dipanggil menghadap di persidangan. Adapun dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 Oktober 2015 di rumah orang tua termohon, telah dilaksanakan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan

¹¹¹ Salinan putusan Pengadilan Agama Krui Nomor : 259/Pdt.G/2017/PA.Kr putus tanggal 24 Oktober 2017

tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0414/077/X/2015, tertanggal 12 Oktober 2015;

- b) Bahwa setelah menikah, pemohon dantermohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua termohon selama 1 (satu) minggu, kemudian pemohon dantermohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon sampai dengan bulan Agustus 2016, setelah itu termohon pulang kerumah orangtua termohon karena mau melahirkan, dan pemohon tinggal di Bandar Lampung karena kuliah, akan tetapi antara pemohon dantermohon masih saling kunjung sampai dengan bulan Juli 2017;
- c) Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dantermohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Aqila Putri Binti Agus Somantri;
- d) Bahwa keharmonisan rumah tangga pemohon dantermohon mulai goyah sejak 3 (tiga) bulan menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan :
 - (1) Karena Termohon merasa tidak dinafkahi oleh pemohon karena pemohon tidak mempunyai pekerjaan sebab pemohon masih kuliah;
 - (2) Masalah kesepakatan tempat tinggal dimana pemohon berkeinginan untuk tinggal di rumah orang tua pemohon sedangkan termohon juga berkeinginan untuk tinggal di rumah orang tua termohon;
- e) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dantermohon terjadi pada bulan Juli 2017, dengan sebab yang sama yaitu masalah ekonomi yang tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pemohon dantermohon pisah tempat tinggal, termohon tinggal di rumah orang tua termohon sebagaimana alamat termohon tersebut di atas dan pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon sebagaimana alamat pemohon tersebut juga di atas;

- f) Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan keluarga pemohon dan termohon dalam rangka menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;
- g) Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- h) Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primair :

- a) Mengabulkan permohonan pemohon;
- b) Memberi izin kepada pemohon (Agus Somantri bin Marnan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Intan Mayasari binti Halim) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak 2 kali. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak pernah hadir di persidangan.

Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon. Dan untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa buku nikah dan bukti domisili berupa

kartu tanda penduduk dan alat bukti saksi. Saksi yang diajukan pemohon adalah Sunaryo bin Indun (tetangga pemohon) dan Oni M. Ramadani bin Toha (pamanipar pemohon). Bahwa kedua orang saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- a) Bahwa kedua saksi kenal dengan pemohon dan termohon, dimana pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
- b) Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak akhir bulan Juli 2017 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
- c) Bahwa setahu kedua saksi tersebut sebab perselisihan antara pemohon dan termohon adalah termohon merasa tidak pernah diberi nafkah dan tidak adanya kesepakatan tempat tinggal antara pemohon dan termohon;
- d) Bahwa kedua saksi tersebut menerangkan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- e) Bahwa kedua saksi menerangkan sulit untuk diharapkan pemohon dan termohon rukun kembali;

Selama dalam persidangan termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Majelis hakim menyimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan pemohon dan dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan majelis berpendapat bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan sulit untuk dipersatukan kembali. Hal ini disimpulkan karena hakim tidak menemukan satupun fakta di persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari pemohon dan termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik pemohon maupun termohon sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa :

- a) Permohonan yang diajukan pemohon terbukti telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.
- b) Permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* karena termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg.
- c) Permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon dapat dikabulkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- d) Pemohon hendak menceraikan termohon, maka secara *ex officio* majelis hakim memandang perlu untuk menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak jika permohonan pemohon dipandang cukup bukti untuk dikabulkan, dengan mengingat dan memperhatikan kebutuhan termohon yang saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap dan sebagai ibu rumah tangga, sementara harus menanggung biaya hidup anak yang saat ini ada dalam pengasuhan termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) dan (b) *vide* Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 halaman 148 huruf (g).

- e) Majelis berpendapat bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak dan nafkah *iddah* kepada bekas istri berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut berdasarkan pasal 152 dan pasal 153 ayat 2 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz.
- f) Majelishakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 mengenai pembebanan nafkah *iddah*, sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناً حبس الزوج عليها وبسلطنته

“Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istrinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas istri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami.”

- g) Menimbang walaupun pekerjaan pemohon saat ini adalah sebagai mahasiswa disalah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung majelishakim melihat kesanggupan dan itikad baik pemohonserta memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran biaya hidup majelis hakim menentukan untuk biaya nafkah *iddah* termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 90 hari atau 3 bulan.
- h) Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, hakim secara *ex officio* juga dapat membebaskan kewajiban *mut'ah* kepada bekas suami untuk bekas istrinya sebagaimana juga diatur dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

- i) Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

- j) Menimbang, bahwa berdasarkan ayat diatas, majelis berpendapat pemberian *mut’ah* dari bekas suami terhadap bekas istri yang ditalaknya adalah suatu kewajiban, bentuk dan besarnya suatu *mut’ah* harus *ma’ruf*, oleh karena itu maka hal itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998.
- k) Menimbang, bahwa disamping *mut’ah* harus *ma’ruf* sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, pemberian *mut’ah* juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang ditalak oleh suaminya sebagaimana pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim sebagai berikut:

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولا يجادبا على العودة إل الزوجة إن لم تكن البينة كذب

رى

“Pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, jika bukan talak bain kubro”

- l) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan kesanggupan pemohon untuk memberi *mut’ah* kepada termohon berupa seperangkat alat sholat, maka majelis berpendapat sudah layak dan pantas bagi pemohon untuk dibebani *mut’ah* kepada termohon berupa seperangkat alat sholat berupa mukena setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada termohon;

- m) Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dari hasil perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Aqila Putri Binti Agus Somantri, yang saat ini berada dalam pengasuhan termohon, oleh karena itu demi kepentingan anak dan memperhatikan kelangsungan masa depan anak tersebut dari segi pemeliharaan dan pendidikan, sebagai akibat dari perceraian kedua orang tuanya, maka dalam hal ini majelis hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kewajiban nafkah anak kepada pemohon sebagai ayah kandungnya, sebagaimana maksud yang tertuang dalam pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- n) Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak bukan dimaksudkan *lil tamlik* melainkan *lil intifa'* yaitu demi pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mampu mandiri, maka dalam hal ini dengan memperhatikan penghasilan pemohon dan asas kepatutan dan kewajaran serta tingkat inflasi 10 % pertahunnya, maka majelis hakim menentukan kewajiban nafkah atas anak pemohon dan termohon kepada pemohon sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan diatas maka majelishakim memutuskan :

- a) Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b) Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
- c) Memberi izin kepada pemohon (Agus Somantri bin Marnan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Intan Mayasari binti Halim Permana) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
- d) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :

(1) Nafkah anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh

- ribu rupiah)sampai anak tersebut dewasa;
- (2) Nafkah *Iddah* Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah;)
- (3) Membayar *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;
- e) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Krui untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- f) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

3. Perkara Cerai Talak Nomor : 273/Pdt.G/2017/PA.Kr.¹¹²

Pengadilan Agama Krui menerima perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Sularno Bin Wagimin sebagai pemohon, dan Sri Wahyuni Binti Jumangin sebagai termohon. Selanjutnya untuk memeriksa perkara tersebut ditetapkan majelis hakim yang diketuai oleh Drs. Muhyar, SH., MH., MSi, dan kedua pihak diperintahkan untuk dipanggil menghadap di persidangan. Adapun dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2007 di rumah, telah dilaksanakan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/01/2008, tertanggal 10 Januari 2008;
- b) Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua termohon di Lingkungan Heru, Dusun Pantau, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit,

¹¹² Salinan putusan Pengadilan Agama Krui Nomor : 273/Pdt.G/2017/PA.Kr putus tanggal 11 Oktober 2017

- Kabupaten Lampung Barat selama 2 bulan, kemudian pemohon dan termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Lingkungan Seranggas, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit selama 1 tahun, setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua termohon di Lingkungan Heru, Dusun Pantau, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat selama 10 tahun, lalu berpisah;
- c) Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suamiistri dan sudah dikaruniai satu anak bernama Eni Dinarsih umur 9 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;
 - d) Bahwa keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah sejak 2 tahun pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan :
 - (1) Termohon merasa kurang tercukupi kebutuhan ekonomi yang diberi oleh Pemohon;
 - (2) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - (3) Termohon cemburu buta;
 - e) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada 13 Agustus 2017 dengan sebab yang sama yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, termohon tinggal di Lingkungan Heru, Dusun Pantau, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat dan pemohon tinggal di Dusun Limau Kunci, Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;
 - f) Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan keluarga pemohon dan termohon dalam rangka menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;
 - g) Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
 - h) Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

- a) Mengabulkan permohonan pemohon;
- b) Memberi izin kepada pemohon (Sularno Bin Wagimin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Sri Wahyuni Binti Jumangin) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak 2 kali. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak pernah hadir di persidangan.

Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Dan untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa buku nikah dan bukti domisili berupa kartu tanda penduduk dan alat bukti saksi. Saksi yang diajukan pemohon adalah Aan Yudiyono bin Tulus (teman dekat Pemohon) dan Sunarsih binti Ahmad Sadi (tetangga Pemohon). Bahwa kedua orang saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- a) Pemohon telah menikah dengan termohon pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Eni Dinarsih binti Sularno.
- b) Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon merasa kurang terhadap penghasilan pemohon, dan termohon cemburu buta kepada pemohon,

pemohon dengan termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan hingga sekarang.

- c) Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan.
- d) Bahwa keluarga pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit.

Selama dalam persidangan termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Majelis hakim menyimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Dan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan majelis berpendapat bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan bahkan kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua masing-masing, dan sudah tidak ada itikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut majelis merupakan indikasi perselisihan antara pemohon dengan termohon sudah terus-menerus, sementara pemohon sudah merasa menderita atas sikap termohon tersebut dan akhirnya bersikeras untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa :

- a) Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

- b) Menimbang berdasarkan keterangan pemohon dan dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan majelis berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak telah (*marriage breakdown*) dan tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai. Kaidah fihiyyah yang dipergunakan majelis adalah yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolakkemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemashalatan.”

- c) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka majelis dapat menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Krui.
- d) Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara *verstek* yang dengan sendirinya tidak terdapat tuntutan dari termohon tentang hak-hak termohon pasca terjadinya perceraian yang berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas suami untuk bekas istrinya sebagaimana juga diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;
- e) Menimbang bahwa sejalan dengan itu pemohon ternyata juga berkeinginan untuk memberikan hak-haknya kepada termohon sebatas *mut'ah* dan nafkah anak sebatas kemampuan pemohon masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karenanya majelis

memandang bahwa keinginan pemohon tersebut merupakan niat yang baik sebagai rasa tanggungjawab seorang bekas suami terhadap bekas istri, dan demi mendapatkan kepastian hukum, maka majelis perlu membebankan kepada pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta membebankan kepada pemohon untuk memberikan nafkah anak atas seorang anak pemohon dengan termohon yang bernama Eni Dinarsih binti Sularno yang baru berumur 9 tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

- f) Menimbang, bahwa untuk melindungi hak termohon atas nafkah *mut'ah* tersebut, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada pemohon agar menyiapkan nafkah *mut'ah* dan nafkah anak bulan pertama pada saat akan mengucapkan ikrar talak kepada termohon dan agar menyerahkannya kepada termohon sesaat setelah ikrar talak tersebut diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan diatas maka majelis hakim memutuskan :

- a) Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b) Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
- c) Memberi izin kepada pemohon (Sularno Bin Wagimin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Sri Wahyuni Binti Jumangin) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
- d) Menghukum pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- e) Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama Eni Dinarsih binti Sularno setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa.
- f) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Krui untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- g) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan laporan hasil wawancara dalam penelitian yang penulis lakukan ditemukan persamaan pendapat diantara ketiga hakim ketua tersebut di atas, persamaan tersebut adalah bahwa :

- a) Putusan dapat dijatuhkantanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan dengan cara *verstek* sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.
- b) Sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, hakim secara *ex officio* dapat membebankan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas suami untuk bekas istrinya
- c) Penerapan hak *ex officio* oleh hakim dapat diterapkan sebagai bentuk untuk melindungi hak-hak anak juga dapat melindungi hak-hak mantan istri.
- d) Suami yang mempunyai kemampuan ekonomi wajib untuk diberikan beban biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak anak dan mantan istri.
- e) Anak yang terbukti berada dalam asuhan ibunya sedangkan ibunya tidak mempunyai penghasilan sendiri maka wajib dibebankan nafkah anak demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut.

Beberapa hal yang berbeda yang penulis temukan dari hasil wawancara dengan ketiga ketua majelis tersebut di atas adalah :

1. Menurut hakim Muhyar *ex officio* dapat diterapkan dalam seluruh aspek perkara termasuk ekonomi syariah sekalipun beliau berpendapat bahwa secara progresif hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa, dan mengadili perkara dan memberikan apa yang tidak diminta dalam gugatan, tetapi harus memenuhi syarat untuk itu. Sedangkan dua hakim ketua lainnya berpendapat bahwa *ex officio* hanya dapat diterapkan dalam perkara yang berkaitan dengan bidang perkawinan saja saja.
2. Menurut hakim Muhyar menetapkan nafkah *iddah* tidak melulu melihat nusyuznya seorang istri sebagai poin penting, beliau berpendapat dan menerapkan tetap diberikan meskipun nominal yang dibebankan tidak besar

namun cukup. Sedangkan dua hakim ketua lainnya berpendapat bahwa penentuan nafkah *iddah* wajib melihat kondisi nusyuznya seorang istri jika dia terbukti nusyuz maka tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah*, namun jika istri taat dan patuh kepada suami maka ia berhak untuk diberikan nafkah *iddah*.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim di Pengadilan Agama Krui

Analisis merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian. Analisis merupakan ujung penelitian yang dilakukan setiap penulis untuk melahirkan sebuah kesimpulan yang akurat. Dalam penelitian tentang penerapan hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama Krui terhadap hak-hak anak dan mantan istri dalam perkara cerai talak yang diputus *verstek* aspek yang akan dianalisa penulis tentang penerapan hak *ex officio* hakim, mencakup aspek putusan *verstek* dan aspek penerapan hak *ex officio*. Hal ini penulis lakukan karena hak *ex officio* hakim hampir rata-rata diterapkan dalam perkara cerai talak yang diputus dengan *verstek*.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan, diperoleh data seperti yang dipaparkan pada BAB III tabel 3 halaman 90 bahwa sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mayoritas perkara cerai talak yang diterima di Pengadilan Agama Krui adalah sebanyak 167 perkara.

Apabila data diatas diamati, sebagian besar perkara yang telah putus merupakan putusan *verstek* yakni sebanyak 131 perkara atau 78,44 % dari keseluruhan perkara yang selesai. Data pada tabel tersebut menggambarkan bahwasanya perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Krui mayoritas tidak pernah dihadiri oleh pihak termohon sehingga majelis hakim memutus perkara cerai talak tersebut dengan *verstek*.

Putusan *verstek* dalam perkara perdata diterapkan dengan berlandaskan pada RBg yakni aturan hukum peninggalan Belanda yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura pasal 149 ayat (1) yang berbunyi :

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Suatu perkara dapat diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran lawan) apabila telah dilakukan pemanggilan kepada pihak termohon/istri sebanyak 2 kali. Pemanggilan tersebut harus disampaikan secara resmi dan patut. Resmi berarti objek panggilan harus tepat yakni dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dan panggilan langsung dilakukan kepada pribadi ditempat kediaman orang yang dipanggil, patut berarti disampaikan kepada termohon maksimal 3 hari sebelum tanggal hari sidang dilaksanakan.¹¹³ Kedua unsur tersebut merupakan dua komponen yang mengikat keabsahan panggilan menurut tata tertib beracara. Jika salah satu komponen tidak dipenuhi akan mengakibatkan panggilan menjadi tidak sah yang akan berefek juga pada keabsahan dari sebuah putusan hakim.

Pada prinsipnya pihak lawan dipanggil oleh Pengadilan untuk datang dan menghadap di persidangan dalam rangka untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada kedua pihak untuk mempertahankan haknya dalam persidangan. Pemohon berhak mengajukan gugatan, maka termohon mempunyai hak menjawab, atau membantah dalil gugatan. Pemohon mempunyai hak untuk membuktikan dalil gugatan, maka termohon mempunyai hak atas dalil bantahan/jawaban. Termasuk dalam hal ini adalah bahwa termohon berhak mengajukan gugatan balik terhadap pemohon dalam perkara tersebut.

Ketika pihak lawan tidak hadir di persidangan, doktrin hukum perdata menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata hakim cukup berpegang pada kebenaran formil saja, artinya bahwa kebenaran hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan saja tanpa harus disertai keyakinan hakim, kebenaran digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak¹¹⁴ tidak perlu sampai pada tataran kebenaran materiil sebagaimana dalam perkara pidana.¹¹⁵

¹¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit. Kedudukan Kewenangan Dan Acara...*, h. 221

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Idris (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 26 Januari 2018

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Muhyar (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 9 Februari 2018

Kebenaran formil dalam perkara perdata (terhadap putusan *verstek*) sebagaimana doktrin diatas juga di dukung dengan pendapat para diantaranya, menurut Imam Maliki membolehkan dijatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak hadir ke pengadilan, jika orang yang telah datang telah menemukan bukti-bukti dan meminta dijatuhkan hukuman. Sedangkan menurut Imam Syafi'i membolehkan seorang hakim memutuskan perkara terhadap orang yang tidak hadir, jika bukti-bukti sudah diberikan dengan cukup oleh pendakwa. Dan apabila dijatuhkan hukuman atas orang yang tidak hadir dalam pengadilan, anak kecil, atau orang gila, berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh penggugat, hendaknya penggugat tersebut disumpah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil pemahaman bahwa unsur sebuah perkara dapat diputus dengan *verstek* antara lain :

1. Kedua pihak telah dipanggil secara resmi dan patut.
2. Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.
3. Tidak mengutus wakil atau kuasa yang sah.
4. Tuntutan yang diajukan pemohon itu beralasan dan tidak melawan hak.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap putusan maupun berkas perkara cerai talak, unsur-unsur dalam putusan *verstek* sebagaimana diuraikan diatas, telah diterapkan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian penerapan *verstek* dalam perkara-perkara yang terdapat dalam penelitian ini, menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik aturan hukum negara yang berlaku, maupun berdasarkan tata aturan hukum Islam.

Selanjutnya yang menjadi konsentrasi penulis adalah tentang penerapan hak *ex officio* hakim pada perkara cerai talak yang diputus *verstek*. Ada hal mendasar yang mempengaruhi antara putusan kabul dan putusan *verstek* yakni akibat hukum yang diperoleh dari putusan itu. Ketika termohon tidak hadir dipersidangan maka ia tidak dapat menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan atau bahkan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi).

Hal ini jelas memberikan kerugian bagi pihak termohon, karena hak-hak termohon baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam BAB II hal 41-50 penelitian ini tidak dapat dituntut. Hak termohon sebagai seorang istri antara lain hak atas *mut'ah*, nafkah *madlyah* dan hak nafkah selama masa *iddah*. Sedangkan hak termohon

sebagai seorang ibu adalah biaya pemeliharaan anak. Jika hak-hak tersebut tidak diberikan oleh suami, lalu siapa yang harus menanggung kebutuhan hidup dari seorang istri yang diceraikan atau kebutuhan anak hasil perkawinan jika tidak dibebankan kepada suami.

Pada dasarnya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks perkara tertentu, dimungkinkan adanya ruang bagi hakim untuk memutus melebihi apa yang diminta. Salah satunya dapat kita lihat dari contoh putusan-putusan PA Krui nomor 278/Pdt.G/2016/PA.Kr, 259/Pdt.G/2017/PA.Kr dan 273/Pdt.G/2017/PA.Kr dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan tuntutan, maka pengadilan secara *ex officio* dapat membebankan kepada suami untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah* anak kepada anak dan istri yang ditalaknya. *Ex officio* adalah kewenangan hakim karena jabatannya untuk mewajibkan pihak atau para pihak untuk melakukan sesuatu meskipun tidak diminta dan dituntut dalam petitem.

Payung hukum penerapan *ex officio* pada dasarnya adalah maksud dari pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹¹⁶ Namun dalam tataran hukum acara dasar hukum penerapan *ex officio* didasarkan pada ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-undang Perkawinan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003 dan yang juga diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹¹⁷ Aturan tambahan lain yang menjadi dasar hukum penerapan *ex officio* adalah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 148 huruf (g).¹¹⁸

¹¹⁶Hasil wawancara dengan bapak Muhyar (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 9 Februari 2018

¹¹⁷Hasil wawancara dengan bapak Supriyanto (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 9 Maret 2018

¹¹⁸Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Idris (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 26 Januari 2018

Salah satu bentuk penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara perceraian adalah dengan memberikan pembebanan kepada suami meskipun tidak diminta oleh pihak istri. Dalam perkara cerai talak, contoh : A seorang suami menceraikan B istrinya. Selama persidangan ternyata B istri tidak hadir dan hakim memutuskan memberi ijin cerai kepada A sebagai suami, dan menjatuhkan pembebanan kepada A sebagai suami untuk membayar kepada B sebagai istri berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam jumlah tertentu. Selain itu juga memberikan pembebanan kepada A sebagai bapak untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulan dalam jumlah tertentu. Pembebanan oleh hakim diluar tuntutan untuk diberikan kepada pihak istri inilah yang merupakan salah satu bentuk hak *ex officio* hakim.

Untuk mempermudah menganalisa data yang diperoleh penulis, maka penulis memaparkan data mengenai perkara cerai talak yang diputuskan dengan menggunakan hak *ex officio* pada tahun 2016 dan 2017 di Pengadilan Agama Krui. Dari sekian banyak putusan yang dalam amar putusannya tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri, dan ada juga yang dalam amar putusannya memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri. Hal tersebut dapat dilihat kembali seperti yang telah dijelaskan diawal pada BAB III halaman 91 tabel 4. Perkara perceraian yang diputus *verstek* dan diikuti pembebanan menggunakan hak *ex officio* sebanyak 33 perkara atau 19,76 % sedangkan yang diputus secara *verstek* tanpa diikuti pembebanan berjumlah lebih besar yakni 68,27 % angka yang cukup tinggi yakni lebih dari setengah jumlah perkara cerai talak yang diterima sepanjang 2 tahun terakhir 2016-2017

Berdasarkan data di atas penulis mencoba merinci kembali dari seluruh putusan *verstek* dengan *ex officio* hakim berdasarkan jenis bentuk pembebanan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Krui kepada mantan suami, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5

Rekapitulasi Jenis Pembebanan Dari Majelis Hakim

Bentuk Pembebanan	Jumlah	Persentase
1. Pembebanan berupa nafkah <i>mut'ah</i>	24	72,73 %
2. Pembebanan berupa nafkah <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>iddah</i>	4	12,12 %
3. Pembebanan berupa nafkah <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>hadhanah</i> anak	2	6,06 %
4. Pembebanan berupa nafkah <i>mut'ah</i> , <i>iddah</i> dan nafkah <i>hadlanah</i> anak	3	9,09 %
Total	33	100 %

Berdasarkan data di atas, tergambar bahwa mayoritas hakim Pengadilan Agama Krui menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak tanpa adanya pembebanan dari pihak suami kepada istri dan sangat minim yang diputus dengan pembebanan berdasarkan hak *ex officio* (33 perkara) atau baru sepertiga dari perkara cerai talak yang diputus.

Dimana pemenuhan hak untuk istri lebih banyak hanya berupa pembebanan nafkah *mut'ah* saja sebagai akibat dari perceraian karena talak dari suami sedangkan pembebanan untuk *iddah* dan hak anak berupa *hadhanah* diberikan hanya pada beberapa perkara saja.

Bila dilihat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami jika dibandingkan dengan amar putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Krui dapat dilihat bahwa hanya beberapa orang hakim saja yang memberikan hak-hak bagi mantan istri dan anak tersebut walaupun tidak diminta atau dituntut oleh mantan istri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak *verstek* sebagai bentuk rasa keadilan bagi anak dan mantan istri masih sangat minim/sedikit sekali diterapkan untuk melindungi hak anak dan mantan istri, khususnya oleh hakim di Pengadilan Agama Krui.

Sebenarnya hak *ex officio* hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang

melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan (tuntutan) dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak.¹¹⁹

Kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* hakim tersebut dapat dilakukan manakala seorang hakim menemukan keadaan :

1. Terdapat pihak (pemohon/termohon) yang secara nyata mengalami keadaan yang memerlukan bantuan dan penyelamatan dari ketidakadilan sebagai dampak langsung yang merugikan akibat putusan hakim yang akan dijatuhkan mengenai pokok-pokok perkara.
2. Terdapat pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak yang juga terkena dampak langsung yang merugikan akibat putusan hakim yang akan dijatuhkan.
3. Terdapat hambatan atau rintangan yang menghalangi terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹²⁰

Namun dalam pemeriksaan perkara cerai talak *verstekhak ex officio* juga tidak serta merta dapat diterapkan pada semua perkara demi melindungi hak-hak mantan istri hal ini melihat *case by case*. Beberapa alasan yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya *ex officio* dalam perkara cerai talak *verstek* diantaranya :

1. Istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*
2. Istri terbukti telah nusyuz kepada suami
3. Istri dalam keadaan dijatuhi talak *ba'in*
4. Adanya pernyataan dari istri yang mengikhlaskan hak-hak yang dimilikinya
5. Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani hak-hak yang harus ia penuhi kepada anak dan mantan istri
6. Istri tidak diketahui keberadaannya (*ghoib*).¹²¹

¹¹⁹A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018), h. 216

¹²⁰*Ibid*, h. 226

¹²¹ Hasil wawancara dengan bapak Muhyar (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 9 Februari 2018

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan *ex officio* dalam perkara ceraitalak *verstek* merupakan sebuah instrument yang dapat digunakan seorang hakim dalam memberikan putusan yang berkeadilan kepada kedua pihak suami dan istri walaupun tidak diminta. Karena pembebanan kepada seorang suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi seorang istri merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap istri. Kewajiban itu dapat gugur apabila keberadaan istri tidak diketahui, istri nusyuz, istri *qobla al-dukhul* atau istri mengikhlaskan dan membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

Ex officio ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak sehingga pihak yang berhak dapat menerima apa yang menjadi haknya, pihak yang berkewajiban memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak ada diskriminasi. Dengan memberi kewenangan *ex officio* kepada hakim maksud negara adalah sebagai perlindungan hukum kepada semua rakyatnya melalui perantaraan seorang hakim agar para pencari keadilan berhasil mendapatkan keadilan

Disamping itu untuk dapat mewujudkan putusan yang sempurna hendaknya hakim melakukan pemeriksaan perkara dengan sungguh-sungguh dengan pendekatan humanis, untuk mendapatkan data-data mengenai fakta kejadian yang lengkap dan akurat sehingga ditemukan fakta hukum yang lengkap, kronologis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan hukum pembuktian. Fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh hakim untuk menjawab petitum pemohon.

Sebagaimana uraian diatas, diharapkan bahwa putusan seorang hakim hendaknya haruslah memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, baik suami istri maupun anak-anak hasil perkawinan. Ketika putusan hakim tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan maka akan memberi dampak pada beberapa hal :

1. Terjadi penelantaran terhadap korban perceraian, istri dan anak hasil perkawinan.

2. Rendahnya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) masyarakat terhadap lembaga peradilan.
3. Menimbulkan sengketa atau permasalahan baru terutama dalam hal nafkah dan biaya penghidupan anak hasil perkawinan.
4. Perlakuan diskriminatif kaum laki-laki/suami terhadap kaum perempuan/istri.

Dampak pertama, yang dirasakan langsung adalah penelantaran terhadap hak-hak korban perceraian. Proses perceraian yang sedang terjadi antara suami dan istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya terutama nafkah bagi istri yang harus menjalankan masa *iddah*.

Istri yang diceraikan karena talak *raj'i*, pada dasarnya masih terikat dalam perkawinan dengan suami yang menceraikan, karena hanya suami yang menceraikannya yang berhak untuk merujuknya. Wanita yang dicerai tetapi talaknya masih *raj'i* (talak satu atau talak dua), para ulama sepakat bahwa dia masih berhak nafkah dari suaminya, sebab statusnya masih sebagai istri yang sah, dengan bukti selagi belum habis masa *iddah*-nya Islam memperbolehkan suami untuk merujuknya tanpa harus diadakan akad perkawinan baru, sebagaimana Allah menyebutnya dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah (2) : 228

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ... ﴿٢٢٨﴾

“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti (*iddah*) itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*/perbaikan.”

Oleh karena itu, meskipun istri telah ditalak, akan tetapi karena masih menjalani masa *iddah* maka istri masih tetap berhak atas nafkah dari suaminya. Karena akad nikah diantara suami istri menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini sesuai kaidah fiqh :

لَا حَقَّ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا فِي حُدُودِ يَمْسُ لِلزَّوْجِ وَلَا حَقَّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِلَّا فِي حُدُودِ أَمْرِ الشَّرْعِ فِيمَا يَمْسِي الزَّوْاجَ

“Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan.”

Efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peranan dan status seorang istri yang tadinya hanya bertanggung jawab sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, setelah bercerai ia sekaligus memikul beban sebagai seorang ayah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk anak-anaknya. Penambahan tanggung jawab yang berat tersebut secara tidak langsung mengakibatkan tekanan mental dan psikologis bagi istri.

Belum lagi ditambah dengan kekecewaan terhadap putusan pengadilan yang tidak membebaskan apa-apa kepada mantan suami terkait tanggung jawab biaya hidup anak-anak. Hal ini akan membuat seorang istri gelisah dan akhirnya depresi. Kondisi psikologi seseorang yang mengalami depresi seringkali dirundung kecemasan, lambat laun akan berpengaruh pada pola asuh dalam membesarkan anak-anaknya. Apabila hatinya kacau, gelisah tidak tenang akan menjadikan para istri mudah emosi dan tak jarang akan mudah memukul atau berkata kasar kepada anaknya sebagai pelampiasan, bahkan hal yang paling buruk bisa terjadi adalah lantaran tak sanggup membesarkan anak setelah bercerai, anak bisa menjadi korban *human trafficking* yang ditempuh sebagai jalan keluar mencari uang demi kelangsungan hidup.

Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa kritis buat anak, pada masa ini anak harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru yang semula hidup berkecukupan karena seluruh kebutuhannya dapat dipenuhi sang ayah, namun berubah setelah ayah dan ibunya bercerai, sang ayah tidak lagi memberikan biaya hidup. Akhirnya anak kehidupannya terlantar karena kebutuhan pokoknya sandang pangan dan pendidikan tidak terpenuhi, anak yang tak terurus juga akan terganggu masa tumbuh kembangnya.

Tentunya hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan kehidupan sebuah bangsa. Apa jadinya jika anak-anak korban perceraian hidup dalam kemiskinan, kekurangan gizi yang disebabkan ketidakmampuan ibu untuk memberikan makanan yang bergizi, hidup dengan kebodohan karena tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi bahkan mungkin akan banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Apa yang akan terjadi

jika bangsa ini dipenuhi dengan generasi-generasi yang tidak berkualitas secara pendidikan, kesehatan dan psikologis.

Dampak kedua, ketika hak *ex officio* hakim tidak diterapkan atau minim dalam penerapannya maka tingkat kepercayaan publik/masyarakat terhadap lembaga peradilan (*public trust*) akan menurun atau mungkin bahkan tidak percaya dengan lembaga peradilan sebagai lembaga tempat mencari keadilan. Mereka menganggap sistem hukum di Indonesia sebenarnya sudah baik, sudah ada lembaga peradilan sudah ada hakim-hakim yang diangkat melalui serangkaian proses rekrutmen, namun pelaksanaan dilapangnya tidak sesuai yang diharapkan. Peraturannya sebenarnya sudah ada, namun tidak ditegakkan.

Dapat dibayangkan bahwa ketika seorang suami menceraikan istrinya, kemudian hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak memberikan putusan yang berkeadilan dan hanya mengabulkan permohonan suami (pemohon), ketika kaum lemah berharap keadilan dari sebuah lembaga yang bernama pengadilan, namun para hakimnya justru memberikan putusan yang hanya mengakomodir kepentingan salah satu pihak saja (suami) hal ini akan membuat paradigma dan persepsi masyarakat bahwa pengadilan hanya lembaga pengesahan cerai saja yang tidak peduli dengan nasib mantan istri dan terutama anak-anak, bukan lembaga peradilan sebagaimana yang seharusnya.

Masyarakat umum akan menjadi antipati terhadap lembaga peradilan dan cenderung berfikir ketika ada permasalahan perceraian tidak perlu repot-repot ke pengadilan, karena pengadilan tidak bisa menjadi tempat untuk mendapatkan keadilan. Apabila pola berfikir masyarakat umum sudah sedemikian rupa, maka dapat dipastikan bahwa pemikiran masyarakat yang demikian akan berdampak pada sistem kehidupan sosial kemasyarakatan terutama terhadap penilaian dan citra hakim dan lembaga Pengadilan.

Dampak ketiga, saat perceraian terjadi satu hal yang pasti tidak dapat kita pungkiri yang menjadi korbannya adalah anak. Ketika anak berada pada asuhan sang ibudana sang ibu tidak mempunyai pekerjaan tetap ataupun penghasilan yang dapat dijadikan pegangan untuk menghidupi anak-anaknya ditambah lagi ketika persidangan pun hakim tidak memberikan pembebanan kepada mantan suami yang notabene merupakan ayah dari anak-anak tersebut untuk memberikan biaya penghidupan maka disinilah akan muncul masalah baru.

Demi terpenuhinya kebutuhan hidup anak-anaknya seorang istri akhirnya mengajukan tuntutan atau gugatan nafkah atas anak-anak hasil perkawinannya ke pengadilan. Jadi dapat diasumsikan ketika perceraian terjadi tanpa dibarengi dengan pemenuhan hak-hak khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup anak yang seharusnya didapatkan akan menimbulkan sengketa atau permasalahan baru di Pengadilan misalnya gugatan nafkah anak. Sehingga dengan adanya putusan hakim tidak serta merta benar-benar menyelesaikan sengketa yang ada antara suami dan istri. Hal ini bertentangan dengan penerapan prinsip pengadilan, menyelenggarakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan berbeda yang terjadi apabila seorang hakim dapat memberikan putusan dengan hak yang dimilikinya yakni hak *ex officio* dalam menetapkan beban kewajiban terhadap nafkah anak maka sengketa gugatan nafkah tidak seharusnya terjadi di pengadilan.

Dampak keempat, yang tidak bisa dipungkiri apabila putusan hakim tidak berkeadilan adalah akan semakin tinggi perlakuan diskriminatif suami kepada perempuan, atau tidak ada efek jera bagi kaum laki-laki/suami yang berbuat semena-mena terhadap kaum perempuan/istri. Dengan kata lain bahwa apabila hak *ex officio* yang menjadi instrumen keadilan para hakim minim atau bahkan tidak diterapkan, jelas secara psikologis akan mempengaruhi kaum laki-laki/suami. Para suami akan merasa superior karena merasa hakim lebih berpihak kepadanya dengan memudahkan proses perceraian yang dikabulkannya tanpa membebani apa-apa. Hal ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi para suami sehingga tidak mustahil mereka akan merasa gampang dan

tidak akan gegabah dalam memutuskan untuk menceraikan istrinya dengan semena-mena.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis hakim bukanlah corong undang-undang, dimana setiap perkara yang ditangani harus merujuk kepada aturan undang-undang namun harus lebih pada rasa keadilan dan mengedepankan kesamaan hak dimuka hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat yang bersengketa. Pengaplikasiannya dalam penyelesaian perkara cerai talakhendaknya hakim melakukan pemeriksaan perkara tidak hanya fokus pada tuntutan pemohon saja, seorang hakim hendaknya juga memberikan keadilan yang semestinya didasarkan kepada rasa kemanusiaan dan juga melihat kemaslahatannya bagi pihak-pihak yang menjadi korban. Bahkan terkadang dalam mewujudkan keadilan tersebut harus bertentangan dengan undang-undang. Bukannya menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh karena lebih patuh pada undang-undang. Hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.

Disinilah keberanian seorang hakim diharapkan untuk keluar dari kekakuan undang-undang yang sifatnya formalistik kepada pemikiran yang bebas, lebih maju dan lebih manusiawi dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menciptakan keadilan yang seadil-adilnyadan kesejahteraan bagi semua pihak. Seorang hakim juga dituntut untuk berani mendobrak peraturan lama yang sudah tidak sesuai dan menciptakan suatu hukum baru dengan analisa dan logikanya dalam rangka memenuhi hak-hak yang seharusnya dimiliki pihak-pihak yang tidak mengetahui hak-hak yang seharusnya ia peroleh.

Dapat dipahami pula bahwa hakim merupakan sosok pembentuk hukum, sehingga meskipun terkadang keadilan yang diberikan hakim melalui putusan setiap perkara tidak mempunyai rujukan undang-undang atau bahkan bertentangan dengan undang-undang, maka dengan jabatannya tersebut, ketika tidak ada hukum maka hakimlah yang membuat produk yurisprudensinya. Disinilah peran hakim yang sebenarnya, seorang hakim dituntut untuk berani

menentukan hukum baru dengan keyakinannya dan tidak terbelenggu pada rumusan undang-undang. dalam rangka memenuhi rasa keadilan.

Penerapan hak *ex officio* hakim juga dapat menjadi sarana bagi seorang hakim untuk menghindari terjadinya kesan memihak kepada salah satu pihak. Penerapan hak *ex officio* hakim menjadi senjata untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang ingin memperoleh rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang telah diperoleh dalam persidangan, tujuan filosofis adanya hak *ex officio* hakim ini adalah untuk memberikan dan menciptakan rasa keadilan tersebut kepada pihak-pihak yang tidak mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkan rasa keadilan tersebut.

Dengan adanya hak *ex officio* ini maka hakim dapat membuat keputusan yang tidak berat sebelah. Artinya, hakim dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya. Jika seorang suami ingin menceraikan istrinya dan mengabaikan hak-hak istri selepas diceraikan, maka hakim dapat membela hak-hak tersebut dengan menggunakan hak *ex officio*.

Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah aspek maslahat dan mudharat apabila hak *ex officio* hakim diterapkan atau tidak diterapkan. Tidak menerapkan hak *ex officio* memang tidak menyulitkan suami yang menceraikan, karena suami tidak dibebani untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri, atau nafkah anak untuk biaya hidup anak. Namun tidak menerapkan hak *ex officio* justru berakibat mendatangkan madharat bagi istri dan anak, dimana kebutuhan wajib manusia untuk makan tidak diberikan oleh suami dalam masa *iddah* istri. Dan sesuai dengan kaidah fiqh

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari madlarat harus didahulukan daripada meraih maslahat

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa adanya kewajiban menghindari akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala upaya yang mungkin diusahakan. Sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan hakim Pengadilan Agama Krui selain tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku juga sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang yaitu untuk

memberikan kemaslahatan bagi umat. Dimana hakim Pengadilan Agama Krui menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan hak-hak yang memang sudah seharusnya dimiliki anak dan mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* dan kemudian direalisasikan dalam sebuah amar putusan perkara cerai talak meskipun tuntutan pemberian hak itu tidak tercantum dalam petitem permohonan cerai talak yang diajukan suami.

Jadi disini diharapkan adanya keberanian hakim untuk keluar dari jeratan aturan undang-undang yang sifatnya formalistik kepada pola berfikir yang lebih luas, yaitu bahwa putusan hakim yang berkeadilan adalah diatas segalanya. Atau dengan kata lain penerapan hak *ex officio* dalam konteks pembebanan hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak (*hadhanah*) adalah bentuk suatu kewajiban, karena merupakan bentuk keadilan bagi korban perceraian (istri dan anak) terlebih lagi bagi istri yang tidak mengetahui hak-hak yang seharusnya ia dapatkan dari mantan suami apalagi jika kondisi sang istri murni sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan.

Apabila banyak putusan hakim dalam perkara cerai talak yang tidak memberikan pembebanan terhadap suami, merupakan indikasi bahwa putusan yang diberikan belum memenuhi rasa keadilan. Dengan adanya peran hakim yang memberikan pembebanan tersebut dengan *ex officio* serta dicantumkan dalam amar putusan sesuai dengan kehendak dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 rumusan kamar agama poin 1 yang berbunyi :

“...maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak...”

dapat menjadi perwujudan kepada rasa kemanusiaan dan keadilan yang diharapkan menjadi perlindungan terhadap hak yang dimiliki anak dan mantan istri terutama pada saat terjadinya perceraian. Dengan begitu akan memberikan jaminan tidak dilanggarnya atau tidak diabaikannya hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri, sebab terjadinya perceraian tentunya merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan dan sangat berat bagi istri dan anak, seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam jika ia mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan.

Maka apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Krui sangatlah tepat karena dikawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi anak-anak dan mantan istri ketika sudah terjadi perceraian. Pembebanan kepada suami dalam amar putusan akan bermanfaat demi kelangsungan hidup yang lebih baik tidak hanya bagi istri namun juga menjadi jaminan bagi masa depan anak-anak.

Selain itu juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pengajuan gugatan lagi yang diajukan oleh mantan istri untuk menuntut hak-hak yang dimilikinya ke Pengadilan Agama setelah perceraian, karena hal tersebut akan memberatkan mantan istri sebab dalam berperkara di Pengadilan tentunya membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sebentar. Karena dalam prinsipnya berperkara di Pengadilan Agama harus menjunjung tinggi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Beban Kewajiban Kepada Suami Dengan *ExOfficio* Sebagai Bentuk Rasa Keadilan.

Pemeriksaan perkara cerai talak diatur dalam BAB IV, bagian kedua, Paragraf 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, hampir sama dengan yang diatur dalam BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan "*Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim...*". Selain itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkaradengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga)orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakimanggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutusperkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yangditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

Berdasarkan pasal tersebut semua pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim. Salah seorang dari mereka bertindak sebagai ketua majelis sedang dua orang lainnya bertindak sebagai hakim anggota sidang.¹²² Dalam sebuah pemeriksaan perkara hakim anggota hanya dapat mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis sedangkan penetapan hasil keputusan sidang berada ditangan hakim ketua sebagai ketua majelis.

Pemeriksaan perkara cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum namun pembacaan putusan harus dilakukan pada sidang yang terbuka untuk umum. Jika dilanggar pemeriksaan dan putusan akan menjadi batal, dan harus dilakukan pemeriksaan ulang dalam sidang yang tertutup.

Melihat minimnya penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Krui penulis ingin mengetahui lebih rinci lagi seberapa banyak majelis hakim yang menggunakan hak *ex officio* dalam hal pemberian beban kepada suami walaupun tidak diminta/dituntut oleh istri. Hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui pengamatan terhadap 167 putusan cerai talak *verstek* (lihat BAB III tabel 3 halaman 90) yang diputus selama rentang waktu 2 tahun terakhir (2016-2017) dilihat dari majelis hakim yang menangani perkara cerai talak *verstek* dengan menggunakan hak *ex officio*, hasil penelitian tersebut penulis sajikan sebagai berikut :

Tabel 6

Penanganan Perkara Cerai Talak *Verstek* Berdasarkan Majelis Hakim

No	Majelis Hakim	Cerai Talak <i>Verstek</i>		Cerai Talak Hadir Dengan Pembebanan	Cerai Talak Gugur dll	Jumlah Perkara Diterima
		Putusan Tanpa Pembebanan	Putusan Dengan Pembebanan			
1	A	2	-	-	-	2
2	B	19	4	5	1	29

¹²²M. Yahya Harahap, *Op.Cit. Kedudukan Kewenangan Dan Acara...*, h. 221

3	C1	34	3	3	1	41
4	C2	24	24	8	1	45
5	C3	12	2	2	-	28
6	C4	7	-	-	-	7
7	C5	15	-	-	-	15
	Jumlah	116	33	18	3	167

Selain data perkara di atas dalam rangka untuk mengetahui akseptabilitas/keberpihakan hakim terhadap korban perceraian, maka penulis juga membagikan kuesioner kepada seluruh hakim (9 orang hakim) yang isinya berkaitan dengan penerapan hak *ex officio*, *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah* anak di Pengadilan Agama Krui. Penulis membagikan kuesioner bukan hanya kepada ketua majelis saja namun juga kepada seluruh hakim anggota, hal ini dilakukan dengan alasan pada masa yang akan datang para hakim anggota tersebut kelak akan menjadi ketua majelis juga. Jadi pendapat mereka yang dituangkan dalam kuesioner dapat menjadi gambaran bagaimana kelak mereka mengambil kebijakan dalam memutus perkara yang sama.

Hasil kuesioner yang disebarkan penulis kepada sejumlah responden terkait tentang penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Krui. Secara ringkas Pandangan hakim Pengadilan Agama Krui diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Questioner

No	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Krui
1	Seluruh hakim menyatakan penerapan hak <i>ex officio</i> lebih banyak diterapkan dalam perkara perceraian saja (cerai gugat atau cerai talak). Untuk perkara lain misalnya dalam ekonomi syariah jika majelis hakim mau mencoba bisa saja. Pada tataran ini, tampak indikasi keberpihakan hakim terhadap penerapan hak <i>ex officio</i> untuk penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama
2	Secara umum seluruh hakim Pengadilan Agama Krui mengatakan

	bahwa dasar yang menjadi rujukan hakim Pengadilan Agama Krui dalam menggunakan <i>hak ex officio</i> adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3	Seluruh hakim menyatakan penerapan hak <i>ex officio</i> hakim untuk nafkah <i>iddah</i> istri yang diceraikan berkaitan dengan nusyuz tidaknya seorang istri aturan tentang nusyuz dan hilangnya hak istri tertuang dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan <i>mut'ah</i> , 2 hakim menyatakan tidak terkait nusyuz. Pada tataran ini, tampak bahwa aspek undang-undang menjadi dasar utama para hakim dalam menerapkan hak <i>ex officio</i> , belum pada tataran apakah telah memenuhi rasa keadilan atau tidak.
4	Mayoritas hakim menyatakan suami yang terbukti mempunyai kemampuan secara ekonomi wajib untuk diberikan beban yang berkaitan dengan hak-hak anak dan mantan istri. Pada tataran ini tampak keberpihakan para hakim dalam tataran pemenuhan hak-hak anak dan istri yang diceraai suaminya.
5	Mayoritas hakim menyatakan apabila terbukti dari perkawinan tersebut terdapat anak dan anak diasuh oleh ibunya maka seluruh hakim sepakat untuk mempertimbangkan membebaskan biaya hidup untuk anak tersebut sampai dewasa kepada sang ayah. Pada tataran ini tampak keberpihakan para hakim dalam tataran pemenuhan hak-hak anak agar nasib anak-anak korban perceraian tidak terlantar.

Demi mendalami data faktual di atas, penulis melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang hakim yang berkapasitas sebagai ketua majelis (pemimpin persidangan). Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Krui sebelum menjatuhkan putusan dengan pembebanan kepada mantan suami. Hasil wawancara tersebut diperoleh data sebagai berikut :

1. Bapak Muhyar (lama menjadi hakim, 24 tahun) berpendapat,¹²³

¹²³ Hasil wawancara dengan bapak Muhyar (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 9 Februari 2018

- a) Pertimbangan hakim dalam memberikan pembebanan kepada suami dalam cerai talak *verstek* adalah melihat dari pertama, faktor kemampuan dan kelayakan suami yang bisa dilihat dari penghasilan suami, gaya hidupnya, teman-temannya yang selevel dengan suami, kedua, faktor lama berumah tangga (usia perkawinan) semakin lama seorang istri mendampingi suaminya maka semakin layak untuk diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, ketiga mengenai nafkah anak dilihat dari faktor usia anak dan hak asuh ada pada siapa, jika berada pada asuhan suami maka tidak dibebankan jika anak berada dalam asuhan istri maka akan dibebankan kepada suami.
- b) Besarannya pembebanan bervariasi, lebih banyak diterapkan jumlah sedikit namun ada, dengan pertimbangan agar tidak memberatkan suami.
- c) Terkait nafkah *iddah* tidak tergantung dari nusyuznya seorang istri saja, karena senyatanya nusyuz juga bisa dikarenakan dari pihak suami misalnya menghabiskan harta bersama, suami punya WIL. Kaitannya disini lebih melihat pada sejauh mana bentuk nusyuz seorang istri kepada suami. Bentuk nusyuz dicontohkan jika istri yang merusak kesetiaan perkawinan misalnya perselingkuhan bahkan sampai terjadi perzinahan maka tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah*.
- d) Terkait nafkah *madlyah* (nafkah lampau) jarang digunakan karena dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara jelas sehingga dalam prakteknya hakim-hakim tidak mau memberikan nafkah lampau untuk seorang istri baik juga dengan *ex officio*.

2. Bapak Muhammad Idris (lama menjadi hakim 10 tahun) berpendapat,¹²⁴

- a) Pertimbangan hakim dalam memberikan pembebanan kepada suami dalam cerai talak *verstek* adalah melihat dari pertama, faktor kesanggupan secara ekonomi dan itikad dari suami, kedua, faktor keadaan istri apakah mempunyai pekerjaan atau penghasilan sendiri,

¹²⁴ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Idris (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 26 Januari 2018

ketiga, faktor jumlah anak dalam perkawinan tersebut. Mengenai nafkah anak dilihat dari kemampuan ayah yang lebih didahulukan, jika ternyata benar-benar tidak mampu (suami lumpuh) maka bisa saja dibebankan kepada istri.

- b) Besarannya pembebanan didasarkan pada kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada istri dan anak.
- c) Terkait nafkah *iddah* selalu mempertimbangkan nusyuznya seorang istri, apabila seorang istri terbukti nusyuz maka tidak berhak baginya untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *madlyah* (lampau). Bentuk nusyuz seorang istri dicontohkan jika istri pergi dari rumah tanpa ijin suami yang alasannya yang tidak membahayakan jiwa.

3. Bapak Supriyanto (lama menjadi hakim, 11 tahun) berpendapat, ¹²⁵

- a) Pertimbangan hakim dalam memberikan pembebanan kepada suami dalam cerai talak verstek adalah melihat dari kepatutan dan kelayakan. pertama, faktor kemampuan ekonomi dari suami, kedua, masa kebersamaan dalam perkawinan tersebut, ketiga nusyuz tidaknya seorang istri atau suami. Untuk pemberian *mut'ah* dari mantan suami terhadap mantan istri yang ditalaknya serta nafkah anak dari bapak kandung, hukumnya wajib sebagai penghibur bagi istri serta bentuk tanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan (*hadhanah*) yang diperlukan anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
- b) Besarannya pembebanan harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004.
- c) Terkait nafkah *iddah* selalu mempertimbangkan nusyuznya seorang istri, apabila seorang istri terbukti nusyuz maka tidak berhak baginya untuk mendapatkan nafkah *iddah*. Namun untuk penentuan *mut'ah* tidak terkait

¹²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Supriyanto (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 9 Maret 2018

dengan nusyuznya seorang istri. Bentuk nusyuz seorang istri dicontohkan istri tidak menjalankan kewajibannya, istri malas beribadah.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh penulis terkait dengan penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Krui melalui data kuesioner yang disebarkan penulisserta hasil wawancara, serta penelaahan terhadap beberapa putusan yang diangkat penulis sebagai sampel penelitian, sebagai berikut :

1. Bahwa hal utama yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan pembebanan kepada pemohon adalah mengenai pekerjaan dan penghasilan seorang suami. Selanjutnya melihat dari kemauan dan itikad dari pemohon itu sendiri. Tak jarang terjadi walaupun secara ekonomi pemohon itu mampu namun jika tidak diikuti itikad bisa menjadi putusan yang sia-sia, karena suami benar-benar tidak mau membayar beban yang ditetapkan sehingga berakibat tidak baik bagi kedua pihak. Ikrar talak tidak dapat dilakukan, perkawinan mereka tidak jadi terputus dan kemungkinan untuk dapat bersatu kembali sudah tidak memungkinkan lagi sehingga status perkawinan mereka jadi mengambang.
2. Bahwa penerapan hak *ex officio* hakim berupa pembebanan nafkah *iddah* atau *mut'ah* melihat dari lamanya usia perkawinan, serta ada tidaknya nusyuz seorang istri. Terkait nafkah *madhiyah* seluruh hakim jarang menerapkannya atau bisa dikatakan tidak pernah diterapkan di Pengadilan Agama Krui pertimbangannya karena tidak ada aturan dan dasar hukum yang jelas yang mengatur terkait nafkah lampau (*madhiyah*) bagi istri yang diceraikan sehingga sulit untuk diterapkan dalam pemeriksaan perkara.
3. Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan yang paling penting terlebih dahulu dibuktikan adalah mengenai keberadaan anak berada dalam asuhan siapa. Jika terbukti sang anak berada dalam asuhan ibu/istri majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan melihat kepada pekerjaan dan penghasilan istri kemudian mempertimbangkan juga jumlah anak yang diasuh istri, terakhir melihat kondisi dari anak tersebut. Kondisi yang dimaksud disini adalah usia dan kebutuhan dari anak tersebut. Jika masih balita atau dalam usia sekolah maka majelis hakim akan lebih

mengutamakan putusan dengan pembebanan nafkah anak. Kondisi anak sangat mempengaruhi seorang hakim untuk menentukan besaran jumlah beban yang akan dibebankan kepada suami sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan anak-anak tersebut.

Untuk mengetahui apakah pertimbangan yang disampaikan oleh ketua majelis tersebut sesuai dengan aturan hukum atau tidak, memenuhi rasa keadilan atau tidak, serta menjadi kesimpulan penelitian ini, penulis bermaksud menganalisa pertimbangan-pertimbangan tersebut lebih mendalam.

Pertimbangan pertama, penentuan pembebanan melihat dari pekerjaan dan penghasilan seorang suami. Pada dasarnya faktor yang paling menentukan seorang hakim memberikan pembebanan atau tidak, dilihat terlebih dahulu dari kemampuan ekonomi seorang suami. Selain itu yang dipertimbangkan juga adalah kemauan atau itikad dari pemohon itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa faktor penentu sebelum seorang hakim menjatuhkan hukuman pembebanan adalah kemampuan suami secara ekonomi dan kemauan suami untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadlanah* anak.

Ketika dalam persidangan perceraian diketahui bahwa seorang suami tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan tetapi benar-benar tidak mempunyai kemauan untuk memberikan nafkah terhadap istri yang diceraikan, maka hakim tidak akan memberikan pembebanan karena akan dikhawatirkan suami akan keberatan sehingga ia tidak melaksanakannya dan putusan Pengadilan Agama menjadi putusan yang sia-sia dan tidak berguna.

Pertimbangan kedua, Pembebanan kewajiban kepada seorang suami yang telah menceraikan istrinya, dengan disertai dengan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* atau tidak, tergantung padamannya usia perkawinan hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana dan sebesar apa pengorbanan yang telah didedikasikan seorang istri untuk suaminya. Pertimbangan berikutnya melihat latar belakang terjadinya perceraian, yakni nusyuz atau tidaknya seorang istri. Nusyuz adalah istri yang membangkang terhadap

suaminya.¹²⁶ Bentuk nusyuz seorang istri menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam membebaskan khususnya untuk nafkah *iddah*. Hal ini diketahui untuk melihat ketaatannya (istri) pada suami ketika dia masih dalam ikatan pernikahan, jika seorang istri tersebut benar-benar taat kepada suaminya, selama menjadi istri sah dia taat dan mengabdikan kepada mantan suaminya dengan sepenuh hati, tidak pernah membangkang pada perintah suami, dengan catatan perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. maka pantas jika dia mendapatkan nafkah *mut'ah* setelah berpisah dengan suaminya. Namun apabila dia nusyuz atau membangkang terhadap perintah suami yang tidak bertentangan dengan syari'ah, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah *mut'ah* ataupun nafkah *iddah*.

Pertimbangan ketiga, pertimbangan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (nafkah *hadhanah*) dengan hak *ex officio* oleh hakim semata-mata untuk kepentingan anak tersebut. Hal pertama yang akan dipertimbangkan adalah melihat keberadaan anak berada dalam asuhan siapa. Biasanya pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri, maka ibu lah yang paling berhak mengasuhnya. Hal ini ditentukan dalam pasal 156 (a) KHI yaitu akibat putusannya perkawinan karena perceraian anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak *hadhanah* dari ibunya. Ketika terbukti anak berada dalam asuhan ibunya majelis hakim juga akan mencari data mengenai kemampuan ekonomi dari istri apakah ia mempunyai pekerjaan atau penghasilan. Namun hal ini bukanlah faktor utama, kembali kepada ketentuan awal bahwasanya nafkah hidup seorang anak menjadi tanggung jawab ayahnya, apabila sang ayah terbukti benar-benar tidak dapat bekerja karena cacat atau lain hal barulah tanggung jawab itu berpindah kepada sang ibu.

Selanjutnya majelis hakim melihat dari faktor usia anak dan jumlah anak yang berada dalam asuhan mantan istri. Walaupun pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* menjadi tanggung jawab ibunya namun untuk

¹²⁶ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab : Muamalah*, (Solo : Pustaka Mantiq, 1995), h.207

tanggungjawab nafkah sang anak menjadi kewajiban ayahnya dan ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Faktor usia dan jumlah anak juga berkaitan dengan mempertimbangkan seberapa besar biaya kebutuhan hidupnya. Akan berbeda pembebanan yang akan diberikan hakim ketika seorang anak itu masih balita dengan anak yang dalam usia sekolah, begitu juga dengan tanggungan anak yang hanya seorang dengan tanggungan anak yang lebih dari satu orang akan berbeda.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis terpenuhinya rasa keadilan atau tidak sebuah putusan hakim dapat ditelaah melalui pertimbangan hukumnya. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini mengisyaratkan bahwa rasa keadilan bagi pencari keadilan merupakan aspek utama putusan seorang hakim. Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hukum seorang hakim harus memenuhi aspek yuridis (kepastian hukum), aspek filosofis (manfaat), dan aspek sosiologis (keadilan). Kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa putusan yang dijatuhkan seorang hakim haruslah mempunyai landasan atau dasar hukum yang jelas, baik hukum positif maupun hukum yang tumbuh di tengah masyarakat (hukum yang tidak tertulis). Selain itu putusan seorang hakim juga harus mengandung nilai manfaat, baik manfaat terhadap para pihak yang terlibat secara langsung maupun manfaat secara sosial kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Dan aspek utama dari putusan seorang hakim adalah rasa keadilan, dimana putusan yang dijatuhkan harus memberikan rasa keadilan bagi kedua pihak yang berperkara.

Mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Krui dalam menetapkan beban kewajiban kepada suami dengan *ex officio* yang mendasarkan pertimbangannya melihat faktor kemampuan ekonomi dan itikad dari suami, lama perkawinan, nusyuz tidaknya seorang istri, disamping itu juga didasarkan dari faktor anak yakni melihat dari usia anak dan jumlah anak yang diasuh oleh mantan istri, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233

﴿...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada ibu dan anak dengan cara yang makruf...” (Q.S, Al-Baqarah:233).

Menurut penulis putusan hakim dalam menetapkan hukuman kepada suami untuk membayar beberapa kewajiban kepada mantan istri yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah* anak putusan cerai talak *verstek* dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut sudah sangat tepat, karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum Islam, Penulis menemukan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Krui dengan menggunakan pertimbangan bukan dari hukum yang tertulis tetapi pada hati nurani dan moral. Karena dalam pencarian hukum terdapat pertimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan kaidah-kaidah dalam fiqih selain dasar hukum pokok al-Quran dan hadits seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan juga *istidlal* yang menggunakan dalil sebagai hukum seperti moral, susila dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini seharusnya patut dicontoh oleh hakim-hakim lain karena keadilan itu tidak akan terwujud jika hanya berpedoman pada hukum tertulis saja.

C. Analisis Terhadap Landasan Argumentatif Hakim Menggunakan Atau Tidak Menggunakan Hak *Ex Officio* Dalam Memutus Perkara Cerai Talak *Verstek*

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pandangan hakim di Pengadilan Agama Krui yang menggunakan hak *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan mantan istri terutama dalam cerai talak yang diputus dengan *verstek* terbagi dalam 2 kelompok :

1. Kelompok hakim yang menggunakan *ex officio* (sebagian kecil)

Pertimbangannya bahwa dalam cerai talak ada hal-hal yang melekat yang menjadi kewajiban suami sekaligus merupakan hak-hak dari anak dan istri yang akan diceraikan talak oleh suaminya. Diantaranya *mut'ah*, *iddah*, *madhiyah* dan *hadhanah* bagi anak-anak yang belum dewasa. Semuanya telah diatur dalam al-Quran dan perundang-undangan.

Alasan mengenai kelompok hakim yang menggunakan :

Secara teori hakim harus bersifat pasif dalam menangani perkara yang datang sebagaimana disebutkan dalam pasal 142 ayat (1) RBg, seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan apa keterangan yang ia dengar. Akan tetapi dalam hal penerapan hak *ex officio* hakim harus bersifat aktif karena dalam hukum acara peradilan agama berlaku asas *lex specialis* atau pengecualian yang dapat digunakan hakim dalam masalah tertentu yang dimaksudkan agar tercipta keputusan hakim yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Sifat aktif ini dimaksudkan, hakim mencari tahu berdasarkan pengetahuannya, bagaimana hukum dari perkara yang dihadapkan padanya. Mempelajari setiap kasus yang dihadapkan padanya dengan sungguh-sungguh, karena yang dikeluarkan hakim adalah sebuah hukum yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

Hak *ex officio* pada dasarnya tidak wajib/tidak selalu digunakan hakim dalam setiap perkara, karena hak *ex officio* adalah kewenangan, yang bisa dipergunakan atau tidak oleh hakim tanpa dituntut atau di minta dan penerapannya tergantung kondisi kasus, selama ada keterkaitan dengan gugatan pokok dan tidak mengganggu gugatan pokok.

Hakim yang menggunakan *ex officio* bukan termasuk dalam asas *ultra petitum partium* karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

tersendiri. *Ultra petitum partium* ialah memberikan sebuah putusan yang tidak di tuntutan, apabila hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutus suatu putusan, maka itu tidak dinamakan *ultra petitum partium*, karena ada undang-undang yang mengatur dan hakim menggunakan haknya. *Ultra petitum* hendaknya tidak diimplementasikan secara kaku tapi harus diimplementasikan secara kontekstual dan kasuistik mengikuti perkembangan zaman dan apabila memutuskan lebih dari yang diminta itu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, maka hakim wajib memutus lebih dari yang diminta, karena hakim bukanlah corong undang-undang.

Antara penerapan hak *ex officio* dan asas *ultra petitum partium* itu saling beriringan, karena penerapan asas *ultra petitum partium* itu secara kontekstual yang menjadi landasan berpikir, sedangkan hak *ex officio* sebagai alat untuk melakukan itu.

Terhadap putusan hakim yang memberikan beban kewajiban kepada suami dengan *ex officio* khususnya pada cerai talak *verstek*, disini penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara cerai talak yang memberikan pembebanan terhadap suami dengan *ex officio* merupakan cerminan dari konsep kemaslahatan, ketika *ex officio* hakim tersebut diterapkan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri diharapkan dengan diterimanya hak-hak tersebut dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari pasca terjadinya perceraian.

Kaidah hukum dalam putusan tersebut memberikan gambaran bahwa dalam kondisi tertentu, seseorang diwajibkan menjalani perintah hukum apabila berkaitan dengan kepentingan pihak lain, maka adalah patut baginya untuk mendapatkan apa yang seharusnya ia miliki secara layak. Hal ini dapat kita pahami bahwa pada konteks tertentu, putusan hakim yang melebihi tuntutan dapat dibenarkan, terutama karena putusan tersebut akan menciptakan keadilan bagi para pihak.

2. Kelompok hakim yang tidak menggunakan *ex officio* (sebagian besar)

Pertimbangannya bahwa jika seorang istri tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 2 kali secara resmi dan patut, maka dianggap ia

menggugurkan hak-haknya dan untuk itu tidak patut untuk diberikan. Pertimbangan berikutnya adalah memutus perkara yang tidak tercantum dalam petitum tuntutan termasuk asas *ultra petitum partium* yang dilarang dalam pemeriksaan perkara.

Alasan mengenai kelompok yang tidak menggunakan :

- a) Pembebanan nafkah *iddah, mut'ah* adalah penerapan hak *ex officio* hakim berkait dengan asas *ultra petitum partium* (memberi melebihi yang dituntut) dimana sebagian hakim berpendapat bahwa memberikan pembebanan merupakan bentuk *ultra petitum partium*.

Dalam memeriksa perkara perdata hakim bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan hakim. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Mereka juga berpendapat jika tidak datang maka gugurlah haknya sehingga tidak usah diberi.¹²⁷

Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg). Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan pasal 189 Ayat (3) RBg. Larangan ini disebut asas *ultra petitum partium*, hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultravires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*).¹²⁸

- b) Ketidakhadiran termohon menjadi dasar pertimbangan karena termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri sidang. Kehadiran pihak dalam sidang menjadi penting karena dalam persidangan

¹²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Idris (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 26 Januari 2018

¹²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara, Op.Cit*, h. 801

itulah setiap pihak berhak mempertahankan hak-haknya atas pihak lain. Akan tetapi pada kenyataannya tidak hadir, sehingga ketidak hadirannya tersebut dianggap telah melepaskan/menggugurkan haknya.

- c) Kekhawatirkan suami tidak mampu membayar beban yang ditetapkan sehingga berakibat tidak baik Apabila dibebankan terlalu banyak dikawatirkan tidak dapat terlaksananya ikrar talak karena suami tidak dapat memenuhi apa yang dibebankan kepadanya sehingga perkawinan mereka menjadi tidak jelas ujung akhirnya malah akan mendzalimi keduanya dan ketika istri tidak hadir apabila dibebankan akan dibayarkan kemana, jika dititipkan dikasir sampai dengan jumlah besar dan sampai maka akan menjadi temuan bagi instansi dan juga bagi pimpinan.¹²⁹

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa kondisi yang kontradiktif, bahwa disatu sisi, memberikan melebihi yang dituntut merupakan cacat hukum, disisi lain, hakim diberi wewenang untuk memberikan hukuman kepada suami yang menceraikannya. selain itu ketidakhadiran pihak telah menggugurkan haknya terhadap pihak lain, sementara ketidakhadiran pihak mungkin saja karena awam hukum, karena takut dengan pengadilan. Atau karena adigium masyarakat hadir atau tidak tetap saja ujung-ujungnya yang diperoleh hanya sebatas akta cerai saja dan oleh karena kontradiktif tersebut, penulis menganalisa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat.

Hakim dalam berbagai karya ilmiah sering dikatakan “*Judge Made Law*” atau hakim adalah pembuat hukum, dan sebagai penjelmaan hukum dan ia wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum (*rechvinding*) wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan

¹²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Muhyar (hakim) di kantor Pengadilan Agama Krui pada tanggal 9 Februari 2018

hukum tertulis yang telah ada (*contra legem*)¹³⁰ tetapi telah usang karena ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampumemenuhi rasa keadilan masyarakat, yaitu menyimpangi jalur yang ditetapkan dalam Pasal 189 Ayat (3) RBg apabila ketentuan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam masyarakat.

Meski demikian, tidak juga dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang. Berdasarkan sistem hukum dan konstitusidi Indonesia, hakim diperbolehkan membuat putusan yang keluar dari undang-undang jika aturan formil tersebut membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkan keadilan

Terhadap masalah *ultra petitum*, penulis berpendapat bahwa seorang hakim oleh undang-undang diberikan wewenang secara *ex officio* untuk memberikan sesuatu melebihi apa yang dituntut. Kewenangan yang diberikan undang-undang ini dalam rangka sebagai alat untuk memberikan keadilan bagi kedua pihak, sehingga tidak ada halangan atau masalah bagi seorang hakim untuk memberikan melebihi yang dituntut, dan tidak termasuk kategori *ultra petitum* karena kewenangan *ex officio* dan pembebanan yang diberikan masih dalam satu konteks yang sama dan saling berkaitan. Dengan kata lain bahwa antara perceraian, pembebanan nafkah *iddah* atau *mut'ah* mempunyai hubungan langsung dengan pihak yang berperkara.

Penulis berpendapat bahwa adanya asas *ultra petita* tidak dipahami secara tekstual dalam penerapannya, dengan adanya hak *ex officio* hakim maka dengan hak itu hakim dapat mengadakan/menciptakan suatu hal baru di luar tuntutan atau malah hal baru yang diberikan dan dibebankan kepada yang menuntut tersebut dengan syarat tidak menyimpang dari substansi isi petitum.

¹³⁰ Mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, lihat dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) h. 858

Hak *ex officio* hakim bisa digunakan di Pengadilan Agama hanya dalam perkara perceraian yang khususnya perakara cerai talak yang akibatnya masih melekat pada istri dalam hal nafkah *iddah*, nafkah anak, dan *mut'ah* berdasarkan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*;
- d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dalam hal pemberian nafkah *iddah*, *hadlanah* anak, dan *mut'ah* itu tidak termasuk *ultra petitum partium*, dan sudah menjadi hak istri yang telah diatur dalam hukum Islam, dari tiga hal tersebut (pemberian nafkah *iddah*, *hadlanah* anak, dan *mut'ah*) maka hakim tidak boleh melebihinya karena itu baru termasuk *ultra petitum partium*

Penggunaan hak *ex officio* hakim pada prinsipnya adalah memberikan dan menciptakan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang mencari keadilan, karena rasa keadilan yang diberikan bukan saja kepada pihak yang menuntut, namun kepada pihak yang dituntut juga harus diberikan dan diciptakan rasa keadilan yang sama, dan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* sudah tentu tidak melakukan generalisasi terhadap semua perkara, tentunya berdasarkan penggalan fakta-fakta dan peristiwa dalam persidangan, sehingga hakim tersebut akan lebih bijak menggunakan hak *ex officio*nya kepada para pihak yang memang pantas untuk memperoleh hak-haknya, sehingga rasa keadilan terpenuhi baginya, hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan asas *ultra petita*. Apabila hakim menggunakan hak *ex officio*nya, maka ini bukanlah suatu bentuk pelanggaran terhadap asas *ultra petitum partium*, karena hakim telah menggunakan hak nya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dengan pertimbangan yang patut.

Berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) RBg disebutkan sebuah putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, Jika diperhatikan ternyata implementasi asas *ultra petitum partium* ini mengalami pergeseran. Bila sebelumnya, corak penerapannya sangat kaku, namun saat ini penerapan asas *ultrapetitum partium* sedikit dilenturkan dengan mempedomani beberapa hal.

Menurut Yahya Harahap, dalam praktek beracara di lingkungan peradilan agama, terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (*ex officio*) dapat memutus melebihi yang dituntut, meskipun hal ini tidak dapat diterapkan dalam semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama.¹³¹ M. Yahya Harahap dalam hal ini juga mengemukakan bahwa putusan hakim yang melebihi tuntutan masih dapat dibenarkan sepanjang putusan dimaksud masih selaras atau memiliki relevansi yang signifikan dengan gugatan penggugat. Dalam hal demikian, putusan hakim masih dapat dibenarkan.

Adapun pertimbangan lainnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa kali memutus perkara yang mengandung *ultra petita* menggunakan alasan-alasan seperti di bawah ini:

- 1) Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya.
- 2) Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara.
- 3) Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K/Sip/1971 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 425 K/Sip/1975
- 4) Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 140 K/Sip/1971.

¹³¹ *Ibid*, h. 802

Dengan demikian, pertimbangan tidak memberikan pembebanan nafkah terhadap suami bagi istri yang diceraikan karena masalah *ultra petitum*, tidak dapat dijadikan landasan karena jabatan seorang sebagai hakim lebih tinggi daripada undang-undang yang berlaku. Meski demikian, tidak juga dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka hakim diperbolehkan membuat putusan yang keluar dari undang-undang apabila itu membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkan keadilan. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Analisa berikutnya penulis lakukan terhadap alasan atau pertimbangan ketidakhadiran pihak istri (termohon) dalam persidangan, yang diartikan oleh majelis hakim bahwa ia telah menggugurkan haknya dimuka hukum.

Ketidakhadiran pihak di depan persidangan tidak dapat dianggap sepenuhnya bahwa mereka merelakan melepas hak-haknya, karena banyak ditemui di lapangan ketika istri dipanggil menghadap sidang sebagian besar adalah orang yang awam hukum tidak mengerti akan hak yang dimilikinya, atau ketidakhadirannya tersebut karena takut dengan momok lembaga peradilan dan persidangan, atau bahkan ketidakhadiran itu disebabkan masyarakat mempunyai pemahaman bahwa pengadilan adalah lembaga formalistik perceraian saja sehingga tidak mengetahui bahwa ketidakhadirannya dapat diartikan menggugurkan haknya dimuka sidang.

Pada umumnya, masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama, adalah masyarakat yang awam tentang hukum apalagi masyarakat yang berada di daerah perdesaan seperti halnya lokasi tempat penulis melakukan penelitian. Sebagian besar masyarakat yang ada di kabupaten

Lampung Barat dan kabupaten Pesisir Barat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui mempunyai tingkat pendidikan rendah dan awam dengan hukum yang hanya bermata pencarian sebagian besar sebagai petani/pekebun. Karena itu, para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Krui hampir seluruhnya menyampaikan gugatan atau permohonan dengan format surat gugatan atau permohonan yang dibuat tidak sesuai standar ketentuan hukum acara. Sehingga mereka juga tidak paham apa-apa saja hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, termasuk dalam perkara perceraian.

Dengan demikian menurut penulis, bahwa ketidakhadiran istri dalam persidangan tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak memberikan pembebanan terhadap suami, atau ketidakhadirannya mengakibatkan secara gugurlah hak-hak yang seharusnya ia peroleh. Apakah merupakan sebuah keadilan ketika perceraian tidak disebabkan kesalahan istri, namun karena tidakhadirannya di persidangan karena hal-hal yang disebabkan karena ketidaktahuan mereka mengenai prosedur hukum, maka hilang hak-haknya secara otomatis.

Analisa berikutnya penulis lakukan terhadap alasan hakim tidak memberikan pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah* kepada seorang istri karena alasan kekhawatiran suami tidak mampu membayar beban yang ditetapkan sehingga berakibat tidak baik bagi kedua pihak.

Kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap mantan istri berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* telah sangat jelas diatur dan ditetapkan dalam al-Qur'an dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar wajibnya pemberian *mut'ah* adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Selain nafkah *mut'ah* Islam juga mengatur keharusan seorang suami yang ingin menceraikan istrinya adalah kewajiban memberikan nafkah *iddah*, tempat

tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini diatur dalam surat at-Talaq (65) ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Semua ahli fiqih sepakat bahwa istri yang diceraikan dengan talak *raj'i* (satu atau dua) berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Nafkah yang diwajibkan ini disebabkan karena ketika seorang istri diceraikan, ada masa tunggu (*iddah*) yang harus dijalani istri sebelum ikatan perkawinannya tersebut putus selamanya. Dalam masa tersebut, seorang istri tidak boleh menikah atau dinikahi siapapun, hanya suami yang dapat merujuknya.

Massa *iddah* ini juga merupakan masa transisi/penyesuaian bagi istri untuk menata kehidupannya setelah nanti benar-benar bercerai karena selesai massa *iddah* suami tidak merujuknya. Masa-masa ini bukanlah sesuatu yang mudah dan pastinya dirasa sangat berat ketika harus menjalani kehidupan setelah berpisah dibandingkan ketika dahulu masih bersama. Beban tersebut dirasa sangat memberatkan bagi seorang istri apabila dahulunya ia hanya fokus mengurus rumah tangga dan anak-anak semua biaya bergantung penuh dari pemberian penghasilan suami. Sekarang ketika sudah bercerai dan pemberian tersebut terputus, tidak ada nafkah bagi dirinya, ia harus menghidupi dan membesarkan anak-anaknya sendirian tanpa ada bantuan atau perhatian lagi dari suami.

Oleh karenanya sangatlah wajar apabila dalam masa tunggu tersebut, suami hendaknya dibebani untuk menafkahi istrinya sampai dengan betul-betul

putusnya ikatan perkawinan diantara keduanya (selesainya masa *iddah* istri). Bagi istri nafkah *iddah* yang diberikan oleh suami bisa digunakan sebagai biaya hidup sembari ia menata dan mempersiapkan diri sampai saatnya nanti dia harus berusaha menghidupi dirinya sendiri. Dalam kaidah hukum Islam dinyatakan bahwa

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan

Kaidah fiqih ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa suatu perbuatan tidak boleh membahayakan bagi dirinya sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Dalam konteks perceraian, seorang suami berhak menjatuhkan talak atas istrinya, dan istri yang ditalak wajib menjalani masa tunggu. Dan tidak boleh menikah dengan siapapun. Apabila dalam masa tunggu tersebut tidak ada nafkah dari suami maka ini akan berakibat mendzalimi kaum perempuan.

Selain dalam al-Quran, Kompilasi Hukum Islam yang menjadi bahan rujukan seluruh hakim di Pengadilan Agama dalam pasal 153 ayat (1) berbunyi :

“Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami”.

Pasal 24 Ayat (2) huruf a,b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri

Dalam Buku II Pedoman Teknis Pengadilan Agama ditentukan bahwa apabila gugatan cerai dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami,

hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah*. *Iddah* ialah masa tunggu atau tenggang waktu sesuai dengan jatuhnya talak dari suami, dimana pada masa *iddah* ini suami boleh untuk merujuk kepada istrinya. Sehingga pada masa *iddah* ini istri belum boleh untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam al-Quran dan juga dalam hukum formil yang berlaku tersebut di atas sudah sangat jelas menjadi dasar yang cukup kuat bagi hakim untuk mewajibkan suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Karena talak adalah hak suami, nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah hak istri, maka ini melekat yang merupakan satu bagian dari talak.

Sudah difahami pula bahwa hakim merupakan sosok pembentuk hukum, sehingga meskipun terkadang keadilan yang diberikan hakim melalui putusan setiap perkara tidak mempunyai rujukan undang-undang atau bahkan bertentangan dengan undang-undang, maka dengan jabatannya tersebut hakim dituntut berani berijtihad dalam menentukan hukum baru dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Hak *ex officio* dibenarkan selama tidak berbenturan dengan aturan undang-undang dan aturan hukum acara yang berlaku di pengadilan. Hakim bisa menggunakan *ex officio* dengan batasan aturan undang-undang dan digunakan sebagai bentuk ijtihad karena putusan hakim merupakan produk peradilan yang sangat erat kaitannya dengan ijtihad.

Ajaran Islam menganjurkan untuk berijtihad bagi orang yang memenuhi persyaratan untuk itu, bahkan jika seseorang berijtihad tetapi hasilnya salah maka ia tetap mendapat satu pahala. Serta bila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad, dan satu lagi pahala kebenaranyang ia dapat. Adapun dasar hukum berijtihad dalam sunnah adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَدَدَ ثُمَّ أَصَابَ قَلْبُهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَدَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ قَلْبُهُ أَجْرٌ

Dari Amr bin Ash ra, bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW

bersabda : Jika seorang hakim (penguasa) mengeluarkan satu keputusan dengan menggunakan ijtihad dan ternyata sesuai (benar) maka ia mendapatkan dua pahala dan jika seorang hakim (penguasa) mengeluarkan satu keputusan dengan menggunakan ijtihad dan ternyata salah maka ia mendapat satu pahala. ”¹³²

Dari hadist di atas, dipahami bahwa seorang hakim bisa melakukan ijtihad, apabila bila tidak menemukan masalah yang dihadapinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan begitu juga seorang hakim di Pengadilan Agama, mempunyai kebebasan untuk berijtihad dalam membuat putusan.

Sebagaimana tugas dari seorang hakim dimata hukum hendaknya dapat membantu orang-orang yang bersengketa dalam menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan mereka demi dapat tercapainya keadilan yang benar-benar adil dan menjadi kemaslahatan bagi semua pihak. Demi terwujudnya keadilan tersebut diperlukan keberanian hakim untuk dapat berfikir yang lebih luas dan lebih maju, yaitu bahwa putusan hakim yang berkeadilan adalah di atas segalanya. Dengan kata lain apabila penerapan hak *ex officio* dalam kontek pembebanan hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak merupakan kewajiban yang wajib karena merupakan bentuk keadilan bagi korban perceraian (istri dan anak). Apabila banyak putusan hakim dalam perkara cerai talak yang tidak memberikan pembebanan terhadap suami, merupakan indikasi bahwa putusan yang diberikan belum memenuhi rasa keadilan.

¹³² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah Ma'ruf Abdul Jalil, Ahmad Junaidi. Cet. II., h. 717

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Krui dalam hal pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* atau anak, masih sangat minim, hal ini dibuktikan dengan data penelitian bahwa putusan cerai talak *verstek* yang disertai pembebanan kepada mantan suami di Pengadilan Agama Krui hanya 19 % atau hanya 1/3 dari seluruh putusan yang diputus *verstek*.
2. Bahwa pertimbangan yang menjadi dasar hakim memberikan pembebanan atau terhadap para suami berlandaskan kepada faktor kemampuan suami secara ekonomi dan kemauan suami, faktor lamanya usia perkawinan hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana dan sebesar apa pengorbanan yang telah didedikasikan seorang istri untuk suaminya, faktor nusyuz atau tidaknya seorang istri, dan yang terakhir adalah faktor usia dan jumlah anak
3. Bahwa minimnya penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Krui disebabkan karena para hakim banyak terikat pada aspek hukum formil dan materiil sehingga rasa keadilan yang ada dalam hati nurani setiap hakim terhalang oleh asas dan alasan hukum aspek *ultra petitum*, aspek ketidakhadiran istri dan aspek kekhawatiran majelis hakim terhadap suami yang tidak mampu melaksanakan apa yang dibebankan sehingga putusan menjadi sia-sia.

B. Rekomendasi

Bahwa dengan dilandasi oleh kerendahan hati, setelah menyelesaikan pembahasan tesis ini, penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat dalam lapangan. Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Hakim dalam memeriksa perkara hendaknya mampu mendalami dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, Selain itu dalam memeriksa perkara perceraian hendaknya seorang hakim mengikutsertakan rasa kemanusiaan dan juga melihat kemaslahatannya bagi pihak-pihak yang menjadi korban. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Seorang hakim hendaknya beranimenginterpretasikan hukum secara luas dan menggunakan pendekatansecara sosiologis, normatif, atau dengan lebih memperhatikan nilai-nilaiyang hidup dalam masyarakat.
2. Mahkamah Agung hendaknya mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada para hakim untuk dapat merubah/membentuk *mind set* baru bahwa seorang hakimharusnya bisa menempatkan diri sebagai bagian dari pihak yang berperkara sehingga akan memunculkan rasa kemanusiaan, sehingga dia dapat merasakan apa yang dirasakan para pihak berperkara. Pelatihan tersebut juga diharapkan dapat menciptakan hakim yang mempunyai keberanian dalam menerapkan hukum dengan sebenar-benarnya, hakim bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang saja tetapi dalam keadaan tertentu *contra legem* bila perlu harus berani demi terwujudnya keadilan yang benar-benar adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011
- Ali, Zainuddin, *Filosofi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al Fiqh Al Mazahibul Al Arba'ah*, Kairo, 1980
- al-Malibari, Zainudin, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa Moch Muhtar, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005
- al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993
- Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta Pusat : KPAI, 2006
- Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, Malang : Kalimasahada Press, 1996
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet ke-6, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- _____, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- _____, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018
- As-Shun'ani, Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Cet-4, Mesir: Musthafa Al-Babi Al Halabi, 1960
- as-Subki, AliYusuf, *Nidhom al-Ushroti fil Islam*, Terj. Fiqh Keluarga, Jakarta : Amzah, 2010
- Asyur, Ahmad Isa, *Fiqih Islam Praktis Bab :Muamalah*, Solo : Pustaka Mantiq, 1995
- Ayyub, Hasan, *Fiqhu al-Ushroti al-Muslimah*, Terj. Fikih Keluarga, Jakarta : Pustaka alKausar, 2008
- Baasyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press
- Bisri, CikHasan, *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Cet ke-2, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000

- Bukhari, Al, *Shahih al-Bukhari*, Vol 1, Bukhoru: Maktabah Ashriyyah, 1996
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kumulatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran*, Depok : Cahaya Quran, 2008
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2009
- Ghozali, AbdulRahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2010
- Hamdani, Al, *Risalah Nikah*, Pekalongan : Raja Murah, 1980
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- _____, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Cet ke-2, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002
- Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8 Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Madkur, MuhammadSalam, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015
- _____, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011
- _____, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006
- Maleong, LexyJ, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000
- Malik, H. Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2010
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet ke-5 Yogyakarta : Liberty, 1998

- _____, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1984
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Mandar Maju, 2007
- _____, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan Dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Adtya Bakti, 2010
- Pandu, Yudha, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Indonesia Legal Publishing, 2006
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993
- Poerwandari, E. Ktisti, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*, Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka, 1977
- R, Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradya Paramita, 1993
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Saefuddin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung : Alumni, 1986
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2005
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fikih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala, 2009
- _____, *Terjemah Fikih Sunnah, Jilid VIII*, Bandung : Al Ma'arif, 1994
- Salam Madkur, Muhammad, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid, *Sahih Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007
- Sholihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-undangan*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1994
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet ke-4 Jakarta : Pradnya Paramita: 1979
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1985
- Subroto, Suryo, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Graffindo Persada, 2003
- Sugiono, *Metode penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2007
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 1997
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, Yogyakarta : Andi Offset, 2001
- Syahrani, H. Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2010
- _____, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib, *Naqkah Istri : Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam (terjemahan)*, Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2007
- Wahyuni dan Bambang Sutiyoso, *Relevansi Kebenaran Formil Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan*, (Fenomena, Vol I No.2, September 2003)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura(RBG)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

A Razak Pellu dalam Varia Peradilan dengan judul “*Ex officio* dan Keberanian Hakim Mengambil Keputusan”

Hartini dalam Mimbar Hukum dengan judul “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara Di Pengadilan Agama”

D. Tesis

Nawawi, Muhammad (2016), Tesis : Penerapan Hak Ex officio Dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri Dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama se-D.I Yogyakarta

Fitri, Ana Sofiatul (2014), Tesis : Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

E. Putusan

Putusan Pengadilan Agama Krui Nomor : 278/Pdt.G/2016/PA.Kr

Putusan Pengadilan Agama Krui Nomor : 259/Pdt.G/2017/PA.Kr

Putusan Pengadilan Agama Krui Nomor : 273/Pdt.G/2017/PA.Kr

F. Internet

<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/27/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-229-230/>

[http://berbeda14alfaruq.wordpress.com/ proses](http://berbeda14alfaruq.wordpress.com/proses) pembuktian di pengadilan

G. Wawancara

Hasil wawancara dengan Drs. Muhyar, SH., MH., MSi. Wakil Ketua Pengadilan Agama Krui, pada tanggal 9 Februari 2018

Hasil wawancara dengan Muhammad Idris, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Krui, pada tanggal 26 Januari 2018

Hasil wawancara dengan Supriyanto, S.Ag., MSi. Hakim Pengadilan Agama Krui, pada tanggal 9 Maret 2018

Hasil wawancara dengan Drs. Riduansyah. Panitera Pengadilan Agama Krui, pada tanggal 13 Januari 2018

